KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0041239
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 14 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Februari 2026, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (PERSERO) TBK**, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0027723.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 13 Februari 2026
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070
Email : notaris@ashoyaratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT TIMAH Tbk"

Tanggal : 14 Januari 2026
Nomor : 16
Turunan :

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT TIMAH Tbk"

Nomor: 16

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-1-2026 (empat belas Januari dua ribu dua puluh --
enam). ----------

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian ------
Barat). ----------

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------

- Tuan **RESTU WIDIYANTORO**, lahir di Salatiga, pada tanggal 20-5-1965 --
(dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -------
Indonesia, Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Sleman, ----
Karangmojo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan ----------
Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor [redacted], yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa PT TIMAH Tbk yang akan disebut, demikian mewakili ---
Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah ---
mewakili **"PT TIMAH Tbk**", suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----------
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang, beralamat -
di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, Opas Indah, Taman Sari, yang -
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----
penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut ----------
"**UUPT**"), sebagaimana telahdiumumkan dalamBerita Negara --------

Republik Indonesia tertanggal 13-3-2009 (tiga belas Maret dua ribu --- sembilan) nomor 21 Tambahan nomor 7468/2009; Anggaran Dasar --- perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ---------- dimuat/diumumkan dalam: ----------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-9-2011 (dua --- puluh tujuh September dua ribu sebelas) nomor 77 Tambahan - nomor 29351/2011; ----------
- akta tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas) nomor 75, yang pemberitahuan atas perubahan ---------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu -- empat belas) nomor AHU-03464.40.21.2014; ----------
- akta tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu -- empat belas) nomor 31, yang pemberitahuan atas ---------- penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh -------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai suratnya tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-00006.40.43.2014 serta ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -------- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal --------- 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu empat belas) ----- nomor AHU-00124.40.41.2014; ----------
- akta tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima -- belas) nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari ------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-5-2015 (dua puluh -- delapan Mei dua ribu lima belas) nomor ---------- AHU-0936015.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuan -----

atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 28-5-2015 (dua puluh -----
delapan Mei dua ribu lima belas) nomor ----------
AHU-AH.01.03-0935421; ----------

- akta tertanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu -
tujuh belas) nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Surat Keputusannya tertanggal 7-11-2017 (tujuh --------
November dua ribu tujuh belas) nomor ----------
AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017 serta pemberitahuan --
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-11-2017 (tujuh ----------
November dua ribu tujuh belas) nomor ----------
AHU-AH.01.03-0188415; ----------

- akta tertanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan November dua
ribu tujuh belas) nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-12-2017 --
(dua belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor ----------
AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------

- akta tertanggal 12-7-2018 (dua belas Juli dua ribu delapan ------
belas) nomor 11, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------
tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu delapan belas) ---
nomor AHU-AH.01.03-0221752; ----------

-keseluruh minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan --
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ----------

- akta tertanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh) ----------
  nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ------
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
  Surat Keputusannya tertanggal 3-7-2020 (tiga Juli dua ribu dua
  puluh) nomor AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020; ---------
- akta tertanggal 28-4-2021 (dua puluh delapan April dua ribu ---
  dua puluh satu) nomor 40 yang pemberitahuan atas perubahan -
  Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
  suratnya tertanggal 7-5-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh ----
  satu) nomor AHU-AH.01.03-0298657; ----------
- akta tertanggal 3-6-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua) -----
  nomor 13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
  Surat Keputusannya tertanggal 6-6-2022 (enam Juni dua ribu --
  dua puluh dua) nomor AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022
  serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -
  diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
  Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---------
  6-6-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor ----------
  AHU-AH.01.03-0245855; ----------

-ketiga minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -----
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur;-
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 17-12-2025 (tujuh -- belas Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 64 yang minuta --- aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris; ----------

(untuk selanjutnya **PT TIMAH Tbk** tersebut cukup disebut dengan ----------
"**Perseroan**"). ----------

-Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --------
sebagai berikut: ----------

-bahwa pada hari, Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) bertempat di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Lantai Lobby, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta Pusat 10710 telah ----------
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk -------
selanjutnya disingkat "**Rapat**"); ----------

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ---------
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan ----
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), yaitu --
sebagai berikut: ----------

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada ----
  Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") melalui surat -------
  Perseroan tanggal 3-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) nomor -
  0488/Tbk/PTH-0000/25-S9.3.1 perihal Pemberitahuan Rencana ----------
  Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ----
  PT TIMAH Tbk ("Perseroan") Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). ----------
- **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya ----------
  Pemanggilan Rapat, telah diumumkan dalam unggahan pada situs web ----------
  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") dan situs web ----
  Perseroan pada tanggal 10-11-2025 (sepuluh November dua ribu dua puluh ----
  lima). ----------
- **Pemanggilan** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah ----------
  diumumkan dalam unggahan pada situs web BEI, situs web Perseroan dan situs KSEI pada tanggal 25-11-2025 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh -
  lima). ----------

-bahwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir ---

secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") seluruhnya berjumlah ---------- 5.933.525.962 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham termasuk saham Seri A ---------- Dwiwarna atau merupakan 79,67% (tujuh puluh sembilan koma enam tujuh ------- persen) dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.447.753.454 -- (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu -- empat ratus lima puluh empat) saham yang terdiri dari: ----------

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan ----------
- 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham Seri B. ----------

-dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---------- 24-11-2025 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh lima), sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sehingga -- karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ---- huruf a dan Pasal 45 POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ----- ayat (4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah --- terpenuhi. ----------

-bahwa dalam Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain ------- mengenai: ----------

- **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** ----------

-bahwa dalam Rapat juga telah diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali -------- seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan ---- kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikau kepada instansi yang ---------- berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang -------

dikecualikan, terinasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan ------- dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -- instansi yang berwenang. ----------

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang ------ Saham Luar Biasa "PT TIMAH Tbk", tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas ---------- Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 63, yang minuta aktanya dibuat oleh -- saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**"); ----------

-Maka sekarang penghadap tuan RESTU WIDIYANTORO dengan bertindak --- dalam jabatannya tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu sebagai berikut:----------

<u>Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat</u>:----------

"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.566.729.612 (lima miliar lima ---- ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham atau merupakan 93,82% (sembilan puluh tiga koma -------- delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ------ dalam Rapat memutuskan: ----------

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam -- rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, --- termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 ----- Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara ---------- termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan --- mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia;**----------

   -yang telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---------- klasifikasi saham yang terdampak dengan hak suara yang hadir dalam ------- Rapat. yakni dalam hal ini 100% (seratus persen) dari Pemegang Saham ---- Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Pasal 45 POJK 15/2020:----------

2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---------- Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan ---**

dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan ----- **tersebut di atas**.----------

3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan** -- **hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan** ------- **berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun** --- **dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam** --- **suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi** ------- **untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk** ---------- **mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan** ------- **perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak** -- **ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan** ---------- **penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar** -- **tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang** ---------- **berwenang**.----------

Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, - sehingga Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai ---- berikut: ----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ---------- -

----------**PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PERUSAHAAN** ---------- **PERSEROAN** (**PERSERO) PT TIMAH Tbk**" atau disingkat ---------- "**PT TIMAH (PERSERO) Tbk**" selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----- cukup disebut dengan "**Perseroan**", berkedudukan dan berkantor pusat di ---- Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. ----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ------- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -------- dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik -------

Indonesia.----------

----------**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

----------**PASAL 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2-8-1976 (dua Agustus seribu sembilan - ratus tujuh puluh enam) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal -------- 5-2-1977 (lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) serta didirikan -- untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----------

----------**MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA** ----------

----------**PASAL 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang ---------- pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang ----- berkaitan dengan bidang usaha pertambangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau --- jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar -- keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan ---------- prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ---------- melaksanakan usaha utama sebagai berikut:----------
   a. Pertambangan Bijih Timah; ----------
   b. Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih ----- Besi; ----------
   c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam ---- Lainnya;----------
   d. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;----------
   e. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi; ----------
   f. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi; dan ----------
   g. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.----------
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan - dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ----- sumber daya yang dimiliki untuk: ----------

a. Pertambangan Bijih Uranium dan Torium; ----------
b. Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium;----------
c. Pertambangan Emas dan Perak;----------
d. Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya;----------
e. Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;----------
f. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;---------
g. Pengerukan;----------
h. Penyiapan Lahan;----------
i. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Yang Tidak ----------
Termasuk Dalam Lainnya;----------
j. Aktivitas Kantor Pusat;----------
k. Aktivitas Perusahaan Holding;----------
l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;----------
m. Jasa Pengujian Laboratorium;----------
n. Analisis dan Uji Teknis Lainnya;----------
o. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;----------
p. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam --
Lainnya;----------
q. Konstruksi Gedung Penginapan;----------
r. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;----------
s. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;----------
t. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;----------
u. angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;----------
v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;----------
w. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;----------
x. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;----------
y. Angkutan Multimoda;----------
z. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk ------
Dalam Lainnya;----------
aa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin

dan Peralatan Industri Pengolahan; ----------

bb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan; ----------

cc. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Termasuk ----- Dalam Lainnya; ----------

dd. Industri Mesin, Penambangan, Penggalian dan Konstruksi; ----------

ee. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; ----------

ff. Kawasan Industri;----------

gg. Pergudangan dan Penyimpanan; ----------

hh. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;----------

ii. Pengumpulan Limbah Berbahaya;----------

jj. *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya; ----------

kk. Museum Yang Dikelola Swasta; ----------

ll. Taman Wisata Alam; ----------

mm. Wisata Petualangan Alam

nn. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; ----------

oo. Daya raya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; ----------

pp. Taman Rekreasi; ----------

qq. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (*Ex Situ*); ----------

rr. Wisata Agro; ----------

ss. Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan; ---------

tt. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; ----------

uu. Pembibitan dan Budidaya Rusa; ----------

vv. Penangkaran Mamalia; ----------

ww. Budidaya Ayam Ras Petelur;----------

xx. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;----------

yy. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya;----------

zz. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;----------

aaa. Pertanian Hortikultura Buah;----------

bbb. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;----------

ccc. Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis;----------

ddd. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;----------

eee. Penangkaran Reptil;----------

fff. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya;----------

ggg. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, ---
Pandan, Rumput dan Sejenisnya;----------

hhh. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tanduk, Gading,
Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan;----------

iii. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;----------

jjj. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;----------

kkk. Perdagangan Eceran Lukisan;----------

lll. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya;---------

mmm. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;----------

nnn. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;----------

ooo. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;----------

ppp. Perdagangan Eceran Tekstil;----------

qqq. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil;------

rrr. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya -------
Makanan, Minuman atau Tembakau di ----------
Minimarket/*Supermarket*/*Hypermarket*;----------

sss. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya -------
Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di ----------
Minimarket/*Supermarket*/*Hypermarket* (Tradisional);----------

ttt. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya -------
Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (D*epartment Store*);----------

uuu. Restoran;----------

vvv. Rumah Minum/Kafe;----------

www. Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);----------

xxx. pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya;----

yyy. Pertambangan Pasir Besi;----------

zzz. Pertambangan Bijih Besi;----------

aaaa. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;----------

bbbb. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa sisa Tak Terpakai ------- (*Scrap*);----------

cccc. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya;----------

dddd. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri;---------

eeee. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana --------- Transportasi;----------

ffff. Instalasi Telekomunikasi;----------

gggg. Fasilitas Lapangan;----------

hhhh. Konstruksi Gedung Lainnya; dan----------

iiii. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan *Event*------- Khusus.----------

----------**MODAL** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang terdiri dari: ----------
   a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan----------
   b. 9.999.999.999 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan -- juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B; ----------

   masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh ----- rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor - sebanyak lebih kurang 74,47% (tujuh puluh empat koma empat tujuh persen) - atau sejumlah 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta - tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat) saham, ----------

masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp372.387.672.700,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:----------

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya --------- Rp50,00 (lima puluh rupiah); dan ----------

b. 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ----- ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham seri B, ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp372.387.672.650,00 (tiga ---- ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ---- ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). ----------

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ------ tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp372.387.672.700,00 (tiga ratus - tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh --- puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.----------

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku --- termasuk di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --- kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --- (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "**RUPS**") ---------- mengenai penyetoran tersebut;----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai -- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ------ dalam Pasal 26 ayat 5 jo. Pasal 29 ayat 2;----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam - bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum ---- atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ----- harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; ----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio - saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya ------- tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang - telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat ----- wajar tanpa pengecualian;----------

f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak --------- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya ---- disingkat "**HMETD**") harus memperoleh persetujuan RUPS; dan ---------

g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan ---- yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus -- sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah ----- diaudit oleh Akuntan.----------

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut --- keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta ------- persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, ---- dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ---- peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga di ------ bawah pari. ----------

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek --- Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek ------ yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku -------- penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

   a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan –

memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar --- dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan ---- RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah -- yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar --- pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing--- pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi ------ rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada ---------- pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang --- Pasar Modal.----------

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal, pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD ----- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:---

b.1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;----------

b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ------ dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ---------- persetujuan RUPS;----------

b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang - telah disetujui oleh RUPS; ----------

b.4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku --------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------

b.5. Dalam rangka perbaikan posisi keuangan;----------

b.6. Selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau ----------

b.7. Penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai -- hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau --- bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham ---- atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.--------

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ------- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ------- ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----

diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -------
-pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan
ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi -----
jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil ---
-bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ------
butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ----
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak
sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.----------

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek ---
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS -----
-Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.---

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----------
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama ------
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah Menteri yang -
tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum atau penggantinya). -------

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -------
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan --------
modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan: ----------

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan --
modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari -----
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ----------

a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal -----
dasar; ----------

a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri;----------

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi -----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan ----
Menteri;----------

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, --
maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -----
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan ------
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 ----
tidak terpenuhi;----------

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 ----
butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran -----
Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.-------

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ------
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham -lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ----------
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi ----------
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran --
dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ---
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang ------
undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --
dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ----------
dicatatkan menentukan lain.----------

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh ---

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

----------**SAHAM**----------

----------**PASAL 5** ----------

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan ----- atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang ---- terdiri dari:----------
   a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara --------- Republik Indonesia; dan----------
   b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara/Holding ---------- Operasional/BUMN dan/atau Masyarakat.----------
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A - Dwiwarna dan saham Seri B, dan yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, ------- kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.----------
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak ----- yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.----
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.----------
   b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----- yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------
   c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:----------
      c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:----------
         c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar;----------
         c.1.2 persetujuan perubahan permodalan;----------
         c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;----
         c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----------

pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;----

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris;----------

c.1.6. persetujuan penggunaan laba;----------

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota -
Dewan Komisaris;----------

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;----------

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen ----------
Perusahaan;----------

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan --
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.----------

d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c ----
Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham --
Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.-------

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki ----------
bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka -
dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam ---
Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang -
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.----------

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara -------
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ------
Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ---
saham atau saham-saham tersebut.----------

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ------
Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.----------

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa --

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

----------**SURAT SAHAM**----------

----------**PASAL 6**----------

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----------
   a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ---------- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ---------- kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan ------- ketentuan pasar modal; ----------
   b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ----- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -------- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan ------- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ---------- pemegang saham Perseroan. ----------
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ---- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ---------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di --- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi ------ bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki ---- oleh seorang pemegang saham. ----------
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat saham; ----------
   c. tanggal pengeluaran surat saham; dan----------
   d. nilai nominal saham. ----------
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat kolektif saham; ----------
   c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------

d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan----------

e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. ----------

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ------ Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama ------- bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-- sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham ------ dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat ----- dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di ----- mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan --- oleh Perseroan.----------

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh --- Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang -- Perseroan Terbatas.----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ---------- dilakukan jika: ----------

   1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut; ----------

   2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan----------

3) Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan ----- surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham -------- aslinya. ----------

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah --------- memberikan penggantian surat saham.----------

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -------- dilakukan jika: ----------

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik - surat saham tersebut; ----------

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian --------- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----------

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan --- jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan ----------

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling --- kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat -------- saham.----------

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang -- telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. ----------

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh --- Pemegang Saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti ------ juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek ----- Bersifat Ekuitas.----------

----------**PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

----------**PASAL 8** ----------

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal - ini yaitu: ----------

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -------- Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----------

Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;----------

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -- Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek tersebut; ----------

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---------- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ---------- mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -------- Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif --------- tersebut; ----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ---- ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat - ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan;----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang - ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -------- Kustodian dimaksud;----------

f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ------- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---------- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ----------

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---------- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang --------

rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;----------

h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang ------- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ------ yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --- dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;----------

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -------

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif - berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ----------

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---------- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---------- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---------- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ------- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ----------

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ------ atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -------- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -------- Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ------- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---------- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan --- nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja ---------- sebelum pemanggilan RUPS;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -------- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek tersebut;----------

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain --- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian - dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian; ----------

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ------ memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan ---- dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat - pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ------- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, -- untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) --- hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ------ saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak- ---- hak lainnya tersebut.----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang--- undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat -------- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

----------**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

----------**PASAL 9** ----------

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar -- Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. ----------
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat : ----------
   a. nama dan alamat para pemegang saham; ----------
   b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ------- pemegang saham; ----------
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ---- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ------ fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ---------- pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ----------
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ------
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. ----------
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ------ dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan --------- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ---- lain serta tanggal saham itu diperoleh. ----------
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal - dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama -------- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan ---------- pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada -- alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang - Saham. ----------
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang - Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----------
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ---- ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. ----------
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----

Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus.----------

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, ----- gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau - hak-hak atau kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.----------

9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam --------- peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana ---------- saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk - gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie*-- berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang ------- berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang -- ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

----------**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

----------**PASAL 10** ----------

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya - yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ------- pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta - ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta --- peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ---------

Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus ---------
dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas -
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak ---
yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -------
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -
ditentukan atau disetujui oleh Direksi. ----------

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---------
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen --------
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan -
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --
dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa
Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa ---
Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang -------
berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ----------
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan --
kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang
tidak dipenuhi.----------

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, -
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut ----
dicatatkan.----------

5. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat - dimana saham-saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk ---------- mencatatkan pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan ------ Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ------- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ------- pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti ------ haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -------- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang --- saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ------ Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ---------- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 pasal ini. ----------

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf a ----- butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka - waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di -- Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A ------ Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.----------

----------**DIREKSI** ----------

----------**PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya ---------- disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya -- 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan ---- apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil --------

Direktur Utama.----------

2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: ----------
   a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;----------
   b. Undang-Undang Perseroan Terbatas; ----------
   c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan----------
   d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang ----- terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -------- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.----------
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, termasuk persyaratan ------- sebagaimana di atur dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.----------
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ---- anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat ---- pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ----
6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -------- keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A ------- Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---- Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang - Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ---------- Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka -------- mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota --- Direksi. ----------
7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ---------- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ---------- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku --- sejak penutupan RUPS.----------

8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ------- mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ----- Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun --- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat - memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya ------ berakhir.----------

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ----- kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.----------

c. Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat --------- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling -- lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-------

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan - menyebutkan alasannya. ----------

10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9-- pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ---- bersangkutan antara lain: ----------

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam ----- kontrak manajemen; ----------

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----------

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan --------- dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ----------

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; ----------

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;---------

f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ----- penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN; ----------

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ---- kekuatan hukum yang tetap; ----------

h. Mengundurkan diri; atau----------

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan --

tujuan Perseroan. ----------

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini ---- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, -- kecuali ayat 10 huruf f, g dan h. ----------

12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir d --- dan g pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----------

13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga ---- baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke ------ samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.----------

14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan --- lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh --- RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ---------- Komisaris.----------

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau ------ lebih anggota Direksi Perseroan lowong: ----------

    a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain - untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

    b. dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.----------

    c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat - 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan -- sebagaimana dimaksud pada huruf b.----------

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota -

Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 -------- (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus --------- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ------- tersebut.----------

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi - yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk -------- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ---- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota -------- Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ---------- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran --------- diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.---

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ------- (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ------ setelah: ----------

i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini; dan ----------

ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---- butir b ayat ini.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ------- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ---------- perundang-undangan.----------

e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ------ setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ----------

Tahunan.----------

18. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ----------
    a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada ------- BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;----------
    b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah --- pusat dan/atau daerah;----------
    c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau ------ calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala ---------- Daerah/Wakil Kepala Daerah;----------
    d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau-
    e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut - paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada ----- Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan ------ jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang -- bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.----------
20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka anggota Direksi dimaksud ------- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ------ puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 19. ----------
21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan --- ayat 18 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, ------- kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.----------
22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ----------
    a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; ----------
    b. Masa jabatannya berakhir; ----------

c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ---- memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini; ----------

d. Diberhentikan RUPS; atau----------

e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf b pasal ini.----------

23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ---------- jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -- bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ----------

24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan ------- Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan --- atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi ---- Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -------- tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang --------- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; -----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ---------- disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; ----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ------- menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk --- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan -- baik di dalam maupun di luar pengadilan; ----------

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus – menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; ----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----------

sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat ----------
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut --------
menjadi batal; ----------

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan --------
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan --
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir ------
d; atau ----------

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. -

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi --
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; ----------

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan ----
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; ----------

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi ---
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi --
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali ----------
sebagaimana mestinya; ----------

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ---
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ---------
seterusnya; ----------

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak ----------
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -
menerima keputusan RUPS;----------

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikannya kepada OJK mengenai: ----------

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan ----------

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan

keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana -------
tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya ----------
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling lambat 2 ---
(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. ----------

----------**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI**----------

----------**PASAL 12** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ----------
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik -
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan baik di ----
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ----
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang----------
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ----------
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ---
maka: ----------
   a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: ----------
      1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan ----------
      dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. ----------
      2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan ----------
      dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada ----
      kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B ----------
      Terbanyak.----------
      3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk ----------
      mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada -------
      seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu ------
      termasuk pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama --
      dan/atau badan lain; ----------
      4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk

penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan ---------- perundang-undangan; ----------

6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan ------ Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan ---------- persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;----------

7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya -------- Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan --------- Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ---- dalam Laporan Tahunan;----------

8) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham ------- mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain ----- untuk:----------

   a) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --------- (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang (RJP) anak ---------- perusahaan melalui mekanisme RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B ---------- Terbanyak; ----------

   b) Menyetujui penetapan batasan dan/atau kriteria tertentu ------ sehubungan dengan tindakan Direksi anak perusahaan yang -- diajukan oleh Dewan Komisaris anak perusahaan sesuai ------ dengan Anggaran Dasar anak perusahaan, setelah terlebih ---- dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B --- Terbanyak;----------

   c) Menyetujui tindakan Direksi anak perusahaan yang perlu -----

mendapatkan persetujuan Perseroan selaku Pemegang Saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan -- berdasarkan batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan --------- berdasarkan pasal 12 ayat 2 huruf a angka 8 poin b); ----------

d) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris ------ Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern anak --------- perusahaan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;----------

e) Melakukan kewenangan lainnya pada anak perusahaan sesuai dengan kedudukannya selaku pemegang saham anak ---------- perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak - perusahaan;----------

9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ------- pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat --- Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan ---------- Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar ---------- pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan --------- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-------- undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.----------

b. Direksi berkewajiban untuk: ----------

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan ------- usahanya; ----------

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana - Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan rencana kerja ------ lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku; ------

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ----- RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; ----------

4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ----- Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan ------

Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana -----
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas ----------
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ----
kepada Akuntan Publik untuk diaudit;----------

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk ------
disetujui dan disahkan; ----------

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan -------
Tahunan; ----------

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -------
disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum -
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---------

9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;----------

10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan -----
peraturan perundang-undangan;----------

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah --
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat ------
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ---
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ----------
dokumen Perseroan lainnya; ----------

12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ---
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ----
dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan ---------
lainnya;----------

13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi ------
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -----

perseroan; ----------

14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi --- Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, ---------- terutama fungsi pengurusan, pencatatan,penyimpanan, dan ------ pengawasan; ----------

15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ------ laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris ------- dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau ---------- pemegang saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku ----- dibidang Pasar Modal;----------

16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan ------ perincian dan tugasnya; ----------

17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan - yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -------

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang -- diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh ------- RUPS;----------

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD - Charter*); dan----------

20) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan tetap ---- memperhatikan dan tunduk pada pedoman/kebijakan strategis --- yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak.--------

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan ------- pencapaian tujuan Perseroan. ----------

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran - Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib ---------- melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. ----------

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad - baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan ----- usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan---------- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

   b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----------

      1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----

      2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Perseroan; ----------

      3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun - tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan -- kerugian; dan ----------

      4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ---------- berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris untuk: ----------

   a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai -------- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ---------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -------- mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:--------

      1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap

Perseroan;----------

2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ------- lainnya Perseroan;----------

3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ---- selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus --- buku piutang macet;----------

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang -- pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di --- luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau ----- penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian - piutang Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik untuk sebagian ------- maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan --- oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih ---- harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai - peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara--

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai --- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;----------

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ---------- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; ----------

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan ------- pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang --------- ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana---------- dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai --- Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang --------- ditetapkan Dewan Komisaris;----------

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa --- kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama

Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), -- Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), Bangun Serah ----- Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya yang ----- sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari *(day to day - business as usual)* Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu - yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;----------

h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ------ patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk -------- mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan --- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ------- dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan --- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ------ dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ----- patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ---- piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;------

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ---------- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan -------- Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku -- di bidang Pasar Modal;----------

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -- dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan --- nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----------

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;----------

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu ---- yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan -------- ketentuan di bidang Pasar Modal; ----------

n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; ----------

o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; -----

p. Mendirikan/membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;----------

q. Melakukan pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan - rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan - hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;----------

r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan ---------- investasi; ----------

s. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan - Anggaran Perusahaan (RKAP). ----------

t. Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi.----------

8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ---------- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B ------ terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk: --

a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang merupakan BUMN;----------

b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak -------- perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh --- Pemegang Saham Seri B terbanyak;----------

9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk ------

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan --- Pemegang Saham Seri B Terbanyak;----------

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf - a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m pasal ini dengan batasan dan/atau - kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan ---------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak;----------

c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf r, s, dan t pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak; ----------

d. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g pasal ini-- sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan - memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak ----- memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;----------

e. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g dan h----- pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau - pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan - perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.----------

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya --- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, ------ Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 pasal ini. ----------

11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: ----------

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ----------

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----------

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, ----- sesuai dengan Pasal 3. ----------

12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ---- mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: ----------

1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ---- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di - bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh -------- persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut --------- termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ------- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal;----------

2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan --- sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan -- yang berlaku di Pasar Modal;----------

3) melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan ------- perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;----------

4) melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh ---------- Pemerintah Pusat;----------

5) pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana ----- Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang------ undangan.----------

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya - permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan -------- Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat --- memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan --- Komisaris.----------

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 yang ----

dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang ---- pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. ----------

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----------

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.----------

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -------- Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----------

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ------ sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, Direktur Utama berhak dan ---------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.----------

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, - hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur -- Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---------- melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan --- atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau ------ Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.----------

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama --- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau - Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada --- atau berhalangan.----------

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama ---------- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ------- Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan ---------- memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ------ tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.----------

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ------- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----------

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan --- oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang--------- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.----------

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------
    a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----- yang bersangkutan; atau ----------
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ---------- berbenturan dengan kepentingan Perseroan.----------

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:----------
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ------ dengan Perseroan; ----------
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau --------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ---- atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ---------- Perseroan. ----------

----------**RAPAT DIREKSI** ----------

----------**PASAL 13** ----------

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----- (satu) kali dalam setiap bulan. ----------
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:----------
   a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---------- Komisaris; ----------
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ------- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.----------
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ---------- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----- dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak ------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu - yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------
   b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang --- telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan --- sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. --------
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik ---------- Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama

tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin -- Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur ------- Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan ----- Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ------- ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -- pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan -- tidak melakukan penunjukan.----------

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur --- yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat ----- Direksi.----------

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah -------- seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang -- memimpin Rapat Direksi.----------

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ------ Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud --- pada ayat 9 pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.----------

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ------ anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.----------

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, --------- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ---------- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah -----

anggota Direksi.----------

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ------ mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ------- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ---------- berdasarkan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang - sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. ----------

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.----------

17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---------- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ---------- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ------- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam - Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh - seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ------- anggota Direksi. ----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam - Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh - seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ---------- Komisaris.----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf - a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.----------

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ didokumentasikan oleh Perseroan.----------

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ------- Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -- Rapat yang bersangkutan.----------

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ------ Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan --------- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---------- persetujuan tersebut.----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan --------- ketentuan yang berlaku.----------

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara -- langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam ----- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan - menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ---- suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---------- tersebut.----------

----------**DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**PASAL 14** ----------

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -

disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) ---- orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang --- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.-------

b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -------

c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. ----------

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris -- tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan ------- Dewan Komisaris. ----------

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:----------

a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;----------

b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;----------

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ----------

d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait - dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ---- orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, - dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota - Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. ----------

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ------ pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---------- mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah ------ manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat -- menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta ---------- persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.----------

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ------ dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ----------

Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang ------- saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon ---- yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana --- mengikat bagi RUPS.----------

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -------- Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ---------- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai -- berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -- perundang-undangan.----------

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ---- sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS - yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS --- Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun -------- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ------ memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.----------

   b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. ----------

   c. Anggota Dewan Komisaris Persero yang berakhir masa jabatannya dapat -- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).----------

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan - keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ----------

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 10 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ------- Komisaris yang bersangkutan antara lain:----------

    a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----------

    b. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan --------

perundang-undangan; ----------

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; ----------

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; ----------

e. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat -------- penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;----------

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai - kekuatan hukum yang tetap; ----------

g. mengundurkan diri;----------

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ------ tujuan Perseroan;----------

12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk --------- membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat 11 huruf e, f, -- dan g. ----------

13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c---- dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----------

14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan ----- keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus ---------- dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan - dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan -- salah seorang di antara mereka.----------

15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ---------- mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat ------- dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ---------- Komisaris. ----------

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih - anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: ----------

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ---- apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) - salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah ---------

Komisaris Utama;----------

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan -------- sebagaimana huruf a. ----------

17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri - A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris ----- untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang --- sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -------- mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.----------

18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ---------- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---------- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ------- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ----- yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ---------- perundang-undangan.----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---------- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung---------- jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -

bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam -----
RUPS. ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----------
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.---

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ---------
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 --
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, -------
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----------
Komisaris.----------

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ------

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau ----------

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap -------
dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud -
pada ayat 19, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan----
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan -
jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan ----------
pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.----------

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya ----
semula sebagaimana dimaksud pada ayat 20, maka anggota Dewan ----------
Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pngunduran diri setelah ---
lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 20.---

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: ----------

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;----------

b. masa jabatannya berakhir;----------

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi --------

memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini----------

d. diberhentikan RUPS; atau----------

e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 18- huruf b Pasal ini. ----------

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa - jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang ----- bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ----------

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ---- termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ------- ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan.----------

----------**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN** ----------

----------**DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan ------- pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan -- maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan ------ nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan --- Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang---------- undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan.----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ----- maka: ----------

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: ----------

1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, -- memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat --------- berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; ----------

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;----------

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; ----------

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ------ dijalankan oleh Direksi; ----------

5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -

6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -------- Komisaris; ----------

7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ---------- ketentuan Anggaran Dasar ini; ----------

8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, ------ Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu --- dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; ----------

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka ------- waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;----------

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu - untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran ----- Dasar ini; ----------

11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan ------ persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terlebih dahulu;----

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; dan ----------

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ---- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau ------ keputusan RUPS; ----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----------

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ----------
pengurusan Perseroan; ----------

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang ----
Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan, ---
serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan --------
ketentuan Anggaran Dasar ini; ----------

3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap ---
penting bagi kepengurusan Perseroan; ----------

4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila ----
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; ----------

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan
melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; ----------

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; ----------

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ----------
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; ----------

8) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ----------
salinannya; ----------

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; --

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ----------
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----

11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau -----
yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan ----------
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan ------
termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang -------

Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;---

13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan --- Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan -------- Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal; -- dan ----------

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan --- dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan --------- peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau ---------- keputusan RUPS.----------

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris ----- harus: ----------

a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ------- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ---------- akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan ----------

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam ---------- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi -- untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ------ Perseroan. ----------

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --- Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau --- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -------

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat ---------- membuktikan: ----------

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------
2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung ---

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ------- maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; ----------

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; -- dan ----------

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

----------**RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**PASAL 16** ----------

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala --- paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 - (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan ---------- menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.----------
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris -- Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan -- rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil ----- Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota ------ Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. ----------
7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan ----- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan ------- Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat ---

atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik --- (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. ----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----- telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ---- diadakan sebelumnya. ----------

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 harus mencantumkan acara, -- tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------

10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil --- Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin - Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil ---------- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan ------- Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin --- Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----- Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukkan. ---

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam --- hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan --- Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. ----------

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan --------- Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -------- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---- anggota Dewan Komisaris.----------

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai ----- anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam --- usia bertindak sebagai pimpinan rapat.----------
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---------- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ------- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -------- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ---------- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.----------
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam - Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -- rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh - seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada ---- seluruh anggota Dewan Komisaris.----------
    b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam - Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -- rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -

seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota -------- Direksi.----------

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ------- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.----------

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ didokumentasikan oleh Perseroan.----------

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ----- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan ---- yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ----------

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --------- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota ---- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ------- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.----------

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara ----- fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya - sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, --- baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ------ Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam ------- pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau

kontrak tersebut.----------

----------**RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN** ----------

----------**PASAL 17** ----------

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) ------- dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan ------ peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.------
2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya ------- memuat:----------
   a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;----------
   b. posisi perseroan saat ini;----------
   c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;----------
   d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, dan program kerja;----------
   e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan----------
   f. proyeksi keuangan perseroan.----------
3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana ---- dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS.----------
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini dapat ---------- dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ----------
5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani - oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada -- RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang -------- ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di - bidang Pasar Modal, untuk mendapatkan persetujuan. ----------
6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat ---- 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama -----

Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan ----- dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang ------ Pasar Modal.----------

----------**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN** ----------

----------**PASAL 18** ----------

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) --- untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:----------
   a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program -- kerja/kegiatan; ----------
   b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ---------- kerja/kegiatan; ----------
   c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;----------
   d. Program Kerja Dewan Komisaris;----------
   e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;-----
   f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);----------
   g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;----------
   h. Manajemen Risiko;----------
   i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan----------
   j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. ----------
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana - dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS.----------
3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan -- Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ----------
4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ---- menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran ---- Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.----------
5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris ---------- sebagaimana ayat 3 Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran --------

Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi ----------
disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari----
kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang ----------
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---------
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

6. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui -
oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan
kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini) paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroanberjalan (tahun ---
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau -
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.----------

7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan -----
belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu --------
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka Rencana Kerja dan --------
Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.---------

----------**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

----------**PASAL 19** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir ----------
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. ----------

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang----------
kurangnya: ----------

a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri -
atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau ------
dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi ---
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ---------
perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;---------

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;----------

c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN yang

memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;----------

d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus, -- jika ada;----------

e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada;----------

f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;--

g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ---- kegiatan usaha Perseroan;----------

h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan----------

i. Penghasilan bagi ánggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---------- Perseroan untuk tahun yang baru lampau.----------

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru ------- lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ----- yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. ----------

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani ----- sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan ------ pengesahan. ----------

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ---------- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan -------- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 - (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan - yang berlaku. ----------

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani - Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau --- alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. ----------

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----- tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -

pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan ---------- dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. ----------

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan --- sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. ----------

9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.----------

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan -------- Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, -- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan - dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --- tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan ---------- keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai ----- dengan ketentuan yang berlaku.----------

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -- ayat 4 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal ---------- pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.----------

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat - kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara ------- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan ----- yang berlaku dibidang Pasar Modal.----------

----------PELAPORAN ----------

----------PASAL 20 ----------

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan --------- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. ----------

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi -------- laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. ----------

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi -

sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan --------
Komisaris. ----------

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
dan ayat 3, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai --
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang --------
berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode -------
triwulanan tersebut.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 21** ----------

1. RUPS dalam Perseroan adalah: ----------
   a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.----------
   b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan --
      kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.----------
2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua--------
duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, kecuali dengan tegas --------
dinyatakan lain.----------
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ------
mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat ---
melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik -----
adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media -------
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai
dengan peraturan di bidang Pasar Modal.----------
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
   a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang ----------
      disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan -------
      Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal atau -----
      pihak lain yang disetujui OJK;----------
   b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----------

5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6.----------

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: ----------

   a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:----------

      i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------

      ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau----------

      iii. Dewan Komisaris.----------

   b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.----------

   c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.----------

   d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:----------

      i. dilakukan dengan itikad baik;----------

      ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

      iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;--------

      iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;----------

      v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; ----------

   e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d. ----------

   f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham --

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. ----------

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -- tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang ----- saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat --- ini.----------

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ------- mengumumkan:----------

   1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- yang tidak diselenggarakan; dan----------

   2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender---- telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.----------

j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini ---- diterima Dewan Komisaris.----------

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------ sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.----------

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam

jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- yang tidak diselenggarakan; dan----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

m. dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari --- kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ---------- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri --- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ------ menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana ------ dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.----------

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.----------

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir iii ayat ini, dalam ------ jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi ----- wajib mengumumkan:----------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender---- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini

atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud -- dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.----------

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------ sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.----------

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.

t. selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s --- ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga ------- informasi:----------

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang --- saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah -- kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;------

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---- sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ---- mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -------- dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ------- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau----------

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS - yang diusulkannya.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

----------**PASAL 22** ----------

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan. ----------

2. Dalam RUPS Tahunan: ----------

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada --- Pasal 19; ----------

b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif; ----------

c. dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK --- sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan - audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit - pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang -- berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar -- dan/atau dicatatkan;----------

d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan ----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.----------

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta --- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ---- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ------- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ---- kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.--------

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---- Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ---- tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik ------- dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan ---------- kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu--- waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk -- termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik --------- pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** ----------

----------**PASAL 23** ----------

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--

----------**PASAL 24** ----------

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.------
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ---- diadakan di: ----------
   a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------
   c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha - utama Perseroan; atau ----------
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan --------- dicatatkan. ----------
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan ------ sebagai berikut:----------
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; ----------
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ----------
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.----------
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai ------ berikut: ----------
   a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---- acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ------ pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman RUPS; ----------
   b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ---- diungkapkan secara jelas dan rinci; ----------
   c. dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud -- pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --

acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan ------- RUPS;----------

d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku ----- untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----- yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n.----------

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ------ saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ---------- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman dan tanggal pemanggilan; ----------

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: ----------

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---------

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara -- RUPS; ----------

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------

4) tanggal pemanggilan RUPS. ----------

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6, selain - memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi --- bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan -- dari pemegang saham atau Dewan komisaris; ----------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga --- keterangan: ----------

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ---- kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -

tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ----------

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ------ setiap rapat. ----------

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham ---------- Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang - Pasar Modal;----------

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang ----- Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf m Anggaran Dasar ini.----------

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ----- ketentuan sebagai berikut: ----------

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ---- kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ---------- pemanggilan RUPS; ----------

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a adalah: ----------

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------

2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per -- dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ---- harus: ----------

1) dilakukan dengan itikad baik; ----------

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;--------

4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----------

5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ----------

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud -- pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -------

RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini; ----------

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan ---------- sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. ----------

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut**:**----------

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ------- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: ----------

1. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------
2. waktu penyelenggaraan RUPS; ----------
3. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------
4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --------
5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---------- tersebut; ----------
6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ----- RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan----------
7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.----------

c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku ------ untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n. ----------

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10

(sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-------- kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----------

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; ---

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama ---- telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan -- ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan ------ perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham - Perseroan dicatatkan; ----------

d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. ----------

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan - ditetapkan oleh OJK;----------

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ---------- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender--- setelah RUPS kedua dilangsungkan.----------

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:----------

i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; ----------

ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; ----------

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan----------

v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.----------

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini.----------

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang --- saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ----- dan/atau e-RUPS; ----------

b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----- wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --- dengan penyelenggaraan RUPS; ----------

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ------- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ---- acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang---------- undangan lain tersebut; ----------

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh ----- informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; ----------

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota - Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --- tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang ------ diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ------ saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan -------- bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen --- sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:----------

a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham ---------- independen; dan----------

b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar,

yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ----------
peraturan perundang-undangan.----------

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
    a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat --------
    perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----
    sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.----------
    b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
    ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----------
    penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan
    ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
    ayat 7 Pasal ini.----------
    c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
    dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan --
    RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ------
    RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena --
    kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan ----------
    pemanggilan ulang. ----------
13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:----------
    a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa -
    berhak menghadiri RUPS.----------
    b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang -
    saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan --
    1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----------
    c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ----------
    pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:----------
        i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -
        pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham --------
        Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan--
        ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -
        pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham --------

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-------

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ---- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.--

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana --- dimaksud pada huruf b ayat ini.----------

14. Pemberian kuasa secara elektronik: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ------- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara -- dalam RUPS.----------

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini ------ dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya -------- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan --- ketentuan peraturan perundang-undangan----------

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat -- dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang -- disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh --- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus -- dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan - RUPS.----------

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.----------

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang --- saham mencantumkan pilihan suara.----------

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.----------

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ---------- meliputi:----------

1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; ----------

2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ----------

3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----------

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.----------

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:------

1) cakap menurut hukum; dan ----------

2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.----------

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ------- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan. ----------

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa ------- dinyatakan batal. ----------

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan -------- perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ------- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan ---- yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ----- perundang undangan.----------

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta ---------

pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. ----------

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---------- Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -- serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.----------

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -------- pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad -- baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.------

15. Penyedia e-RUPS:----------

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain -- yang disetujui oleh OJK. ----------

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat - ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak - hadir dalam RUPS. ----------

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat - ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di --------- wilayah Republik Indonesia. ----------

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada --- huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan --------- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----------

1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi -------- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat ------ mengakses e-RUPS; ----------

3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS;

4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan --------- kegiatan e-RUPS; ----------

5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ----------
6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat ---- perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan --------- layanan dan fitur e-RUPS; ----------
7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ---------- pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, ---------- penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat - pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ----- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data -------- utama; ----------
9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih ------ kelola sistem teknologi informasi; ----------
10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ----------
11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.--------

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -------- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi ---- Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data - dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8) ayat ini.----------

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. ----------

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah -------- memperoleh persetujuan OJK.----------

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:------

1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses -- kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran ---------- Pengguna e- RUPS; ----------
2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; ----------
3) tata cara penggunaan e-RUPS; ----------
4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; ----------
5) batasan akses penggunaan e-RUPS; ----------
6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; ----------
7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; ----------
8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan; dan ----------
9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna --- e-RUPS. ----------

16. Media Publikasi dan Bahasa:----------

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, - pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS --------- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit:----------
   i. situs web penyedia e-RUPS; ----------
   ii. situs web bursa efek; dan ----------
   iii. situs web Perseroan;----------

   dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --- asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.----------
b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama dengan ------ informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -
c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan --- dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -

sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. ----------

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh --------- Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ----- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah - RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ---- ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: ----------

i. situs web bursa efek; dan ----------

ii. situs web Perseroan; ----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.----------

----------**PIMPINAN, TATA TERTIB DAN** ----------

----------**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 25** ----------

1. Pimpinan RUPS: ----------

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---- Komisaris; ----------

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; ----------

c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan - huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; ----------

d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -------- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan - dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris; ----------

e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ------ kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi --- yang ditunjuk oleh Direksi; ----------

f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara -- yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota ----- Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; ----------

g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -- RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan ---------- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS; ----------

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---------- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut --------- dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -- diperlihatkan kepadanya.----------

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir; ----------

b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---- ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; ----------

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ------ penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ----------

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; ----------

2) mata acara rapat; ----------

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- pertanyaan dan/atau pendapat.----------

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ---

ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;-

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --- dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari -- dan oleh peserta RUPS; ----------

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ------- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta --- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---------- Pemegang Saham Independen, Risalah RUPS wajib dibuat dalam ------ bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar - di OJK;----------

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS;----------

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib - disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender-- setelah RUPS diselenggarakan;----------

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf f jatuh pada hari libur, Risalah RUPS tersebut wajib -------- disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.----------

4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: ------

1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ---- RUPS, dan mata acara RUPS; ----------

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -- saat RUPS; ----------

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ---- RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----------

4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---- terkait mata acara rapat; ----------
5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -- memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ---- saham diberi kesempatan; ----------
6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------
7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -- setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata --- acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan --------- pemungutan suara; ----------
8. keputusan RUPS; dan ----------
9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham -- yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -------- pembagian dividen tunai. ----------

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib --- diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.----------

c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 dan 4 mutatis mutandis - berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ----- telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf m dan penyelenggaraan RUPS - oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 - huruf i.----------

----------**KUORUM, HAK SUARA DAN** ----------

-------**KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -------

----------**PASAL 26** ----------

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan - dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:----------

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ------ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---- paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -------- dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --- hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini ---------- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -------- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---- OJK atas permohonan Perseroan.----------

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum ------- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi ------- material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ----------

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan --- jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima ----- puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah -- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka ----- yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para --------- pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama --- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang --------- bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan.----------

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang - Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan ------- adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang ---------- mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham ----------
independen.----------

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, --
maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang -saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ---------- independen yang hadir dalam rapat; dan----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -------- dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara -yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas -------- permohonan Perseroan. ----------

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -- independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham ---- yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam -------- RUPS.----------

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, ---- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan ------- disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para ---------- pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------ lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --- lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini --- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ---------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan -- disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan -------- ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ------ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah -- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali - untuk acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh ---------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a--- ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh

para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling ------ sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham ------- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan Anggaran Dasar - terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum ------ kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK - atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan ---- Anggaran Dasarterkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur ----- permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh oleh ---------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -------- berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, -------- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran ---- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan ------- sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ---- saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ------ mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------ lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --- paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ------- dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih

besar;----------

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah --- jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham ------- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ------ Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah --- suara setuju yang lebih besar; dan ----------

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -------- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ------- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan -------- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---------- Perseroan. ----------

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan - OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ---------- tersebut.----------

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak - menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS ----- secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam ------ peraturan di bidang Pasar Modal.----------

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara.----------

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --- dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara -------- berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ---- mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan ---------- merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.----------
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh --- bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara --------- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang ---------- bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan ------- Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima - kuasa.----------
13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -------- menentukan lain.----------
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -- dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai maka keputusan diambil melalui -------- pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.---------

----------**PENGGUNAAN LABA** ----------

----------**PASAL 27** ----------

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ---------- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. ----------
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ---------- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS -- Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum - dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai ---- besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain ------

seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan ----------
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang ----
mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS --
untuk memutuskan lain.----------

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada pemegang ----
saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam --------
keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan -------
bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan
Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ---
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan --------
pembagian dividen tunai.----------

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan ----
oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ----

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang --------
saham. ----------

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 -----
pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian
lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk ---------
karyawan. ----------

6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya boleh dibagikan apabila --
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak - dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ------- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam ---- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --------- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat ---------- pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya ---------- administrasi yang ditetapkan Direksi.----------
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana --------- dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 ----- (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. ----------
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ----- Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ------ mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan ---------- kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku. ----------
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan - ayat 11 Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP.----------
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ---------- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ------ Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ---------- bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam - hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ------- ayat 11.----------

----------**PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

----------**PASAL 28** ----------

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. ----------
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --- pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -------
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------- Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) --- dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. ----------
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum --- mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat --- dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi -- oleh cadangan lainnya. ----------
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini -- telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat --- memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi ----- keperluan Perseroan. ----------
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---------- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan ------- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan.----------
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

----------**PASAL 29** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang --- tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai

tercantum dalam Pasal 26 ayat 4 dan ayat 5.----------

3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.----------

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, ---- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka ----- waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi ----- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri - sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. --

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut ---- dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan ---------- memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang ---------- Perseroan Terbatas. ----------

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis - kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat -- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di - tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 -------- (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan ---- modal tersebut.----------

----------PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ----------

----------PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ----------

----------PASAL 30 ----------

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan --- oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ---------- perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

----------PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN ----------

----------BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM ----------

----------**PASAL 31** ----------

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6. ----------
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.----------
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ---------- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. ----------
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.----------
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan ---- hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang--------- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

----------**DOMISILI PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 32**----------

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat --- dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.----------

----------**KETENTUAN PERATURAN PENUTUP** ----------

----------**PASAL 33** ----------

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- mengikuti UUPT, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan ----- lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan.----------

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, -------- Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----------
mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta ini kepada Menteri Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili, mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. ----------

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima --
menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** ----------

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----------
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor ----
Notaris, Representative Office Jalan Medan Merdeka Timur 15 Jakarta ----------
Pusat, dengan dihadiri oleh: ----------

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
  tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----
  Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun -----
  Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ----
  Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;
  dan ----------
- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ----
  18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
  tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Amara Garden ----
  Blok C4, Jalan Ciliwung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----------
  Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ----------
  pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk ----------
  sementara berada di Jakarta;----------

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.----------

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan ----- para saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris, sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yang --- dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Dilangsungkan dengan satu coretan, tanpa gantian maupun tambahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.----------

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



13 FEB 2026

ASHOYA RATAM, SH, MKn.

Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARY PUBLIC & LAND DEED OFFICER

IN

SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY

Jalan Suryo Number 54 Kabayoran Baru South Jakarta 12180

Phone: (021) 2923 6060, Fax: (021) 2923 6070

Email: notaris@ashoyaratam.com

STATEMENT OF RESOLUTIONS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"PT TIMAH Tbk"

Date : 14th January 2026

Number : 16

Copy :

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

STATEMENT OF RESOLUTIONS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"PT TIMAH Tbk"

Number: 16

-On this day, Wednesday, 14-1-2026 (the fourteenth day of January two thousand twenty-six).----------

-At 09.30 WIB (thirty minutes past nine, Western Indonesia Time).----------

-Appeared before me, ASHOYA RATAM, Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary Public in South Jakarta Administrative City, in the presence of witnesses known to me, the Notary Public, and to be mentioned at the end of this deed:----------

- Mister **RESTU WIDIYANTORO**, born in Salatiga, on 20-5-1965 (the twentieth day of May one thousand nine hundred and sixty-five), an Indonesian Citizen, the President Director of PT TIMAH Tbk, residing in Sleman, Karangmojo, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 006, Community Unit of (Rukun Warga) 003, Vilagge of Purwomartani, Sub-district of Kalasan, Sleman Regency, the holder of Residential Identity Card number [redacted], the photocopy of which is attached to the minutes of this deed, temporarily being in Jakarta;----------

  -according to his statement, in this case, acting in his capacity as mentioned above and based on

FIRRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the powers of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT TIMAH Tbk to be mentioned below, and thereby representing the Board of Directors of, and therefore acting for and on behalf of, and legally representing **"PT TIMAH Tbk"**, a limited liability company incorporated pursuant to and under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled and having its head office in Pangkalpinang City, having its address at Jalan Jenderal Sudirman number 51, Opas Indah, Taman Sari, the Articles of Association of which have been amended entirely in order to adjust with the Law number 40 of 2007 (two thousand seven) regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as **"UUPT"**), as published in the State Gazette of Republic of Indonesia dated 13-3-2009 (the thirteenth day of March two thousand nine) under number 21, Supplement number 7468/2009; the aforesaid Articles of Association of the limited liability company have been re-amended as included / announced in:----------

- the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 27-9-2011 (the twenty seventh day of September two thousand eleven) under number 77 Supplement number 29351/2011;-------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

- deed dated 26-6-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under number 75, which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-6-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under number AHU-03464.40.21.2014;-
- Deed dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number 31, which notification on the merger of the Company has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number AHU-00006.40.43.2014 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number AHU-00124.40.41.2014;----------

FIRMAN SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

- deed dated 27-5-2015 (the twenty seventh day of May two thousand fifteen) under number 47, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 28-5-2015 (the twenty eighth day of May two thousand fifteen) under number AHU-0936015.AH.01.02.Tahun 2015 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 28-5-2015 (the twenty eighth day of May two thousand fifteen) under number AHU-AH.01.03-0935421;----------

- deed dated 26-10-2017 (the twenty sixth day of October two thousand seventeen) under number 47, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 7-11-2017 (the seventh day of November two thousand seventeen) under number AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017 and notification on amendment to the Articles of Association

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 7-11-2017 (the seventh day of November two thousand seventeen) under number AHU-AH.01.03-0188415;-

- deed dated 29-11-2017 (the twenty ninth day of November two thousand seventeen) under number 76, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 12-12-2017 (the twelfth day of December two thousand seventeen) under number AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017;----------
- Deed dated 12-7-2018 (the twelfth day of July two thousand eighteen) under number 11, which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 13-7-2018 (the thirteenth day of July two thousand eighteen) under number AHU-AH.01.03-0221752;----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

-the entire minutes of deed as mentioned above are made before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta;----------

- deed dated 1-7-2020 (the first day of July two thousand twenty) under number 1, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 3-7-2020 (the third day of July two thousand twenty) under number AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020;----------
- deed dated 28-4-2021 (the twenty eighth day of April two thousand twenty one) under number 40 which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the M inister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 7-5-2021 (the seventh day of May two thousand twenty one) under number AHU-AH.01.03-0298657;----------
- deed dated 3-6-2022 (the third day of June two thousand twenty two) under number 13, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Decree dated 6-6-2022 (the sixth day of June two thousand twenty two) under number AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 6-6-2022 (the sixth day of June two thousand twenty two) under number AHU-AH.01.03-0245855;-------

-the three minutes of deed last mentioned are made before RINI YULIANTI, Bachelor of Law, Notary Public in East Jakarta City;----------

-the last composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the aforesaid Limited Liability Company is included in deed dated 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty five) under number 64 which the minutes of deed are made before me, the Notary Public;-------

(hereinafter the aforesaid **PT TIMAH Tbk** shall be simply abbreviated to "**the Company**").----------

-The appearing person is known to me, the Notary Public.------

-The appearing person, by acting as mentioned above, first declares as follows:----------

FIKRI SAID SEED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

-that on Wednesday, 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty five), taking place at Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Lobby Floor, Jalan Lapangan Banteng Selatan number 1, Central Jakarta 10710 was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter abbreviated to **"the Meeting"**);----------

-that Notification, Announcement and Summons for the Meeting have been made pursuant to the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 13, Article 14 and Article 17 of the Financial Service Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (hereinafter referred to as **"POJK 15/20"**, as follows:---------

- **Notification** on plan to hold a Meeting to the Financial Service Authority to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / the Financial Service Authority (hereinafter referred to as **"OJK"**) through the Company letter dated 3-11-2025 (the third day of November two thousand twenty-five) under number 0488/Tbk/PTH-0000/25-S9.3.1 in the matter of Notification on Plan to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT TIMAH Tbk ("the Company") of 2025 (two thousand twenty five).----
- **Announcement** to shareholders with respect to the intention of making of Call for a Meeting, has been

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

implemented by uploading to the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "**KSEI**"), the website of *Bursa Efek Indonesia* (BEI)/Indonesian Stock Exchange (hereinafter referred to as "**BEI**") and the Company website on 10-11-2025 (the tenth day of November two thousand twenty five).------

- **Summons** to shareholders to attend a Meeting has been published by uploading to the website of BEI, the Company website and the website of KSEI on 25-11-2025 (the twenty fifth day of November two thousand twenty five).----------

-that at the General Meeting of Shareholders attended and / or represented by those being present physically or electronically through the Electronic General Meeting System of KSEI (hereinafter called "**eASY.KSEI**") entirely 5,933,525,962 (five billion nine hundred and thirty three million five hundred and twenty five thousand nine hundred and sixty two) shares including Series-A *Dwiwarna* share or at 79.67% (seventy nine point sixty seven percent) of total valid voting shares issued by the Company until the Meeting, namely 7,447,753,454 (seven billion four hundred and forty seven million seven hundred and fifty three thousand four hundred and fifty four) shares comprised of:----------

- 1 (one) Series-A *Dwiwarna* share; and----------

FIKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

- 7,447,753,453 (seven billion four hundred and forty-seven million seven hundred and fifty-three thousand four hundred and fifty-three) Series-B shares.----------

-in view of the Register of Company Shareholders as of 24-11-2025 (the twenty fourth day of November two thousand twenty-five), until 16.00 WIB (sixteen zero-zero, Western Indonesia Time), then quorum required in Article 41 paragraph (1) a), Article 42 a) and Article 45 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) a), Article 25 paragraph (4) a) and Article 25 paragraph (5) a) of the Articles of Association of the Company has been fulfilled.----------

-that the Meeting is held with Agenda, as follows:----------

- **Approval for Amendment to the Articles of Association.**--

-that the Meeting has empowered with substitution rights the Board of Directors of the Company to take any actions required relevant to decision on the Meeting agenda, including to prepare and restate all of the Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and empower with substitution right to convey to appropriate agency to obtain the receipt of notification and approval for amendment to the Articles of Association of the Company, do anything deemed necessary and useful for such needs without any exception, including to make addendum and / or amendment to the Articles of Association, if required by appropriate agency.----------

AKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

-that the above matters are included in the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "PT TIMAH Tbk", dated 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty five) under number 63, the minutes of which are prepared by me, the Notary Public (hereinafter simply abbreviated to **"the Minutes of Meeting"**);----------

-Now, therefore the appearing person Mister **RESTU WIDIYANTORO** by acting in his capacity as mentioned above hereby restates any decisions on the First Agenda of the Meeting, as follows:----------

In the First Agenda of the Meeting:----------

"The Meeting by the majority votes of 5,566,729,612 (five billion five hundred and sixty six million seven hundred and twenty nine thousand six hundred and twelve) shares or at 93.82% (ninety three point eighty two percent) of total votes cast at the Meeting, decides:----------

1. **To agree on amendment to the Articles of Association of the Company, among others, in order to adjust with any laws and regulations and policies, including the Law Number 16 of 2025 (two thousand twenty five) regarding the Fourth Amendment to the Law Number 19 of 2003 (two thousand three) regarding State-Owned Enterprise including to agree on the alteration of Article 5 of the Articles of Association of the Company**

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

regarding the adjustment of any privileges over Series-A *Dwiwarna* Shares owned by the Republic of Indonesia;-------

-which has been approved by more than 3/4 (three fourths) of impacted voting share classification being present at the Meeting, in this case, 100% (one hundred percent) of Series-A *Dwiwarna*, pursuant to Article 45 of POJK 15/2020:----------

2. **To agree to re-arrange all provisions of the Articles of Association of the Company in a complete codification in relation to amendment as referred to in point 1 hereof.----------**

3. **To empower and authorize with substitution rights the Board of Directors of the Company to take any actions required relevant to decision on the Meeting agenda, including to prepare and restate all of the Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and empower with substitution right to convey to appropriate agency to obtain the receipt of notification and approval for amendment to the Articles of Association of the Company, do anything deemed necessary and useful for such needs without any exception, including to make addendum and / or amendment to the Articles of Association, if required by appropriate agency.----------**

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Subsequently, the appearing person acting in his capacity as mentioned above hereby states that he intends to re-arrange the provisions of the Articles of Association of the Company, so that the Articles of Association of the Company shall be written and read as follows:----------

----------**NAME AND DOMICILE**----------

----------**ARTICLE 1**----------

1. This Limited Liability Company shall bear the name **"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk"** or abbreviated to **"PT TIMAH (PERSERO) Tbk"** hereinafter in these Articles of Association simply called **"the Company"**, domiciled and having it head office in Pangkal Pinang, Bangka Belitung.----------
2. The Company may open branch office and / or representative office elsewhere, either inside or outside the territory of the Republic of Indonesia but shall be first approved by the Board of Commissioner in case of Branch office or Representative office outside the Territory of the Republic of Indonesia.-------

----------**TERM OF COMPANY INCORPORATION**----------

----------**ARTICLE 2**----------

This Company was founded as of 2-8-1976 (the second day of August one thousand nine hundred and seventy six) and obtained legal entity status as of 5-2-1977 (the fifth day of February one thousand nine hundred and

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

seventy seven) and shall be incorporated for indefinite term.----------

---------**PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES**---------

----------**ARTICLE 3**----------

1. Purposes and objectives of the Company shall be to manage business in the fields of mining, industry, trade, transportation, and service relevant to the mining and the optimization of use of resources owned by the Company to produce goods and / or services with high quality and strong competitiveness, to obtain / pursue profit in order to increase the Company value by applying the principles of the Limited Liability Company.----------
2. To achieve the aforesaid purposes and objectives, the Company may conduct main business activities as follows:----------
   a. Tin Ore Mining;----------
   b. Other Mineral Mining not Containing Iron Ore;---------
   c. Other Mining and Excavation Excluded from Others;-----
   d. Precious Basic Metal Manufacture Industry;----------
   e. Non-Ferrous Basic Metal Manufacture Industry;---------
   f. Non-Ferrous Metal Milling Industry; and----------
   g. Metal and Metal Ore Wholesale Trade.----------
3. Other than main business activities as referred to in paragraph 2 hereof, the Company may conduct business

FIKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

activities in order to optimize the use of owned resources for:----------

a. Uranium and Thorium Ore Mining;----------

b. Uranium and Uranium Ore Processing;----------

c. Gold and Silver Mining;----------

d. Other Precious Metal Ore Mining;----------

e. Quartz / Quartz Sand Quarrying;----------

f. Other Mining and Quarrying Support Activities;------

g. Dredging;----------

h. Land Preparation;----------

i. Engineering and Technical Consultation Activities Excluded from Others;----------

j. Head Office Activity;----------

k. Holding Company Activity;----------

l. Other Management Consultation Activities;----------

m. Laboratory Examination Service;----------

n. Other Technical Analysis and Test;----------

o. Non-Fishery Port Building Construction;----------

p. Other Civil Building Construction Excluded from Others;----------

q. Lodging Building Construction;----------

r. Self-Owned or Rented Real Estate;----------

s. Motorized Transportation for Special Goods;---------

t. Domestic Sea Transportation for Special Goods;------

u. Overseas Sea Transportation for Special Goods;------

v. Seaport Service Activity;----------

FIKRI SAID O
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

w. River and Lake Port Service Activities;----------

x. Other Water Transportation Support Activity;--------

y. Multimode Transportation;--------------------------

z. Other Transportation Support Activity Excluded from Others;----------

aa. Rental and Lease Activities without Machinery Option Right and Processing Industry Equipments;----

bb. Rental and Lease Activities without Machinery Option Right and Processing Industry Equipments;----

cc. Rental and Lease Activities without Machinery, Equipment and Other Tangible Goods Option Rights, Excluded from Others;----------

dd. Machinery, Mining, Excavation and Construction Industries;----------

ee. Machinery Repairs for Special Purposes;----------

ff. Industrial Estate;----------

gg. Warehousing and Storage;----------

hh. Other Warehousing and Storage;----------

ii. Hazardous Waste Collection;----------

jj. Hazardous Treatment and Disposal;----------

kk. Privately Managed Museum;----------

ll. Natural Tourism Park;----------

mm. Natural Adventure Tourism;----------

nn. Other Natural Tourist Attractions;----------

oo. Artificial / Man-Made Tourist Attractions;----------

pp. Recreation Park;----------

FIKRI SAID SAED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

qq. Conservation Park outside Natural Habitat (Ex-Situ);-

rr. Agro-Tourism;

ss. Forest Area Use Service outside Forestry Sector;

tt. Other Short-Term Accommodation Provision;

uu. Deer Nursery and Cultivation;

vv. Mammal Captivity;

ww. Laying Hen Cultivation;

xx. Beef Cattle Nursery and Cultivation;

yy. Other Poultry Nursery and Cultivation;

zz. Horticultural Farming on Leafy Vegetables;

aaa. Horticultural Farming on Fruits;

bbb. Horticultural Farming on Fruity Vegetables;

ccc. Tropical and Subtropical Fruit Farming;

ddd. Freshwater Fish Farming in Ponds;

eee. Reptile Captivity;

fff. Captivity of Other Wild Plants/Animals;

ggg. Wood, Bamboo, Rattan, *Pandan*, Grass-Based Craft Item Retail Trade and their Kinds;

hhh. Leather, Horn, Ivory, Fur and Preserved Animal-Based Craft Item Retail Trade;

iii. Metal-Based Craft Item Retail Trade;

jjj. Ceramic-Based Craft Item Retail Trade;

kkk. Painting Retail Trade;

lll. Other Craft Item and Painting Retail Trade;

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

mmm. Coffee, Granulated Sugar and Brown Sugar Retail Trade;----------

nnn. Processed Meat and Fish Retail Trade;----------

ooo. Other Food Retail Grade;----------

ppp. Textile Retail Trade;----------

qqq. Textile-Based Household Equipment Retail Trade;-----

rrr. Various Goods Retail Trade, particularly Foods, Drinks or Tobaccos sold at Minimarket / Supermarket / Hypermarket;----------

sss. Various Goods Retail Trade, particularly Foods, Drinks or Tobaccos not sold at Minimarket / Supermarket / Hypermarket (sold at Traditional Market);----------

ttt. Various Goods Retail Trade excluding Foods, Drinks or Tobaccos sold at Department Store;----------

uuu. Restaurant;----------

vvv. Pub / Cafe;----------

www. Potash (Potassium Carbonate) Mining;----------

xxx. Mineral, Chemical and Other Fertilizer Ingredient Mining;----------

yyy. Iron Sand Mining;----------

zzz. Iron Ore Mining;----------

aaaa. Hazardous Waste Water Treatment and Disposal;-------

bbbb. Secondhand and Scrap Wholesale Trade;----------

cccc. Information Technology Activity and Other Computer Services;----------

FERRI SAID ORED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

dddd. Special Telecommunication Activity for Private Needs;----------

eeee. Telecommunication Civil Building Construction for Transportation Infrastructure;----------

ffff. Telecommunication Installation;----------

gggg. Field Facilities;----------

hhhh. Other Building Construction; and----------

iiii. Rental of Venue for Organization of MICE Activity and Special Event.----------

----------**CAPITAL**----------

----------**ARTICLE 4**----------

1. The Company's authorized capital shall amount to Rp 500,000,000,000.00 (five hundred billion Rupiah) divided into 10,000,000,000 (ten billion) shares comprised of:----------

   a. 1 (one) series-A *Dwiwarna* share; and----------

   b. 9,999,999,999 (nine billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety nine thousand nine hundred and ninety nine) Series-B shares;----------

   in a nominal value of Rp 50.00 (fifty Rupiah) per share.----------

2. From the authorized capital have been issued and subscribed for and paid up about 74.47% (seventy four point forty seven percent) or amounting to 7,447,753,454 (seven billion four hundred and forty seven million

FIKRI JAYA SWORN TRANSLATOR PENERJEMAH TERSUMPAH B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

seven hundred and fifty three thousand four hundred and fifty four) shares, in a nominal value of Rp 50.00 (fifty Rupiah) per share, or in a total nominal value of Rp 372,387,672,700.00 (three hundred and seventy-two billion three hundred and eighty-seven million six hundred and seventy-two thousand seven hundred Rupiah) comprised of:----------

a. 1 (one) series-A *Dwiwarna* share or in a nominal value of Rp 50.00 (fifty Rupiah); and----------

b. 7,447,753,453 (seven billion four hundred and forty-seven million seven hundred and fifty-three thousand four hundred and fifty-three) series-B shares, in a nominal value of Rp 372,387,672,650.00 (three hundred seventy-two billion three hundred and eighty-seven million six hundred and seventy-two thousand six hundred and fifty Rupiah).----------

3. 100% (one hundred percent) of nominal value of each share issued as mentioned above, or amounting to Rp 372,387,672,700.00 (three hundred and seventy-two billion three hundred and eighty-seven million six hundred and seventy-two thousand seven hundred Rupiah) have been subscribed for and paid up fully by each shareholder of the Company.----------

4. In due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, including those in the field of Capital Market, share participation may be done

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

in the form of money or in any other forms. Share participation in the other forms other than money, either in the form of tangible objects or intangible objects, must fulfill the following provisions:----------

a. object to serve as capital participation must be announced to the public at the time of summons for General Meeting of Shareholders (hereinafter the General Meeting of Shareholders shall be called "**the GMS**") to discuss the participation;-------

b. object serving as capital participation must be appraised by Appraiser registered with *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) / the Financial Service Authority (hereinafter referred to as "**OJK**") and shall not be pledged in any manner;----------

c. shall obtain approval from the GMS with quorum as set forth in Article 26 paragraph 5 in conjunction with Article 29 paragraph 2 hereof;----------

d. In the event the object serving as capital participation is provided in the form of shares of a Limited Liability Company which perform Public Offering or of a Public Company registered with the Stock Exchange, then its price must be determined on the basis of reasonable market value;----------

e. In the event the participation originates from retained earnings, stock premium, Company's net



profit, and / or equity, then the retained earnings, stock premium, Company's net profit, and / or other equity shall have been included in the last Annual Financial Statement that has been audited by Accountant registered with OJK under unqualified opinion;----------

f. In the event the Company adds capital without granting Preemptive Rights to Order Securities (hereinafter abbreviated to "**HMETD**"), it must obtain approval from the GMS; and----------

g. In the event share participation is in the form of rights to collect to the Company compensated as share participation, the rights to collect must have been included in the Company's last financial statement that has been audited by Accountant.----------

5. Shares in portfolio will be issued by the Board of Directors according to the Company's capital needs at time, in a manner and at price and under requirements determined by the Board of Directors' Meeting upon approval of the GMS, in due observance of any provisions of the Articles of Association, and laws and regulations, and provisions applicable in the field of Capital Market in Indonesia, provided that such issuance shall not be at price under par value.----------

FIKRI SAID ... PENERJEMAH TERSUMPAH ... B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

6. Any capital addition through the issuance of Equity Securities (Equity Securities are any Securities that may be exchanged with shares or any Securities that include rights to acquire shares from the Company as issuer), shall be made under the following provisions:-

a. Any capital addition through the issuance of Equity Securities done with order must be made by granting HMETD to shareholders whose names are registered in the register of the Company shareholders on date specified by the GMS which approves the issuance of Equity Securities in quantity comparable to the quantity of shares registered in the register of the Company shareholders in the name of the respective shareholders on that date, and the Company must announce information on capital addition plan by granting HMETD to the shareholders in due observance of any provisions in the field of Capital Market.----------

b. Without prejudice to the enforceability of provisions applicable in the field of Capital Market, the issuance of Equity Securities without granting HMETD to shareholders may be done in the event the issuance of shares:----------

b.1. is addressed to the Company employee;----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b.2. is addressed to the holders of bond or any other Securities convertible into shares issued upon approval of the GMS;----------

b.3. is made for the purpose of reorganization and / or restructuring approved by the GMS;-----

b.4. is addressed specially to the Republic of Indonesia as the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share;----------

b.5. is for the purpose of financial position improvement;----------

b.6. is for the purpose of other than financial position improvement; and / or----------

b.7. is for the purpose of the issuance of bonus shares being a Share Dividend as the result of Retained Earnings converted into capital and / or not being a Share Dividend as the result of stock premium or other equities converted into capital.----------

c. HMETD may be transferred and traded within a period set forth in any laws and regulations and any provisions applicable in the field of Capital Market in Indonesia.----------

d. Equity securities to be issued by the Company but not subscribed for by the holders of HMETD must be allocated to all shareholders who order additional equity securities, provided that if the

FIKRI SAID OBED
ENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

quantity of the equity securities which is ordered exceeds that to be issued, the equity securities not subscribed for must be allocated proportionally to the quantity of HMETD to be exercised by each shareholder who orders the additional equity securities.----------

e. In the event there are still any remaining equity securities not subscribed for by shareholders as referred to in paragraph 6 d) hereof, then in case of any standby buyer, the equity securities must be allocated to certain Party acting as standby buyer under same price and conditions.--------

f. Issuance of shares in portfolio to the holder of Securities that may be exchanged with shares or any Securities that include rights to acquire shares, may be executed by the Board of Directors on the basis of the previous GMS of the Company that has approved the issuance of the Securities.-----

g. Addition of paid-up capital shall take effect after such payment, and any issued shares shall have the same rights as shares having the same classification issued by the Company, without prejudice to the Company obligations to arrange notification to Minister (Minister is a Minister whose duties and responsibilities are in the field of law or his / her substitute).----------

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

7. Addition of the Company's authorized capital may be executed only on the basis of the resolutions of the GMS. Amendment to the Articles of Association for the purpose of the change of the authorized capital must be approved by Minister, provided that:------

a. Addition of the authorized capital making the issued capital and the paid-up capital less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital, can be done insofar as:----------

a.1. has obtained approval from the GMS to add the authorized capital;----------

a.2. has obtained approval from the Minister;--------

a.3. Addition of issued and paid-up capital to at least 25% (twenty five percent) must be executed within no later than 6 (six) months after the Minister approval;----------

a.4. In the event the addition of the paid-up capital as referred to in Article 4 paragraph 7 a.3) hereof fails to be fulfilled completely, then the Company must re-amend its Articles of Association, so that the authorized capital and the paid-up capital fulfill the provisions of Limited Liability Company Law, within 2 (two) months after the term as referred to in Article 4 paragraph 7 a.3) hereof not fulfilled;----------

FIKRI SAID OAED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a.5. Approval of the GMS as referred to in Article 4 paragraph 7 a.1) hereof shall include approval to amend these Articles of Association as referred to in Article 4 paragraph 7 b) hereof.----------

b. Amendment to the Articles of Association for the purpose of addition of the authorized capital shall take effect after capital participation making the amount of the paid-up capital at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and shall have the same rights as other shares issued by the Company in view of the provisions of these Articles of Association, without prejudice to the Company obligations to arrange approval for the amendment to the articles of association from Minister upon the execution of the paid-up capital increase.----------

8. Any addition of capital through the issuance of Equity Securities will deviate from the provisions mentioned above, if the laws and regulations, particularly any laws and regulations in the field of Capital Market, and the regulation of the Stock Exchange at places where the Company shares are registered determines otherwise.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

9. GMS as referred to in this article must be attended by Series-A *Dwiwarna* share and the resolutions of the GMS must be approved by Series-A *Dwiwarna share*.------

----------**SHARES**----------

----------**ARTICLE 5**----------

1. The Company shares shall be the registered shares and issued in the name of their owner registered in the Register of Shareholders comprised of:----------
   a. Series-A *Dwiwarna* share that may be owned specially by the Republic of Indonesia only; and----------
   b. Series-B shares that may be owned by BPI Danantara / Holding Operasional / BUMN (State-Owned Enterprise) and / or the Public.----------
2. In these Articles of Association, the meaning of "shares" shall be Series-A *Dwiwarna* share and Series-B shares, and the meaning of "shareholders" shall be the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and the Holder of Series-B Shares, unless expressly stated otherwise.----
3. The Company shall only acknowledge a person or a legal entity as a party authorized to exercise any rights granted by law over share.----------
4. a. Insofar as the Articles of Association doesn't specify otherwise, then the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share, the Holder of Series-B Shares shall have the same rights and 1 (one) share shall grant 1 (one) voting right.----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. Pursuant to these Articles of Association, Series-A *Dwiwarna* share shall be a share specially owned by the Republic of Indonesia that grants its holder any privileges as the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share.----------

c. Rights of the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share shall be:----------

c.1. any Rights to agree in the GMS, on:----------

c.1.1 approval for amendment to the Articles of Association;----------

c.1.2 approval for the change of capital;------

c.1.3 appointment and discharge of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners upon approval of the President;----------

c.1.4 approval relevant to merger, amalgamation, takeover, separation and dissolution of the Company;----------

c.1.5 approval for the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;----------

c.1.6 approval for the use of profit;----------

c.2. any Rights to nominate the member of the Board of Directors and the member of the Board of Commissioners;----------

c.3. any Rights to propose the agenda of the GMS;----

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. inggris - B. inggris ke B. Indonesia

c.4. any Rights to request and access any data and documents of the Company;----------

under the mechanism of use of the rights pursuant to the provisions of the Articles of Association and the laws and regulations.----------

d. Except for any privileges as referred to in paragraph 4 c) hereof, and in any other part of these Articles of Association, the holder of Series-B Shares shall have the same rights in due observance of Article 26 hereof.----------

5. If a share is transferred due to inheritance or by any other reason becomes the property of more than 1 (one) person, then those owning collectively shall be obliged to appoint a person among them, and that appointed will be recorded as their collective representative in the Register of Shareholders, entitled to use any rights granted by law to the share.----------

6. In the event such collective owners fail to notify the Company in writing of the appointment of the collective representative, the Company shall treat any shareholder(s) whose name(s) registered in the Register of the Company Shareholders as the only valid shareholder(s).----------

7. Any shareholder shall, pursuant to law, be subject to the Articles of Association of the Company and

FIKRI SAID ... PENERJEMAH TERSUMPAH B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

any resolutions adopted lawfully in the GMS and any laws and regulations.----------

8. Any laws and regulations in the field of Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company shares are registered shall be applicable to all of the Company shares registered with the Stock Exchange.----------

----------**SHARE CERTIFICATE**----------

----------**ARTICLE 6**----------

1. Proof of Ownership of Shares shall be as follows:---------
   a. In the event the Company Shares are not included in Collective Custody of the Settlement and Safekeeping Agency then the Company must provide the proof of ownership of shares in the form of share certificate or collective share certificate to the shareholder, in due observance of capital market rules;----------
   b. In the event the Company Shares are included in Collective Custody of the Settlement and Safekeeping Agency then the Company must issue certificate or written confirmation to the Settlement and Safekeeping Agency as a proof of registration in the register of shareholders of the Company.----------
2. The Company shall issue share certificate in the name of its owner registered in the Register of

FIKRI SAID ABAD
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Shareholders of the Company, pursuant to laws and regulations regarding Capital Market and regulation applicable in the Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

3. The Company may issue a collective share certificate that proves the ownership of 2 (two) or more shares owned by a Shareholder.----------

4. Share certificate must at least state:----------
   a. name and address of Shareholder;----------
   b. share certificate serial number;----------
   c. date of issuance of the share certificate; and--------
   d. nominal value of share.----------

5. Collective share certificate must at least state:---------
   a. name and address of shareholder;----------
   b. collective share certificate serial number;----------
   c. date of issuance of the collective share certificate;-
   d. nominal value of share and collective share; and------
   e. number of share and respective share certificate serial numbers.----------

6. Each share certificate and / or collective share certificate and / or converted bond and / or warrant and / or any other securities which may be converted into shares must contain signatures from President Director together with President Commissioner, or in case of unavailability of the President Commissioner which case is not necessary to be proved to any

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

third party, then by President Director together with one member of the Board of Commissioners, or in case of unavailability of the President Director and the President Commissioner which case is not necessary to be proved to any third party, then by one member of the Board of Directors together with one member of the Board of Commissioners, and the signatures may be directly printed on the share certificate and/or collective share certificate and / or converted bond and / or warrant and / or other securities that may be converted into shares, in due observance of any laws and regulations regarding Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

7. In the event the Company doesn't issue share certificate, the ownership of shares may be proved by share ownership statement issued by the Company.----------

8. All share certificates and / or collective share certificates issued by the Company may be pledged as security by following the provisions of any laws and regulations regarding Capital Market and of the Limited Liability Company Law.----------

----------**DUPLICATE SHARE CERTIFICATE**----------

----------**ARTICLE 7**----------

1. In case of impairment of share certificate, the share certificate may be duplicated if:----------

FIKRI SAID CHED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

1) a party which submits written request for duplication of the share certificate is the owner of the share certificate;----------

2) the Company has received the impaired share certificate;----------

3) such impaired original share certificate must be returned and may be exchanged with new share certificate under same serial number as the original serial number.----------

2. The Company must destroy the impaired original share certificate after duplication of the share certificate.---

3. In the event share certificate is lost, duplication of the share certificate may be made if:----------

a. a party which submits request for the duplication of the share certificate is the owner of the share certificate;----------

b. the Company has received report document issued by the Police of the Republic of Indonesia on loss of the share certificate;----------

c. a party which submits request for the duplication of the share certificate provides guarantee deemed sufficient by the Board of Directors of the Company; and----------

d. plan for duplication of the lost share certificate has been announced in the Stock Exchange where the Company shares are recorded at least 14

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

(fourteen) days before the issuance of duplicate share certificate.----------

4. Upon issuance of the duplicate share certificate, then original share certificate shall be no longer valid for the Company.----------
5. Any expenses for issuance of the duplicate share certificate shall be borne by the Shareholder concerned.
6. The aforesaid provisions regarding the issuance of the duplicate share certificate shall be also applicable for issuance of duplicate collective share certificate or Equity Securities.----------

----------**COLLECTIVE CUSTODY**----------

----------**ARTICLE 8**----------

1. The following provisions shall apply to any shares put in Collective Custody:----------
   a. Shares put in Collective Custody of the Safekeeping and Settlement Agency must be recorded in the Register of Company Shareholders in the name of the Safekeeping and Settlement Agency.----------
   b. Shares put in Collective Custody of the Custodian Bank or the Securities Company recorded in the Securities Account of the Safekeeping and Settlement Agency shall be registered in the name of the Custodian Bank or the Securities Company in the interest of account holder in the Custodian Bank or the Securities Company;----------

FAHRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

c. If shares put in Collective Custody of the Custodian Bank constitute portions of the Securities Portfolio of Mutual Fund in the form of collective investment contract and are not included in Collective Custody of the Safekeeping and Settlement Agency, then the Company will record the shares in the Register of Company Shareholders in the name of the Custodian Bank in the interest of Investment Unit owner of the Mutual Fund in the form of such collective investment contract;----------

d. The Company must issue certificate or confirmation to the Safekeeping and Settlement Agency as referred to in a) hereof or to the Custodian Bank as referred to in c) hereof as the proof of recordation in the Register of Company Shareholders;--

e. The Company must transfer the title of any shares put in Collective Custody registered in the name of the Safekeeping and Settlement Agency or the Custodian Bank for any Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Register of Company Shareholders into the title of Party appointed by the Safekeeping and Settlement Agency or the Custodian Bank;----------

f. Request for transfer of the title shall be submitted by the Safekeeping and Settlement Agency or the Bank Custodian to the Company or the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Securities Administration Bureau appointed by the Company;----------

g. Safekeeping and Settlement Agency, Custodian Bank or Securities Company must issue confirmation to account holder as the proof of recordation in Securities Account;----------

h. In Collective Custody, any share of the same type and classification issued by the Company will be equivalent and exchangeable between one and the other;----------

i. The Company must reject the recordation of shares to Collective Custody if certificate of the shares is lost or destroyed except that a Party which requests such transfer of title can provide sufficient proof and or guarantee that the Party is a true shareholder and the certificate is truly lost or destroyed;----------

j. The Company must reject the recordation of shares to Collective Custody if the shares are pledged as security, put in confiscation by virtue of court judgment or seized for the purpose of criminal investigation;----------

k. Holder of Securities Account which Securities are recorded in Collective Custody shall be entitled to be present and/or cast a vote in the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

GSM in proportion to his / her total shareholding in the Account.----------

l. Custodian Bank and Securities Company must convey Securities Account List along with the number of the Company shares owned by each holder of account in the Custodian Bank and the Securities Company to the Safekeeping and Settlement Agency for further submission to the Company within no later than 1 (one) working day before Summons for the GMS.----------

m. Investment Manager shall be entitled to be present and cast a vote in the GMS for the Company shares included in Collective Custody of the Custodian Bank constituting a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in Collective Custody of the Safekeeping and Settlement Agency, provided that the Custodian Bank must inform on the name of Investment Manager within no later than 1 (one) working day before summons for the GMS.----------

n. The Company must deliver dividend, bonus shares, or any other rights in relation to shareholding to the Safekeeping and Settlement Agency for any shares in Collective Custody of the Safekeeping and Settlement Agency and the Safekeeping and

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Settlement Agency shall further deliver the dividend, bonus shares or the other rights to the Custodian Bank and the Securities Company in the respective interests of the holder of account in the Custodian Bank and the Securities Company.----------

o. The Company must deliver dividend, bonus shares, or any other rights in relation to shareholding to the Custodian Bank for any shares in Collective Custody of the Custodian Bank constituting a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in Collective Custody of the Safekeeping and Settlement Agency.----------

p. Time frame to determine the holder of Securities Account entitled to obtain dividend, bonus shares or any other rights in relation to shareholding in Collective Custody shall be determined by the GMS provided that Custodian Bank and Securities Company must convey Securities Account holder list along with the number of the Company shares owned by each holder of the Securities Account to the Safekeeping and Settlement Agency at the latest on date serving as the basis of decision which shareholder is entitled to obtain dividend, bonus shares or any other rights for

FIKRI SAID OSMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

further submission to the Company within no later than 1 (one) working day after the date serving as the basis of decision which shareholder is entitled to obtain the dividend, bonus shares or the other rights.----------

2. Provisions with respect to Collective Custody shall be subject to laws and regulations in the field of Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

--------**REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER**---------

----------**ARTICLE 9**----------

1. Board of Directors shall maintain and keep the Register of Shareholders and Special Register and shall be made them available at the Company domicile.----------
2. Register of Shareholders shall at least contain:----------
   a. name and address of shareholders;----------
   b. number, serial number and date of shares acquired by shareholders;----------
   c. amount paid up for each share;----------
   d. name and address of individual person or legal entity having lien over shares or being the fiduciary guarantee recipient of shares and the date of lien acquisition or the date of registration of the fiduciary guarantee;----------
   e. statement of share payment in any form other than money; and----------

FIKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

f. any other statement deemed necessary by the Board of Directors.----------

3. Special Register shall contain the statement of shareholding and / or information on the change of shareholding by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners along with their family in the Company and / or in any other company and the date of share acquisition.----------

4. Shareholder must notify the Board of Directors of any move of residential address by letter with receipt. Insofar as such notification has not yet been made then any summonses and notifications to the shareholder shall be valid if sent to the residential address of the shareholder last recorded in the Register of Shareholders.----------

5. Board of Directors shall be obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and Special Register as properly as possible.----------

6. Each Shareholder shall be entitled to have access to the Register of Shareholders and Special Register at the Company Office or at Securities Administration Bureau Office appointed by the Company, within working hours.----------

7. The Company's Board of Directors may appoint and authorize the Securities Administration Bureaus to make

FIKRI SAID CHEED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

share recordation in the Register of Shareholders and Special Register.----------

8. Any registration or recordation in the Register of Shareholders including the recordation of sale, transfer, collateralization, pledge or fiduciary security, relevant to the Company shares or rights or interests over the shares must be conducted pursuant to these Articles of Association and any laws and regulations, and rules applicable in the field of Capital Market in Indonesia.----------

9. Any provisions of this article shall be valid insofar as not specified otherwise in any laws and regulations, and rules applicable in the field of Capital Market in Indonesia and the rules of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

10. In the event sale, transfer, collateralization in the form of pledge, fiduciary guarantee, or those relevant to the Company shares or *cessie* related to rights or interests over shares occur, then any party concerned shall make written report to the Board of Directors or a party appointed by the Board of Directors for recordation and registration in the Register of Shareholders pursuant to these Articles of Association in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market and the

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

rules of Stock Exchange in Indonesia where the Company shares are recorded.----------

----------**TRANSFER OF RIGHTS OVER SHARES**----------

----------**ARTICLE 10**----------

1. In the event the ownership of a share changes, original owner registered in the Register of Shareholders shall be deemed to be consistently the owner of the share until new owner has been recorded in the Register of Shareholders, in due observance of the provisions of any laws and regulations in the field of Capital Market and the rules of Stock Exchange where the Company shares are registered.----------

2 a. Unless determined otherwise in any laws and regulations, and any rules applicable in the field of Capital Market and the Articles of Association of the Company, the transfer of rights over shares must be proved with a document signed by or on behalf of Transferor, and by or on behalf of Transferee with respect to shares. Document of transfer of rights over shares must be in a format determined or approved by the Board of Directors.----------

b. Transfer of Rights over shares included in Collective Custody shall be carried out by book transfer from one Securities Account to any other Securities Account with the Safekeeping and Settlement Agency,

FIKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Custodian Bank and Securities Company. Document of transfer of rights over shares must be in a format as determined by and / or acceptable to the Board of Directors, provided that the document of transfer of rights over shares registered with the Stock Exchange must fulfill any rules applicable in the Stock Exchange where the shares are recorded, without prejudice to any laws and regulations and provisions applicable in place where the Company shares are recorded.----------

3. Board of Directors may reject, by providing reason therefor, registration of the transfer of rights over shares in the Register of the Company Shareholders, if any procedures specified in the provisions of the Articles of Association are not fulfilled or if any of requirements for permit granted to the Company or any other matters required by the Authority are not fulfilled.----------

4. If the Board of Directors rejects the registration of transfer of rights over shares, then the Board of Directors must submit notification on rejection to a party intending to transfer its rights within no later than 30 (thirty) days after request for the registration has been received by the Board of Directors, in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market and any

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

rules of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

5. With respect to the Company shares recorded with the Stock Exchange where the Company shares are recorded, any rejection for recordation of transfer of rights must comply with the regulations of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

6. Any person who obtains rights over shares because of the death of a shareholder or due to any reason resulting in the transfer of ownership of share under the law, may submit any proofs of his / her rights as required by the Board of Directors, by submitting written request for registration as the holder of the shares. Registration may be made only if the Board of Directors well accepts on the basis of proofs of the rights and without prejudice to the provisions of the Articles of Association.----------

7. Any restrictions, prohibitions and provisions set forth in these Articles of Association which specify rights to transfer any rights over shares and registration for transfer of rights over the shares must be applicable to any transfer of rights pursuant to paragraph 6 hereof.----------

8 Any shareholders as referred to in Article 21 paragraph 6 a) points i and ii hereof shall not transfer their shareholding at least within 6 (six) months from

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH

the GMS announcement by the Board of Directors or the Board of Commissioners or as of decision by the Head of District Court.----------

9. Form and procedures of the transfer of rights over shares traded in the Stock Exchange must fulfill any laws and regulations in the field of Capital Market and any rules of Stock Exchange, except for any rights over Series-A *Dwiwarna* Shares that can not be transferred to any person.----------

----------**BOARD OF DIRECTORS**----------

----------**ARTICLE 11**----------

1. The Company shall be managed and led by the Board of Directors in the number of members adjusted to the Company's needs, at least consisting of 2 (two) persons who one of them is appointed as President Director, and if required, another one may be appointed as Vice President Director.----------

2. Requirements of the members of the Board of Directors must follow the provisions of:----------

   a. the State-Owned Enterprise Law;----------

   b. the Limited Liability Company Law;----------

   c. any laws and regulations in the field of Capital Market; and----------

   d. any laws and regulations applicable to the Company related to the Company business activities.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

3. Ones who may be appointed as members of the Board of Directors shall be any individual persons who fulfill any requirements pursuant to provisions.----------

4. Requirements as referred to in paragraph 3 hereof shall include any requirement as set forth in Article 15A paragraph (3) of the State-Owned Enterprise Law.------

5. Fulfillment of any requirements as referred to in paragraph 2 and paragraph 3 hereof must be included in written statement signed by candidates for the members of the Board of Directors and the written statement shall be submitted to the Company. The written statement must be examined and documented by the Company.----------

6. Members of the Board of Directors shall be appointed and discharged by the GMS attended by the holder of Series-A *Dwiwarna* Share and the resolutions of the meeting must be approved by the holder of Series-A *Dwiwarna* Share in due observance of any provisions of these Articles of Association. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the Holder of Series-A *Dwiwarna* which nomination shall be binding to the GMS. Such provision shall apply also to the GMS held for the purpose of cancellation or affirmation of decision on suspension of the members of the Board of Directors.----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH

7. Resolutions of the GMS regarding the appointment and discharge of the members of the Board of Directors shall also determine when the appointment and the discharge take effect. In the event the GMS fails to determine the same, then the appointment and the discharge of the members of the Board of Directors shall take effect from the closing of the GMS.----------

8. a. The members of the Board of Directors shall be appointed for a term commencing from the closing of the GMS, or a date determined by the GMS for their appointment and shall end maximally until the closing of 5th (the fifth) Annual GMS after their appointment, but without prejudice to the rights of the GMS to anytime discharge the members of the Board of Directors before expiration of their term of office.----------

   b. Such discharge shall take effect from the closing of the GMS, unless determined otherwise by the GMS.----------

   c. Members of the Board of Directors of the Company whose term of office expire may be re-appointed by the GMS with the longest accumulated term of office until the closing of 10th (the tenth) Annual GMS.----------

9. GMS may discharge the members of the Board of Directors anytime by stating any reasons thereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

10. Discharge of the members of the Board of Directors as referred to in paragraph 9 hereof shall be executed if based on reality the members of the Board of Directors concerned:----------

a. fail to fulfill their obligations that have been agreed upon under management contract;----------

b. fail to well perform their duties;----------

c. fail to comply with the provisions of any laws and regulations and / or those of the Articles of Association;----------

d. are involved in any action that harms the Company;----

e. commit action that infringes ethics and / or propriety;----------

f. have been decided as suspect and / or the accused by law enforcement officer in any action that harms the State-Owned Enterprise.----------

g. are declared guilty by virtue of Court judgment that has a permanent force of law;----------

h. resign; or----------

i. Any other reasons deemed correct by the GMS in the interest and for the benefit of the Company.------

11. Decision of discharge as referred to in paragraph 10 hereof shall be made after the persons concerned are given the opportunity to defend themselves, except paragraph 10 f), g) and h) hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

12. Discharge for reasons as referred to in paragraph 10 d) and g) hereof shall constitute dishonorable discharge.----------

13. In the event there is a condition that a member of the Board of Directors has family relationship, either related by blood or related by marriage within straight line and / or line to the side until the second generation, to the other members of the Board of Directors and / or to the members the Board of Commissioners of the Company, then the GMS shall have powers to discharge one of them.----------

14. Members of the Board of Directors may be given salary along with any other facilities and / or allowances including pension compensation in amount determined by the GMS which authority may be delegated to the Board of Commissioners.----------

15. If at any time due to any reasons, one or more positions of the members of the Board of Directors are vacant:----------

    a. The Board of Commissioners shall appoint any other member(s) of the Board of Directors to perform the works of vacant position(s) of the member(s) of the Board of Directors with same powers and authorities.----------

    b. In due observance of any applicable laws and regulations, the GMS must be held to fill the

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

vacant position(s) where the Board of Directors becomes less than 2 (two) members who one of them is President Director or the vacant position is President Director or any other director required by applicable rule.----------

c. GMS as referred to in b) hereof shall be held within no later than 90 (ninety) calendar days from the vacancy of the position as referred to in b) hereof.----------

16. a. If at any time due to any reasons all positions of the members of the Board of Directors are vacant, then within no later than 90 (ninety) calendar days after such vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy of the positions of the Board of Directors.----------

b. As long as the positions are vacant and the GMS has not yet filled the vacant positions of the Board of Directors as referred to in a) hereof, the Company shall be temporarily managed by the Board of Commissioners, with same powers and authorities.----------

17. a. A member of the Board of Directors may resign from his / her position before expiration of his / her term of office. In the event there is any member of the Board of Directors who resigns then the member of the Board of Directors concerned must

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

submit request for resignation in writing to the Company.----------

b. The Company must hold a GMS to decide the request for resignation of the member of the Board of Directors within no later than 90 (ninety) calendar days after receipt of the request for resignation.----

c. The Company must open information to the public and convey any information to OJK (the Financial Service Authority) within no later than 2 (two) working days after:----------

   i. receipt of the request for resignation of the member of the Board of Directors as referred to in a) hereof; and----------

   ii. having the results of the GMS as referred to in b) hereof.----------

d. Before the effect of resignation, the member of the Board of Directors concerned shall be obliged to consistently execute his / her duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association and any laws and regulations.----------

e. A member of the Board of Directors who resigns will be acquitted from responsibilities only after obtaining the discharge and acquittal from the Annual GMS.----------

18. A member of the Board of Directors shall be prohibited from holding double position as:----------

FIKRI SAID ... PENERJEMAH TERSUMPAH ... B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or Supervisory Board of any other State-Owned Enterprise, the Subsidiary of the State-Owned Enterprise and its derivative, Region-Owned Enterprise or Private Enterprise;----------

b. structural or functional officer of central and / or regional government agency / institution;----------

c. political party administrator and / or the candidate / member of legislative body and/or the candidate of Regional Head / Deputy Regional Head, and / or Regional Head / Deputy Regional Head;----------

d. any other position which may cause the conflict of interest; and / or----------

e. any other position pursuant to the provisions of laws and regulations.----------

19. In the event a person holds a position prohibited from being held concurrently with a position of the member of the Board of Directors of the Company as referred to in paragraph 18 hereof, then the person concerned must resign from the position within no later than 30 (thirty) working days from his / her holding of such double position in the Company, unless pursuant to any laws and regulations, the position as the member of the Board of Directors ends by law upon appointment of the person concerned in new position so prohibited.----------

FIKRI SAID OSMAD
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

20. A member of the Board of Directors not resigning from his / her position as referred to in paragraph 19 hereof, then the member of the Board of Directors concerned shall be considered to have submitted request for such resignation after the elapse of 30 (thirty) working days as referred to in paragraph 19 hereof.----------

21. In case of double position of the member of the Board of Directors excluded from the provision of paragraph 18 hereof, approval from the Board of Commissioners' Meeting shall be required, unless specified otherwise pursuant to any applicable laws and regulations, particularly provisions in the field of Capital Market.----------

22. Position of a member of the Board of Directors shall end in case of:----------

    a. death or permanent impediment;----------

    b. expiration of his / her term of office;----------

    c. discharge before expiration of his / her term of office due to no longer fulfilling any requirements as a member of the Board of Directors of the Company as referred to in paragraph 3 hereof;---------

    d. discharge by virtue of the resolutions of the GMS;----

    e. if his / her resignation has been effective, as referred to in paragraph 17 b) hereof;----------

FIKRI SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

23. Any member of the Board of Directors who ceases before or after the expiration of his / her term of office, except due to death, must convey accountability for his / her actions which accountability has not yet been accepted by the GMS.----------

24. Members of the Board of Directors may be anytime suspended by the Board of Commissioners if they act contrarily to these Articles of Association or there is any indication of committing an action that harms the Company or of neglecting their obligations or there is any urgent reason for the Company, in due observance of the following provisions:----------

    a. Such suspension must be notified in writing to the members of the Board of Directors concerned along with any reasons thereof with cc submitted to the Board of Directors.----------

    b. Notification as referred to in a) hereof shall be submitted within no later than 2 (two) calendar days after decision of the suspension.----------

    c. Such members of the Board of Directors who are suspended shall neither be authorized to conduct the management of the Company nor represent the Company according to the purposes and objectives of the Company inside or outside the court.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

d. Within no later than 90 (ninety) calendar days after the suspension, the Board of Commissioners must hold a GMS to cancel or affirm the suspension.---

e. Upon elapse of time frame of holding of the GMS as referred to in d) hereof or in failure of the GMS to make decision, then such suspension shall be null and void.----------

f. Limitation of authorities as referred to in c) hereof shall be valid as of the decision of the suspension by the Board of Commissioners until:-------

1) there is any resolution of GMS that affirms or cancels the suspension referred to in d) hereof; or----------

2) the elapse of time frame as referred to in d) hereof.----------

g. At the GMS as referred to in d) hereof, the members of the Board of Directors concerned shall be given the opportunity to defend themselves.----------

h. Suspension may not be extended or re-decided under same reason after the suspension has been declared null and void as referred to in e) hereof.---

i. If GMS cancels the suspension or situation as referred to in e) hereof occurs then the members of the Board of Directors concerned must perform again their duties properly.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

j. In the event GMS affirms the suspension then the members of the Board of Directors concerned shall be discharged permanently.----------

k. If the members of the Board of Directors so suspended are absent from the GMS after being summoned in writing, then the members of the Board of Directors so suspended shall be considered to have not exercised their rights to defend themselves in the GMS and shall have accepted the resolutions of the GMS.----------

l. The Company must open information to the public and shall notify OJK (the Financial Service Authority) of:----------

1) the decision on suspension; and----------

2) any results of the GMS to cancel or affirm the suspension as referred to in d) hereof, or information on the cancellation of the suspension by the Board of Commissioners due to failure to hold the GMS until the elapse of time frame as referred to in e) hereof, within no later than 2 (two) working days after occurrence thereof.----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

----------**DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE**----------

----------**BOARD OF DIRECTORS**----------

----------**ARTICLE 12**----------

1. Board of Directors shall have duties to take any actions related to, and shall be responsible for, the management of the Company in the interest of the Company according to the purposes and objectives of the Company and shall represent the Company either inside or outside the Court on any matters and any events with limitation as referred to in any laws and regulations, the Articles of Association and / or the Resolutions of the GMS.----------

2. In the performance of duties as referred to in paragraph (1) hereof, then:----------

   a. the Board of Directors shall have rights and authorities:----------

      1) to make policy on the management of the Company in due observance of applicable provisions;----------

      2) to make policy for the purpose of synergy of the Company with the Majority Holders of Series-B Shares guided by policy decided by the Majority Holders of Series-B Shares.-----

      3) to control the delegation of powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or

ZIKRI SAID OSED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

several persons specially appointed therefor, including the Company workers either individually or collectively and / or any other entity;----------

4) to stipulate any provisions regarding the Company workers including the decision of wage, pension or old age insurance, and any other income for the Company workers pursuant to laws and regulations;----------

5) to appoint and discharge the Company workers based on the Company manpower regulation, and any laws and regulations;----------

6) to appoint and discharge Corporate Secretary and / or Internal Control Unit Head, upon approval of the Board of Commissioners after first obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;----------

7) to write off Fixed Assets and / or other Assets of the Company pursuant to provisions set forth in these Articles of Association and subsequently reported to the Board of Commissioners to be further reported and accounted for in Annual Report;----------

8) Board of Directors as shareholder and / or majority shareholder in any subsidiary shall be authorized, among others:----------

FIKRI SAID SYED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a) to approve the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Long Term Plan (RJP) of subsidiary through the mechanism of the GMS after first obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;-----

b) to approve decision on limitation and / or certain criteria in relation to the action of the Board of Directors of the subsidiary proposed by the Board of Commissioners of the subsidiary pursuant to the Articles of Association of the subsidiary after first obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;----------

c) to approve the action of the Board of Directors of subsidiary that requires to obtain approval from the Company as shareholder and / or majority shareholder in the subsidiary based on limitation and / or criteria set forth in Article 12 paragraph 2 a) number 8 point b) hereof;-

d) to approve the appointment and discharge of the Corporate Secretary and the Internal Control Unit Head of the subsidiary after first obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;---------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH

e) to execute any other authorities to the subsidiary according to its capacity as shareholder of the subsidiary as set forth in the Articles of Association of the subsidiary;----------

9) To take any other actions and measures with respect to the management or ownership of the Company assets, bind the Company with any other party and / or the other party with the Company, and represent the Company inside and outside the court on any matters and any events, with limitation as set forth in any laws and regulation, the Articles of Association and / or the Resolutions of the GMS.----------

b. Board of Directors shall be obliged:----------

1) to make efforts to, and guarantee, the performance of business and activities of the Company according to the purposes and objectives of its business activities;----------

2) to prepare, in the right time, the Company's Long Term Plan, Annual Work Plan and Budget, and any other work plan, and their revision pursuant to applicable provisions;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

3) to produce the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GSM, and Minutes of the Board of Directors' Meeting;-----

4) to produce Annual Report that among others contains Financial Statement as a form of accountability in the management of the Company, and the Company's financial documents as referred to in Law regarding Company Document;----------

5) to prepare Financial Statement as referred to in 4) above on the basis of Financial Accounting Standard and submit it to Public Accountant for audit;----------

6) to submit Annual Report after review by the Board of Commissioners, within no later than 5 (five) months after the end of the Company's fiscal year, to the GMS for approval and validation;----------

7) to provide explanation to the GMS regarding Annual Report;----------

8) to submit Balance Sheet and Income Statement that has been validated by the GMS to Minister in charge of laws pursuant to the provisions of laws and regulations;----------

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

9) to submit report on the implementation of book write-off and collection write-off pursuant to laws and regulations;----------

10) to prepare any other reports required by the provisions of laws and regulations;---------

11) to maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Board of Directors' Meeting, the Company's Annual Report and financial documents as referred to in 4) and 5) above, and any other Company documents;----------

12) to store in the Company domicile: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Board of Directors' Meeting, the Company's Annual Report and financial documents, and any other documents of the Company;----------

13) to produce and maintain the Company bookkeeping and administration according to prevalence in a company;----------

14) to prepare accounting system according to Financial Accounting Standard and based on the principles of internal control, particularly

FIKRI SAID DKK
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the functions of management, recordation, storage, and supervision;----------

15) to provide periodic report according to method and time pursuant to applicable laws and regulations, and any other report at any time requested by the Board of Commissioners and / or the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and/or the Majority Holder of Series-B Shares, in due observance of any laws and regulations, and any rules applicable in Capital Market;----------

16) to prepare the composition of organization of the Company completely along with its detail and duties;----------

17) to provide explanation regarding any matters questioned or requested by the members of the Board of Commissioners, the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and the Majority Holder of Series-B Shares, in due observance of any laws and regulations, any rules applicable in Capital Market;----------

18) to perform any other obligations pursuant to provisions set forth in these Articles of Association and decided by the GMS;----------

FIKRI SAID OSED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

19) to prepare Charter / Guideline and Code of Conduct, of the Board of Directors' Works (BOD -Charter); and----------

20) To decide the policy of the Company management by consistently observing and being subject to strategic guideline / policy determined by the Majority Holder of Series-B Shares.------

3. In the performance of its duties, the Board of Directors must dedicate its energy, thought, attention and service fully on the duties, obligations and achievements of the Company objectives.----------

4. In the performance of their duties, the members of the Board of Directors must comply with these Articles of Association of the Company, and any laws and regulations, and must execute the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and reasonability.---------

5. In the performance of their duties, each member of the Board of Directors must, in good faith with full responsibility, conduct any duties in the interest of the Company business by considering any business risks and in due observance of the prevailing laws and regulations.----------

6. a. Any members of the Board of Directors shall be responsible individually and collectively for the Company loss arising from the mistake

FIKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH

or negligence of the members of the Board of Directors in performing their respective duties.----------

b. The members of the Board of Directors shall not be subject to responsibility for the Company loss as referred to in a) above, if they can prove that:----------

1) the loss is not caused by their mistake or negligence;----------

2) they have carried out management in good faith, with full responsibility, and prudence for the benefit of, and according to the purposes and objectives of, the Company;--

3) they have no conflict of interest, either directly or indirectly, with any actions of management that result in loss; and--------

4) they have taken any actions to prevent the emergence or continuance of the loss.-----

7. The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners:--

a. To write off the Company assets with certain value limitation determined by the Board of Commissioners in due observance of the provisions of any laws and regulations that govern the State-Owned Enterprise, as follows:----------

FIKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

1) Write-off due to the assignment / transfer of Fixed Assets of the Company;----------

2) Write-off due to the assignment / transfer of any other Assets of the Company;----------

3) Write-off of Fixed Assets and / or any other Assets of the Company, not because of assignment / transfer, including the write-off of uncollectible receivables;----------

b. To waive the rights to collect or not to collect any uncollectible principal receivables, interest receivables, fines, costs, and any other non-principal receivables, carried out for the purpose of restructuring and / or settlement of receivables and any other action for the purpose of settlement of the Company receivables, that have been written off, either in part or entirely, with certain value limitation determined by the Board of Commissioners, provided that the execution of collection write-off must first obtain approval from BPI Danantara pursuant to laws in the field of State-Owned Enterprise.----------

c. To collateralize the Company assets as a security under certain value limitation determined by the Board of Commissioners;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

d. To bind the Company as guarantor (*borg* or *avalist*) in certain value determined by the Board of Commissioners;----------

e. To receive medium / long-term loan and provide medium / long-term loan in certain value determined by the Board of Commissioners, in due observance of any provisions in the field of Capital Market;-----

f. To provide loan to subsidiary as referred to in any laws and regulations that govern State-Owned Enterprise under certain value limitation determined by the Board of Commissioners;----------

g. To make cooperation with any other business entity or party, in the form of licensing cooperation, management contract, assets rental, Joint Operation (KSO), Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Transfer (BoWT), Build- Transfer-Operate (BTO) and any other cooperation of the same kind and not day-to-day business as usual of the Company under certain value and term determined by the Board of Commissioners;----------

h. To make capital participation in subsidiary company, joint venture company, and / or any other company, including participation to establish subsidiary company and / or joint venture company under certain value limitation determined by the Board of Commissioners, except for the purpose

IKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Inggris - B. Indonesia

of securing the receivables, in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

i. To decrease capital participation, including dilution to subsidiary company, joint venture company, and / or any other company under certain value limitation determined by the Board of Commissioners, except for the purpose of securing the receivables, in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

j. To dispose of capital participation from subsidiary company, joint venture company, and / or any other company under certain value limitation determined by the Board of Commissioners, except for the purpose of securing the receivables, in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

k. To take any actions included in material transaction as specified by any laws and regulations in the field of Capital Market in certain value determined by the Board of Commissioners, except that the actions are included in material transaction excluded by any laws and regulations applicable in the field of Capital Market;----------

l. To conduct merger, amalgamation, takeover, separation, and dissolution of subsidiary company and joint venture company in certain value decided by the

FIKRI SAID SHED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Board of Commissioners, in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

m. To make investment under certain value limitation and / or criteria determined by the Board of Commissioners in due observance of any rules in the field of Capital Market;----------

n. To decide and change the Company logo;----------

o. To decide organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;

p. To establish / found a foundation, organization and / or association incorporated either those related directly or indirectly thereto, founded by subsidiary company;----------

q. To charge fixed and routine fees and obligations to foundation, organization and / or association incorporated, founded by subsidiary company;----------

r. To decide guideline and/or policy on investment governance;----------

s. Any actions not yet decided in the Company Work Plan and Budget (RKAP);----------

t. To waive any rights over mining business permit for production operation or any rights over mining business permit in any other valid forms that have entered production operation stage.----------

8. The following actions may be taken only by the Board of Directors after obtaining written response from

PENERJEMAH TERSUMPAH

the Board of Commissioners and the Majority Holder of Series-B Shares and receiving approval from the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share:----------

a. to nominate the Company representative to be a candidate for the Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of joint venture company and / or subsidiary company being a State-Owned Enterprise;----------

b. to nominate the Company representative to be a candidate for the Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of joint venture company and / or subsidiary company not being a certain State-Owned Enterprise decided by the Majority Holder of Series-B Shares;----------

9. a. Limitation and / or criteria decided by the Board of Commissioners for any matters as referred to in paragraph 7 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) and m) hereof shall be made after obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;----------

b. Approval of the Board of Commissioners particularly related to paragraph 7 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) and m) hereof under certain limitation and criteria shall be decided after obtaining approval from the Holder of Series-A

FIKRI SAID BED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Dwiwarna Share or the Majority Holder of Series-B Shares;----------

c. Approval of the Board of Commissioners particularly related to paragraph 7 r), s), and t) hereof shall be decided after obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares;----------

d. Board of Directors' actions as referred to in paragraph 7 g) hereof insofar as they are required for the purpose of principal business activity normally conducted in the field of relevant business in due observance of the provisions of any laws and regulations, shall not require approval from the Board of Commissioners and / or the GMS;----------

e. Board of Directors' actions as referred to in paragraph 7 g) and h) hereof insofar as they are required for the purpose of participation in a tender and / or in order to perform a project and / or fulfill any requirements and / or for the purpose of the principal business activity normally conducted in the field of relevant business in due observance of the provisions of the laws and regulations, shall not require approval from the Board of Commissioners and / or the GMS.----------

10. Within no later than 30 (thirty) calendar days from receipt of request or explanation and complete documents

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

from the Board of Directors, the Board of Commissioners must make decision or provide response as referred to in paragraph 7 and paragraph 8 hereof.----------

11. Board of Directors must request approval from the GMS:----

a. to transfer the Company assets; or----------

b. to pledge the Company assets as a security for debt;----------

constituting more than 50% (fifty percent) of total net assets of the Company within 1 (one) or more transactions, either those correlated or not, except to act as the manager of the Company business, pursuant to Article 3 hereof.----------

12. a. The following actions may be taken by the Board of Directors only after obtaining written response from the Board of Commissioners and obtaining approval from the GMS:----------

1) to do any actions included in material transaction as prescribed by any laws and regulations in the field of Capital Market in a value above 50% (fifty percent) of the Company equity, except that the actions are included in material transaction excluded by any laws and regulations applicable in the field of Capital Market;----------

2) to make any transactions causing the conflict of interest as set forth in any laws and

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

regulations applicable in the field of Capital Market;----------

3) to make any other transactions in order to fulfill any laws and regulations applicable in the field of Capital Market;----------

4) to execute special assignment ordered by Central Government;----------

5) to set up Pension Fund and / or make amendment to Pension Fund Regulation as required by any laws and regulations.----------

b. If within 30 (thirty) calendar days from receipt of request or explanation and any documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners fails to provide written response then the GMS may make decision without any written response from the Board of Commissioners.----------

13. Legal actions as referred to in paragraph 11 and paragraph 12 hereof taken without approval from the GMS shall remain binding to the Company insofar as any other party in the legal actions has good faith.------

14. GMS may either diminish limitations to the Board of Directors' actions set forth in these Articles of Association or determine any other limitations to the Board of Directors, other than those set forth in these Articles of Association.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

15. Management policy shall be determined in the Board of Directors' Meeting.----------

16. For the purpose of implementation of the Company management, each member of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company in accordance with the policy and authority of the Company management prescribed by virtue of the Board of Directors' decision.----------

17. If not specified otherwise in the policy of the Company management as referred to in paragraph 15 hereof, the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company either inside or outside the Court.----------

18. a. In case of unavailability or absence of President Director due to any reason, which case is not necessary to be proved to any third party then Vice President Director shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to execute any duties of the President Director or the President Director shall appoint in writing one of the members of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to execute any duties of the President Director and / or Vice President

ZAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Director if at the same time the Vice President Director is unavailable or absent.----------

b. In case of unavailability or absence of Vice President Director due to any reason, which case is not necessary to be proved to any third party then the Vice President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors authorized to execute any duties of the Vice President Director or the Vice President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to execute any duties of the President Director and / or the Vice President Director if the President Director is previously unavailable or absent.----------

c. If GMS doesn't appoint Vice President Director, then in case of unavailability or absence of President Director due to any reason, which case is not necessary to be proved to any third party, the President Director shall appoint in writing a member of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to execute any duties of the President Director.----------

19. In case of no appointment by President Director, then a member of the Board of Directors who holds his

PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

/ her position for the longest time shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to execute any duties of the President Director.------

20. Board of Directors shall, for certain actions on its own account, be also entitled to appoint one or more persons as its representative or attorney-in-fact, by giving him / her or them, powers for the certain actions specified in the power of attorney.----------

21. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be decided by a GMS. In the event the GMS doesn't decide the distribution of duties and authorities then the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors shall be decided by virtue of the decision of the Board of Directors.----------

22. Board of Directors shall, in the management of the Company, execute any instruction provided by GMS insofar as it doesn't conflict with any laws and regulations and / or these Articles of Association.-------

23. A member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if:----------

    a. There is any case in Court between the Company and the member of the Board of Directors concerned; or----

    b. The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.----------

FIKRI SAID ... PENERJEMAH TERSUMPAH ... B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

24. In the event there is any condition as referred to in paragraph 23 hereof, one eligible to represent the Company shall be:----------

a. Any other member of the Board of Directors having no conflict of interest with the Company;----------

b. The Board of Commissioners, in the event all members of the Board of Directors have a conflict of interest contrary to the Company interests; or-----

c. Any other party appointed by the GMS, in the event all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.----------

----------**BOARD OF DIRECTORS' MEETING**----------

----------**ARTICLE 13**----------

1. Board of Directors must hold the Board of Directors' Meeting periodically at least 1 (one) time in a month.----
2. Board of Directors must hold the Board of Directors' Meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.----------
3. Board of Directors' Meeting may be held anytime if:-------

a. deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;----------

b. at the written request of one or more members of the Board of Commissioners;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

4. Summons for the Board of Directors' Meeting must be made by a member of the Board of Directors entitled to represent the Board of Directors pursuant to the provision of Article 12 hereof.----------

5. a. Summons for the Board of Directors' Meeting must be made in writing and shall be conveyed or delivered personally to each member of the Board of Directors with sufficient receipt, or via registered mail or through courier service or by telex, facsimile or electronic mail (e-mail) within no later than 5 (five) calendar days before the meeting, excluding the date of the summons and the date of the meeting, or within earlier time in case of urgency.----------

   b. Summons as referred to the foregoing shall not be required for any meetings that have been scheduled pursuant to the Resolutions of the Board of Directors' Meeting previously held or if all members of the Board of Directors are present at the meeting.----------

6. Summons for the Board of Directors' Meeting as referred to in paragraph 5 hereof must state the agenda, date, time and place of the meeting. The Board of Directors' Meeting may be held at the Company domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company business place.----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

7. All of the Board of Directors' Meetings shall be presided over by President Director, and in case of unavailability or absence of the President Director then Vice President Director shall chair the Board of Directors' Meeting, or a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director shall chair the Board of Directors' Meeting if at the same time the Vice President Director is unavailable or absent, or a member of the Board of Directors appointed by Vice President Director shall preside over the Board of Directors' Meeting if at the same time the President Director is unavailable or absent and no appointment is made.---------

8. If a GMS doesn't appoint Vice President Director, then in case of unavailability or absence of President Director, a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director shall preside over the Board of Directors' Meeting.----------

9. In the event no appointment is made by President Director then a member of the Board of Directors holding position as the member of the Board of Directors for the longest time shall preside over the Board of Directors' Meeting.----------

10. In the event there are more than 1 (one) member of the Board of Directors holding position as the member of the Board of Directors for the longest

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

time, then the oldest Director as referred to in paragraph (9) hereof shall chair the Board of Directors' Meeting.----------

11. A member of the Board of Directors may be represented in the Board of Directors' Meeting only by any other member of the Board of Directors by virtue of the power of attorney. A member of the Board of Directors may represent one other member of the Board of Directors only.----------

12. A member of the Board of Directors who is absent to attend a Board of Directors' Meeting may propose his / her opinion in writing with signature to be further submitted to President Director or Vice President Director or to any other member of the Board of Directors who will chair the Board of Directors' Meeting, whether he / she approves or rejects any matters to be discussed and such opinion will be deemed to be a vote cast lawfully at the Board of Directors' Meeting.----------

13. Board of Directors' Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended and / or represented by more than 1/2 (a half) of total members of the Board of Directors.----------

14. In the event there are more than one proposal, then votes shall be cast again so that 1 (one) of the

ZAKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

proposals has more than 1/2 (a half) of total votes cast.----------

15. Resolutions of the Board of Directors' Meeting must be adopted on the basis of mutual consensus. In case of failure to achieve the mutual consensus then resolutions must be adopted by voting on the basis of affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total votes lawfully cast at the meeting.----------

16. At the Board of Directors' Meeting, each member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for any other member of the Board of Directors he / she represents lawfully at the meeting.----------

17. Blank (abstaining) votes shall be deemed to have agreed on any proposal submitted at the meeting. Invalid votes shall be deemed inexistent and shall not be counted in determining the number of votes cast at the meeting.----------

18. Voting on person shall be conducted by using folded ballot without signature, whereas voting on any other matters shall be carried out orally, except that the Meeting Chairperson determines otherwise without any objection on the basis of the majority votes from attendees.----------

19. a. Results of Meeting as referred to in paragraph 1 hereof must be poured out in the Minutes of

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Meeting. The Minutes of Meeting must be prepared by a person being present at the meeting appointed by the Meeting Chairperson and then signed by all members of the Board of Directors being present and delivered to all members of the Board of Directors.----------

b. Results of Meeting as referred to in paragraph 2 hereof must be poured out in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting must be prepared by a person being present at the meeting appointed by the Meeting Chairperson and then signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board Commissioners being present and delivered to all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners.----------

c. In the event there is any member of the Board of Directors and / or that of the Board of Commissioners not signing the results of meeting as referred to in a) and b) hereof, the member concerned must state any reason thereof in writing in a separate document attached to the Minutes of Meeting.----------

d. Minutes of meeting as referred to in a) and b) hereof must be documented by the Company.----------

FAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

e. Minutes of Meeting of the Board of Directors shall constitute valid proof for all members of the Board of Directors and for any third party with respect to any resolutions adopted at the Meeting.----------

20. a. Board of Directors may also adopt any valid resolutions without holding a Board of Directors' Meeting provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors give approval on any proposal submitted in writing and sign the approval.----------

b. Resolutions adopted in such manner shall have same force as those adopted lawfully at the Board of Directors' Meeting.----------

21. In the event a member of the Board of Directors fails to physically attend a meeting, then the member of the Board of Directors may attend the meeting via teleconference media, conference video, or any other electronic media, pursuant to applicable provisions.

22. Each member of the Board of Directors who personally in any manner, either directly or indirectly, has interest in a transaction, contract or proposed contract in which the Company is one of parties thereof, then his / her nature of interest in a Board of Directors' Meeting must be stated, and thereby,

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

he / she shall not be entitled to take part in voting on any matters related to the transaction or contract.----------

----------**BOARD OF COMMISSIONERS**----------

----------**ARTICLE 14**----------

1. a. The Company Supervision shall be conducted by the Board of Commissioners in the number of members adjusted to the Company's needs, at least consisting of 2 (two) persons and at most in same number as the number of the members of the Board of Directors, who one of them shall be appointed as President Commissioner, and if required, another one may be appointed as Vice President Commissioner.--

   b. Board of Commissioners shall be comprised of Commissioner and Independent Commissioner.----------

   c. Number of Independent Commissioner shall conform to the provisions of the prevailing laws and regulations.----------

2. Board of Commissioners is a council and each member of the Board of Commissioners may not act individually, but on the basis of decision of the Board of Commissioners.----------

3. Requirements of the members of the Board of Commissioners must follow the provisions of:----------

   a. the State-Owned Enterprise Law;----------

   b. the Limited Liability Company Law;----------

FIKRI SAID SUED
PENERJEMAH TERSUMPAH

c. any laws and regulations in the field of Capital Market; and----------

d. any other laws and regulations applicable to and related to the Company business activities.----------

4. Ones who may be appointed as members of the Board of Commissioners shall be any individual persons who fulfill any requirements pursuant to provisions.----------

5. Fulfillment of any requirements as referred to in paragraph 3 and paragraph 4 hereof shall be proved by written statement signed by candidate for the member of the Board of Commissioners and the written statement shall be kept by the Company.----------

6. In addition to fulfilling any criteria as referred to in paragraph 3 and paragraph 4 hereof, the appointment of the members of the Board of Commissioners shall be made by considering integrity, dedication, understanding on any company management issues related to one of management functions, sufficient knowledge mastery in the field of the Company business, and sufficient time availability to execute their duties and any other requirements pursuant to laws and regulations.----------

7. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and discharged by the GMS attended by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and the resolutions of the Meeting must be approved by the Holder of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Series-A *Dwiwarna* Share. The members of the Board of Commissioners shall be appointed by a GMS from candidates nominated by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share, the nomination of which shall be binding to the GMS.----------

8. Resolutions of the GMS regarding the appointment and discharge of the members of the Board of Commissioners shall also determine when the appointment and the discharge take effect. In the event the GMS doesn't determine the same then the appointment and the discharge of the members of the Board of Commissioners shall take effect from the closing of the GMS in due observance of the provisions of any laws and regulations.----------

9. a. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term commencing from the closing of the GMS or a date determined by the GMS for their appointment and shall be end at the closing of 5th (the fifth) Annual GMS after their appointment, but without prejudice to the rights of the GMS to anytime discharge the members of the Board of Commissioners before expiration of their term of office.----------

b. Such discharge shall take effect as of the closing of the GMS, unless determined otherwise by the GMS.---

FIKRI SAID CHED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

c. Members of the Board of Commissioners of the Company whose term of office ends may be re-appointed by the GMS under the longest accumulated term of office until the closing of 10th (the tenth) Annual GMS.----------

10. Members of the Board of Commissioners may be discharged anytime on the basis of the resolutions of the GMS by stating any reasons thereof.----------

11. Discharge of the members of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 10 hereof shall be executed if based on reality, the members of the Board of Commissioners concerned:----------

a. fail to well perform their duties;----------

b. fail to comply with the provisions of the Articles of Association and / or any laws and regulations;-----

c. are involved in any action that harms the Company;----

d. commit action that infringes ethics and / or propriety;----------

e. have been decided as suspect and / or the accused by law enforcement officer in any action that harms the State-Owned Enterprise.----------

f. are declared guilty by virtue of court judgment that has a permanent force of law;----------

g. resign;----------

h. any other reasons deemed correct by the GMS in the interest and for the benefit of the Company.------

FIKRI SAID SHED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

12. Decision of discharge as referred to in paragraph 11 hereof shall be made after the persons concerned are given the opportunity to defend themselves, except for discharge by reason of paragraph 11 e), f), and g) hereof.----------

13. Discharge for reasons as referred to in paragraph 11 c) and f) hereof shall constitute dishonorable discharge.----------

14. In the event there is a condition that a member of the Board of Commissioners has family relationship, either related by blood or related by marriage within straight line and / or line to the side until the second generation, to the members of the Board of Directors and to the other members the Board of Commissioners of the Company, then the GMS shall have powers to discharge one of them.----------

15. Distribution of works among the members of the Board of Commissioners shall be stipulated by themselves, and for the smoothness of their duties, the Board of Commissioners may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.----------

16. If at any time due to any reasons, one or more positions of the members of the Board of Commissioners are vacant, then:----------

FIKRI SAID SED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. GMS must be held to fill the vacant position(s) should the Board of Commissioners become less than 2 (two) members who one of them is President Commissioner or the vacant position is President Commissioner.----------

b. GMS as referred to in a) hereof shall be held within no later than 90 (ninety) days from the vacancy of the position as referred to in a) hereof.----------

17. If at any time due to any reasons all positions of the members of the Board of Commissioners of the Company are vacant, then the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share may appoint temporarily the acting members of the Board of Commissioners to perform the works of the Board of Commissioners with same authorities, provided that within no later than 90 (ninety) calendar days after such vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy of the positions of the Board of Commissioners.----------

18. a. A member of the Board of Commissioners may resign from his / her position before expiration of his / her term of office by notifying the Company in writing of his intention.----------

b. The Company must hold a GMS to decide request for resignation of the member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety)

FIKRI SAID & REKAN
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

calendar days after receipt of the request for resignation.----------

c. The Company must open information to the public and convey any information to OJK (the Financial Service Authority) within no later than 2 (two) working days after receipt of, the request for resignation of the member of the Board of Commissioners as referred to in a) hereof and, the results of the GMS as referred to in b) hereof.-------

d. Before the effect of resignation, the member of the Board of Commissioners concerned shall be obliged to consistently execute his / her duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association and any laws and regulations.----------

e. A member of the Board of Directors who resigns as mentioned above shall be consistently asked for his / her accountability as a member of the Board of Commissioners from his / her appointment until the date of approval for his / her resignation, in the GMS.----------

f. Acquittal of responsibilities of the member of the Board of Commissioners who resigns shall be granted after an Annual GMS has acquitted him / her.----------

g. In the event a member of the Board of Commissioners resigns so that the number of the Board of

FEKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Commissioners becomes less than (two) persons, then such resignation shall be valid if has been confirmed by a GMS and the new member of the Board of Commissioners has been appointed to fulfill the minimum requirements of the number of the members of the Board of Commissioners.----------

19. A member of the Board of Commissioners shall be prohibited from holding double position as:----------

a. Member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or Supervisory Board of any other State-Owned Enterprise, the Subsidiary of the State-Owned Enterprise and its derivative, and Region-Owned Enterprise; and / or----------

b. any other Position pursuant to the provisions of any laws and regulations.----------

20. In the event a person holds a position prohibited from being held concurrently with a position of the member of the Board of Commissioners of the Company as referred to in paragraph 19 hereof, then the person concerned must resign from the position within no later than 30 (thirty) working days from his / her holding of such double position in the Company, unless pursuant to any laws and regulations, the position as the member of the Board of Commissioners ends by law upon appointment of the person concerned in new position so prohibited.----------

FIKRI SAID OFFICIAL
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

21. A member of the Board of Directors not resigning from his / her position as referred to in paragraph 20 hereof, then the member of the Board of Commissioners concerned shall be considered to have submitted request for such resignation after the elapse of 30 (thirty) working days as referred to in paragraph 20 hereof.----------

22. Position of a member of the Board of Commissioners shall end in case of:----------

a. death or permanent impediment;----------

b. expiration of his / her term of office;----------

c. discharge before expiration of his / her term of office due to no longer fulfilling any requirements as a member of the Board of Commissioners of the Company as referred to in paragraph 3 and paragraph 4 hereof;----------

d. discharge by virtue of the resolutions of the GMS;----

e. if his / her resignation has been effective, as referred to in paragraph 18 b) hereof;----------

23. Any member of the Board of Commissioners who ceases before or after the expiration of his / her term of office, except due to death, shall remain responsible for his / her actions which accountability has not yet been accepted by the GMS.----------

24. Members of the Board of Commissioners may be given honorarium and allowance / facility including *tantiem*

FIKRI SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

and pension compensation in type and amount determined by the GMS in due observance of the provisions of any laws and regulations.----------

---------**DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE**----------

----------**BOARD OF COMMISSIONERS**----------

----------**ARTICLE 15**----------

1. Board of Commissioners shall have duties to conduct supervision to management policy, the course of management in general either regarding the Company or the Company business conducted by the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors including supervision to the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget and the provisions of these Articles of Association and the resolutions of GMS, and any laws and regulations in the interest of the Company and according to the purposes and objectives of the Company.----------
2. In the performance of the duties as referred to in paragraph 1 hereof, then:----------
   a. the Board of Commissioners shall be authorized:-------
      1) to examine any books, records, and any other documents, inspect cash for the purpose of verification and any other commercial papers and audit the Company assets;----------
      2) to have access to yard, building, and office used by the Company;----------

FIKRI SAID OSED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

3) to ask for explanation from the Board of Directors and / or any other officers regarding any issues relevant to the Company management;--

4) to know any policies and actions that have been and will be taken by the Board of Directors;----------

5) to ask the Board of Directors and / or any other officers below the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners' Meeting;--

6) to appoint and discharge a Secretary of the Board of Commissioners;----------

7) to suspend any members of the Board of Directors pursuant to the provisions of these Articles of Association;----------

8) to establish Audit Commission, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and any other Committees if deemed necessary, in due observance of the Company capacity;----------

9) to employ expert staff for certain matters and for certain period at the Company's expenses, if deemed necessary and in due observance of any applicable provisions;--------

10) to execute the management of the Company in certain condition for certain term pursuant

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

to the provisions of these Articles of Association;----------

11) to agree on the appointment and discharge of Corporate Secretary and / or Internal Control Unit Head upon prior approval of the Majority Holder of Series-B Shares;---------

12) to attend the Board of Directors' Meeting and give opinion on any matters discussed;------

13) To execute any other supervisory authorities insofar not contrary to any laws and regulations, and any rules in the field of Capital Market, the Articles of Association, and / or the resolutions of the GMS.----------

b. Board of Commissioners shall be obliged:----------

1) to give advice to the Board of Directors in the execution of management of the Company;-----

2) to give opinion on and approval for the Company's Long Term Plan, Work Plan and Annual Budget and any other plan prepared by the Board of Directors pursuant to the provisions of these Articles of Association;----

3) to follow the Company activity progress, give opinion and suggestion to the GMS on any issues deemed important for the Company management;----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

4) to make report to the Majority Holder of Series-B Shares in case of any indication of the Company performance decline;----------

5) to nominate Public Accountant who will audit the Company book, to the GMS;----------

6) to examine and review periodic report and Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report;----------

7) to provide explanation, opinion and suggestion to the GMS on Annual Report, if requested;------

8) to prepare the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and keep their copy;-----

9) to make report to the Company on their shareholding and / or their family's shareholding in the Company and in any other company;----------

10) to provide report on any supervisory duties which have been conducted during the last fiscal year, to GMS;----------

11) to make explanation on any matters that are questioned and requested by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share, in due observance of any laws and regulations, particularly those applicable in the field of Capital Market;----------

FIKRI SAID OMAR
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

12) to submit quarterly report on the Company performance, including the realization of Key Performance Indicator, to the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and the Majority Holder of Series-B Shares;----------

13) To prepare the Board of Commissioners' Charter, and the Relationship Management of the Board of Commissioners of the Company, and the Board of Commissioners of Subsidiary Company;---

14) to execute any other obligations for the purpose of supervisory and advisory duties, to the extent they are not contrary to any laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS.----------

3. In the performance of their duties, the members of the Board of Commissioners must:----------

a. comply with the Articles of Association and any laws and regulations, and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and reasonability; and----------

b. have good faith, with full of prudence and responsibility in the performance of supervisory and advisory duties to the Board of Directors for

PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

the benefit of the Company and according to the Company purposes and objectives.----------

4 In certain condition, the Board of Commissioners must hold the Annual GMS and any other GMS according to its authorities as set forth in any laws and regulations and the Articles of Association.----------

5. a. Any members of the Board of Commissioners shall be responsible individually and collectively for the Company loss arising from the mistake or negligence of the members of the Board of Directors in performing their respective duties.----------

b. Any members of the Board of Commissioners shall not be subject to responsibility for the Company loss as referred to in a) above, if they can prove that:----------

1) the loss is not caused by their mistake or negligence;----------

2) they have executed supervision in good faith, with full of responsibility, and prudence for the benefit of, and according to the purposes and objectives of, Issuer or Public Company;------

3) they have no conflict of interest, either directly or indirectly, with any actions of supervision that result in loss; and----------

4) they have taken any actions to prevent the emergence or continuance of the loss.----------

ZAKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

----------**BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING**----------

----------**ARTICLE 16**----------

1. Any resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted in the Board of Commissioners' Meeting.--------
2. Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 1 (one) month.----------
3. Board of Commissioners must hold a meeting with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.----------
4. Board of Commissioners may hold a meeting anytime at the request of 1 (one) or more members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, by stating any matters to be discussed;----------
5. Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be made by President Commissioner, and in case of absence of the President Commissioner, which case is not necessary to be proved to any parties, summons for the meeting shall be made by Vice President Commissioner. In case of absence of the Vice President Commissioner due to any reasons, which case is not necessary to be proved to any parties then summons for the meeting shall be made by one of the members of the Board of Commissioners.----------
6. In case of unavailability or absence of President Commissioner due to any reasons, which case is not necessary to be proved to any third party and in



case of unavailability of Vice President Commissioner, then the Board of Commissioners' Meeting shall be presided over by a member of the Board of Commissioners being present and appointed at the Meeting.----------

7. a. Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be made in writing and shall be conveyed or delivered personally to each member of the Board of Commissioners with sufficient receipt, or via registered mail or through courier service or by telex, facsimile or electronic mail (e-mail) within no later than 5 (five) days before the meeting, excluding the date of the summons and the date of the meeting, or within earlier time in case of urgency.----------

   b. Summons as referred to the foregoing shall not be required for any meetings that have been scheduled pursuant to the Resolutions of the Board of Commissioners' Meeting previously held.----------

8. Summons for the Board of Commissioners' Meeting as referred to in paragraph 5 hereof must state the agenda, date, time and place of the meeting. The Board of Commissioners' Meeting shall be held at the Company domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company business place.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH

9. All of the Board of Commissioners' Meetings shall be presided over by President Commissioner.----------

10. a. In case of unavailability or absence of the President Commissioner, then Vice President Commissioner shall chair the Board of Commissioners' Meeting, or a member of the Board of Commissioners appointed in writing by the President Commissioner shall chair the Board of Commissioners' Meeting if at the same time the Vice President Commissioner is unavailable or absent, or a Member of the Board of Commissioners appointed by Vice President Commissioner shall preside over the Board of Commissioners' Meeting if at the same time the President Commissioner is unavailable or absent and no appointment is made.----------

b. If the GMS doesn't appoint Vice President Commissioner, then in case of unavailability or absence of President Commissioner, the Board of Commissioner' Meeting shall be presided over by any other member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.----------

11. In the event no appointment is made by President Commissioner then a member of the Board of Commissioners holding position as the member of the Board of Commissioners for the longest time shall preside over the Board of Commissioners' Meeting. The Board of

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Commissioners' Meeting shall be valid and entitled to adopt any binding resolutions if attended and / or represented by more than 1/2 (a half) of total members of the Board of Commissioners.----------

12. In the event there are more than 1 (one) member of the Board of Commissioners holding position as the member of the Board of Commissioners for the longest time, then the oldest member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 11 hereof shall chair the Board of Commissioners' Meeting.----------

13. In the event there are more than one proposal, then votes shall be cast again so that 1 (one) of the proposals has more than 1/2 (a half) of total votes cast.----------

14. In the Board of Commissioners' Meeting, each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for any other member of the Board of Commissioner he / she represents lawfully at the meeting.----------

15. Blank (abstaining) votes shall be deemed to have agreed on any proposal submitted at the meeting. Invalid votes shall be deemed inexistent and shall not be counted in determining the number of votes cast at the meeting.----------

16. Voting on person shall be conducted by using folded ballot without signature, whereas voting on any other

ZIKRI SAID OSED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

matters shall be carried out orally, except that the Meeting Chairperson determines otherwise without any objection on the basis of majority votes from attendees.--

17. Resolutions of the Board of Commissioners' Meeting must be adopted on the basis of mutual consensus. In case of failure to achieve the mutual consensus then resolutions must be adopted by voting on the basis of affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total votes lawfully cast at the meeting.--------

18 a. Results of Meeting as referred to in paragraph (2) hereof must be poured out in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting must be prepared by a person being present at the meeting appointed by the Meeting Chairperson and then signed by all members of the Board of Commissioners being present and delivered to all members of the Board of Commissioners.----------

b. Results of Meeting as referred to in paragraph 3 hereof must be poured out in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting must be prepared by a person being present at the meeting appointed by the Meeting Chairperson and then signed by all members of the Board of Commissioners and those of the Board of Directors being present and delivered to all members of the Board of Commissioners and those of the Board of Directors.----

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

c. In the event there is any member of the Board of Commissioners and / or that of the Board of Directors not signing the results of meeting as referred to in a) and b) hereof, the member concerned must state any reason thereof in writing in a separate document attached to the minutes of meeting.----------

d. Minutes of Meeting as referred to in a) and b) hereof must be documented by the Company.----------

e. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall constitute valid proof for all members of the Board of Commissioners and for any third party with respect to any resolutions adopted at the Meeting.----------

19. a. Board of Commissioners may also adopt any valid resolutions without holding a Board of Commissioners' Meeting provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give approval on any proposal submitted in writing and sign the approval.----------

b. Resolutions adopted in such manner shall have same force as those adopted lawfully at the Board of Commissioners' Meeting.----------

20. In the event a member of the Board of Commissioners fails to physically attend a meeting, then the member

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of the Board of Commissioners may attend the meeting via teleconference media, conference video, or any other electronic media, pursuant to applicable provisions.

21. Each member of the Board of Commissioners who personally in any manner, either directly or indirectly, has interest in a transaction, contract or proposed contract in which the Company is one of parties thereof, then his / her nature of interest in a Board of Commissioners' Meeting must be stated, and thereby, he / she shall not be entitled to take part in voting on any matters related to the transaction or contract.----------

----------**COMPANY'S LONG TERM PLAN**----------

----------**ARTICLE 17**----------

1. Board of Directors must prepare Draft Long Term Plan (RJP) guided by the State-Owned Enterprise Roadmap pursuant to the provisions of any laws and regulations in the field of the State-Owned Enterprise.----------
2. The Company's Draft Long Term Plan shall at least contain:----------
   a. evaluation to the execution of pervious plan;---------
   b. the Company's current position;----------
   c. any assumptions applied in management;----------
   d. the Company mission, business target, business strategy, policy, and work program;----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

e. the Company's detailed budget for each of the work program budget; and----------

f. the Company's financial projection.----------

3. The Company's Long Term Plan prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph 1 hereof shall be approved by the GMS.----------

4. Authorities of the GMS as referred to in paragraph 3 hereof may be empowered to the Board of Commissioners by first obtaining approval from the Majority Holder of Series-B Shares.----------

5. The Company's Draft Long Term Plan which has been signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be submitted to the GMS or proxy as referred to in paragraph 3 hereof within no later than 90 (ninety) calendar days before the beginning of the first fiscal year of the Company's Long Term Plan or within a time frame set forth in any laws and regulations, particularly any provisions in the field of Capital Market, for approval.----------

6. The Company's Draft Long Term Plan shall be approved within no later than 30 (thirty) calendar days before the beginning of the first fiscal year of the Company's Long Term Plan or within time frame specified in any laws and regulations, particularly any provisions in the field o Capital Market.----------

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

----------**COMPANY WORK PLAN AND BUDGET**----------

----------**ARTICLE 18**----------

1. Board of Directors must prepare the Company Work Plan and Budget (RKAP) for each fiscal year, at least containing:----------
   a. the Company mission, business target, business strategy, policy, and work / activity program;--------
   b. the Company's detailed budget for each of the work/activity program budget;----------
   c. financial projection of the Company and its subsidiary;----------
   d. Board of Commissioners' Work Program;----------
   e. Government program which is executed, including special assignment;----------
   f. Restructuring Plan (if any);----------
   g. Social and environmental responsibility program;------
   h. Risk Management;----------
   i. State-Owned Enterprise IT's Strategic plan description; and----------
   j. any other matters which require approval from the Board of Commissioners;----------
2. The Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph 1 hereof shall be approved by the GMS.----------
3. Authorities of the GMS as referred to in paragraph 2 hereof may be empowered to the Board of Commissioners

FIKRI SAID SHED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

upon prior approval of the Majority Holder of Series-B Shares.----------

4. Board of Commissioners must prepare the Board of Directors' work program being an inseparable part of the Company's Annual Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph 1 hereof.----------

5. In the event the authorities of the GMS are empowered to the Board of Commissioners as referred to in paragraph 3 hereof, the Company's Draft Work Plan and Budget which has been signed by all members of the Board of Directors shall be submitted to the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) calendar days before the beginning of new fiscal year or within time frame set forth in the prevailing laws and regulations, to obtain approval from the Board of Commissioners.----------

6. The Company's Draft Work Plan and Annual Budget shall be approved by the GMS or the Board of Commissioners (in the event the authorities of the GMS are empowered to the Board of Commissioners as referred to in paragraph 3 hereof) within no later than 30 (thirty) calendar days after the Company's fiscal year commences (the fiscal year of the Company's Work Plan and Budget concerned) or within time frame determined in the prevailing laws and regulations.----------

FAKRI SAID CARED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

7. In the event the Company's Draft Work Plan and Annual Budget have not yet been approved by the GMS or the Board of Commissioners within time frame as referred to in paragraph 6 hereof, then the Company's Draft Work Plan and Annual Budget of the previous year shall be applied.----------

----------**FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT**----------

----------**ARTICLE 19**----------

1. The Company's fiscal year shall commence from 1st (the first day) of January until 31st (the thirty first day) of December of the same year. At the end of December each year, the Company's books shall be closed.----------
2. Board of Directors must prepare Annual Report that at least contains:----------
   a. Consolidated and non-consolidated financial statement, at least comprised of the recent fiscal year end balance sheet in comparison with the previous fiscal year, income statement of relevant fiscal year, cash flow report, and equity change report along with notes on the financial statement;----------
   b. Report on the Company activity;----------
   c. General Policy Direction Performance Report and State-Owned Enterprise Roadmap which consider the Company's financial continuity;----------
   d. Government program performance report including Special Assignment, if any;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

e. Restructuring performance report, if any;----------

f. Social and Environmental Responsibility Performance Report, if any;----------

g. Detail of problems arising during the fiscal year which influence the Company business;----------

h. Name of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners; and----

i. Income of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners for the recent fiscal year;----------

3. Board of Commissioners must prepare report on any supervisory duties that have been performed by the Board of Commissioners during the recent fiscal year being an inseparable part of the annual report prepared by the Board of Directors as referred to in paragraph 2 hereof.----------

4. Draft Annual Report including Financial Statement which has been audited by Public Accountant, as signed by all members of the Board of Directors shall be submitted to the Board of Commissioners for review and signing before submission to the GMS for approval and validation.----------

5. Annual Report as referred to in paragraph 2 hereof, as signed by all members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners shall be submitted by the Board of Directors to the Annual GMS

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

within no later than 5 (five) months after the end of Fiscal Year in due observance of applicable provisions.----------

6. In the event there is any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners not signing the Annual Report, any reasons thereof must be described in writing or stated by the Board of Directors in separate document attached to the Annual Report.----------

7. In the event there is any member of the Board of Directors or that of the Board of Commissioners not signing the Annual Report as referred to in paragraph 5 hereof and no reason is described in writing, the member concerned shall be deemed to have agreed on the contents of the Annual Report.

8. Approval for Annual Report including validation to financial statement as referred to in paragraph 2 hereof shall be made in the Annual GMS at the latest at the end of 5th (the fifth) month after the end of fiscal year.----------

9. Approval for annual report including validation to annual financial statement and report on supervisory duties by the Board of Commissioners and decision on profit use shall be decided by the Annual GMS.---------

10. Approval for Annual Report including report on supervisory duties by the Board of Commissioners and validation to financial statement by the Annual GMS shall mean

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the grant of full discharge and acquittal of responsibilities to any members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners for management and supervision that have been conducted during the last fiscal year insofar as such actions are evidenced from the Annual Report, including financial statement, report on supervisory duties by the Board of Commissioners and conform to applicable provisions.----------

11. Annual Report including Financial Statement as referred to in paragraph 4 hereof must be made available at the Company Office from the date of summons until the date of the Annual GMS.----------

12. The Company must announce Balance Sheet and Profit / Loss Statement in a newspaper using Indonesian language and circulated nationally according to procedures as set forth in any laws and regulations, and any rules in the field of Capital Market.----------

----------**REPORTING**----------

----------**ARTICLE 20**----------

1. Board of Directors must prepare periodic report that contains the execution of the Company Work Plan and Budget.----------

2. Periodic report as referred to in paragraph 1 hereof shall include quarterly report and Annual Report.---------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

3. Other than periodic report as referred to in paragraph 2 hereof, the Board of Directors may anytime provide special report to the Board of Commissioners.-----

4. Periodic report and any other report as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 hereof shall be submitted under the format, content and procedures of preparation pursuant to the provisions of any laws and regulations and any rules applicable in the field of Capital Market in Indonesia.----------

5. Board of Directors must submit quarterly report to the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) calendar days after the end of such quarterly period.----------

----------**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)**----------

----------**ARTICLE 21**----------

1. GMS in the Company shall include:----------
   a. Annual GMS, as referred to in Article 22 hereof:------
   b. Any other GMS, namely any GMS held whenever need as set forth in Article 23 hereof.----------

2. The meaning of the GMS in these Articles of Association shall mean both the Annual GMS and the other GMS, unless expressly stated otherwise.----------

3. In addition to the execution of the GMS as referred to in OJK Regulation with respect to the plan and holding of the GMS of the Company, the Company may hold the GMS electronically (the meaning of the electronic

EKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

GMS shall be the execution of the GMS by the Company by using teleconference media, conference video or any other electronic media) pursuant to any rules in the field of Capital Market.----------

4. GMS held electronically may be carried out by using:------
   a. Electronic GMS administration system (e-GMS) provided by e-GMS provider, namely the Safekeeping and Settlement Agency appointed by regulator in the field of Capital Market or any other party approved by OJK;----------
   b. System provided by the Company.----------
5. Board of Directors shall hold the Annual GMS and any other GMS. GMS may be held at the request of shareholders or the Board of Commissioners in due observance of the provision of paragraph 6 hereof.----------
6. Request to hold the GMS shall be made by Shareholders:----
   a. GMS may be held at the request of:----------
      i. the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share;----------
      ii. one or more Shareholders, either individually or collectively representing 1/10 (one tenth) or more of total valid voting shares issued by the Company, by fulfilling the provisions of these Articles of Association and any laws and regulations; or----------
      iii. Board of Commissioners.----------

PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

b. Request to hold the GMS referred to in a) hereof shall be submitted to the Board of Directors via registered mail along with any reasons thereof.---

c. Registered mail as referred to in b) hereof shall be submitted by shareholders as referred to in a) items I and ii hereof, with cc submitted to the Board of Commissioners.----------

d. Request to hold the GMS referred to in a) hereof shall:----------

i. be made in good faith;----------

ii. consider the interest of the Company;----------

iii. be a request that requires the resolutions of the GMS;----------

iv. be accompanied by any reasons thereof and any subject matter to be decided in the GMS;--------

v. not conflict with any laws and regulations and these Articles of Association.----------

e. Proposal to hold GMS from shareholders as referred to in a) items I and ii hereof must be a request that requires the resolutions of the GMS and based on judgment by the Board of Directors fulfills the requirements referred to in d) hereof.----------

f. Board of Directors must make announcement of the GMS to shareholders within no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of request to

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

hold the GMS as referred to in a) hereof, received by the Board of Directors.----------

g. Board of Directors must submit notification on the meeting agenda and the registered mail as referred to in c) hereof from the shareholders or the Board of Commissioners to OJK within no later than 5 (five) working days before the announcement as referred to in f) hereof.----------

h. In the event the Board of Directors fails to make the announcement of the GMS as referred to in f) hereof, then upon proposal of the shareholders as referred to in a) items i and ii hereof, within no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of request to hold the GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce:----------

1) that there is any request to hold the GMS, from the shareholders, but not held; and----------

2) any reasons of not holding the GMS.----------

i. In the event the Board of Directors has made announcement as referred to in h) hereof, or a time frame of 15 (fifteen) calendar days has elapsed, the shareholders may resubmit request to hold the GMS as referred to in a) items i and ii hereof to the Board of Commissioners.----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

j. Board of Commissioners must make announcement of the GMS to the shareholders within no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of request to hold the GMS as referred to in i) hereof, received by the Board of Commissioners.----------

k. Board of Commissioners must submit notification on the meeting agenda to OJK within no later than 5 (five) working days before the announcement as referred to in j) hereof.----------

l. In the event the Board of Commissioners fails to make the announcement of the GMS within 15 (fifteen) calendar days as referred to in j) hereof, the Board of Commissioners must announce:-----

1) that there is any request to hold the GMS, from the shareholders, but not held; and----------

2) any reasons of not holding the GMS.----------

m. In the event the Board of Commissioners has made announcement as referred to in l) hereof or a time frame of 15 (fifteen) calendar days has elapsed, the shareholders may submit request to hold the GMS to the head of district court which jurisdiction covers the Company domicile to decide the grant of permit to hold the GMS as referred to in a) items i and ii hereof.----------



n. Shareholders who have obtained court judgment to hold the GMS as referred to in m) hereof, must hold the GMS.----------

o. In the event the Board of Directors fails to make the announcement of the GMS as referred to in f) hereof, then upon proposal of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 6 a) item iii hereof, within no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of request to hold the GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce:------

1) that there is any request to hold the GMS, from the Board of Commissioners, but not held; and----------

2) any reasons of not holding the GMS.----------

p. In the event the Board of Directors has made announcement as referred to in o) hereof, or a time frame of 15 (fifteen) calendar days has elapsed, the Board of Commissioners shall hold the GMS by itself.----------

q. Board of Commissioners must make announcement of the GMS to the shareholders within no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of announcement as referred to in o) hereof, or a time frame of 15 (fifteen) calendar days as referred to in p) hereof has elapsed.----------

FIRDAUS SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

r. Board of Commissioners must submit notification on the meeting agenda to OJK within no later than 5 (five) working days before the announcement as referred to in q) hereof.----------

s. Procedures of the holding of the GMS as referred to in f) and g) hereof, the Board of Commissioners as referred to in j) and q) hereof, and the shareholders as referred to in m) hereof, must be implemented according to the procedures of the holding of the GMS as set forth in OJK Regulation and these Articles of Association.---------

t. In addition to fulfilling the procedures of the GMS as referred to in s) hereof in notification on the GMS agenda must contain information on:--------

1) explanation that the GMS is carried out at the request of the shareholder and the name of shareholder who proposes the request, and his / her shareholding in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners holds the GMS at the request of the shareholder;----------

2) name of shareholder and his / her shareholding in the Company and the judgment of the head of district court with respect to the grant of permit to hold the GMS, if the GMS is carried out by the shareholder in accordance with

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the judgment of the head of district court to hold the GMS; or----------

3) explanation that the Board of Directors doesn't carry out the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners holds by itself the GMS it proposes.----------

---------**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)**--------

----------**ARTICLE 22**----------

1. Annual GMS shall be held annually after the end of fiscal year pursuant to the provisions of any laws and regulations.----------

2. In the Annual GMS:----------

   a. the Board of Directors shall submit Annual Report as referred to in Article 19 hereof;----------

   b. the Board of Directors must submit the proposal of use of the Company's net profit, if the Company has positive earnings;----------

   -c. a Public Accountant Office registered with OJK shall be appointed, as proposed by the Board of Commissioners to conduct audit on the Company's current year Financial Statement including audit to internal control on financial reporting; pursuant to applicable provisions issued by Capital Market authority where the Company shares are registered and / or recorded.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

d. the Board of Directors may propose any other things for the benefit of the Company pursuant to the provisions of these Articles of Association.---

3. Approval for annual report including validation to financial statement and report on supervisory duties of the Board of Commissioners made by the GMS, shall mean the grant of full discharge and acquittal of responsibilities to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with respect to the management and supervision that have been carried out during the last fiscal year, insofar as such actions are reflected in the annual report and the financial statement except any actions of embezzlement, fraud and any other criminal actions.-------

4. Appointment and discharge of the Public Accountant and / or the Public Accountant Office which will provide audit service on annual historical financial information must be decided in the GMS in due observance of any laws and regulations in the field of Capital Market.----------

5. In the implementation of the Annual GMS for appointment of the Public Accountant and / or the Public Accountant Office, the GMS may delegate its authorities to the Board of Commissioners to discharge anytime the Public Accountant and / or the Public Accountant Office that have been appointed, including to appoint the substitute

FERRI SAID & REKAN PENERJEMAH TERSUMPAH Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of the Public Accountant and / or the Public Accountant Office, in due observance of any regulations in the field of Capital Market.----------

----------**OTHER GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**----------

----------**ARTICLE 23**----------

Other General Meeting of Shareholders may be held whenever need in the interest of the Company.----------

------**PLACE, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, SUMMONS AND TIME**-----

----------**OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**----------

----------**ARTICLE 24**----------

1. The Company must determine the place and time to hold the GMS.----------
2. GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia, namely:----------
   a. at the Company domicile;----------
   b. place where the Company conducts its principal business activities;----------
   c. capital of province where the Company is domiciled or where the Company conducts its principal business activities; or----------
   d. province of domicile of Stock Exchange where the Company shares are registered.----------
3. In holding the GMS, the Company must fulfill the following provisions:----------
   a. shall submit notification on the meeting agenda to OJK;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. shall make the announcement of the GMS to shareholders; and----------

c. shall make summons for the GMS to shareholders;-------

4. Notification on the GMS to OJK shall be made under the following provisions:----------

a. The Company must first submit notification on the GMS agenda to OJK within no later than 5 (five) working days before the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS;----------

b. the GMS agenda as referred to in a) hereof must be disclosed clearly and in detail;----------

c. in the event there is any change of the meeting agenda as referred to in b) hereof, the Company must convey the change of agenda to OJK at least at the time of summons for the GMS;----------

d. Provisions in a), b) and c) hereof shall, mutatis mutandis, apply to notification on the GMS held by shareholders under court judgment to hold the GMS as referred to in Article 21 paragraph 6 n) hereof.----------

5. Announcement of the GMS shall be made under the following provisions:----------

a. The Company must make the announcement of the GMS to shareholders within no later than 14 (fourteen) calendar days before summons for the GMS, excluding

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

the date of the announcement and the date of the summons.----------

b. announcement of the GMS as referred to in a) hereof shall at least contain:----------

1) provisions on shareholders eligible to attend the GMS;----------

2) provisions on shareholders eligible to propose the GMS agenda;----------

3) the date of holding of the GMS; and----------

4) the date of summons for the GMS.----------

c. In the event the GMS is held at the request of shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 21 paragraph 6 hereof, in addition to containing any matters referred to in b) hereof, the announcement of the GMS as referred to in a) hereof must contain information that the Company holds GMS due to the request of the shareholders or the Board of Commissioners;----

d. In the event the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, in addition to information as referred to in b) and c) hereof, in the announcement of the GMS must also contain information on:----------

1. subsequent GMS planned to be held if quorum of attendance of the Independent Shareholders

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

as required is not achieved in the first GMS; and----------

2. statement of decision quorum as required in any meeting.----------

e. Announcement of the GMS required to be attended by Independent Shareholders shall be made by following the provisions of regulation in the field of Capital Market;----------

f. Provisions in a), b) and c) and d) hereof shall, mutatis mutandis, apply to the announcement of holding of the GMS held by shareholders under court judgment to hold the GMS as referred to in Article 21 paragraph 6 m) of these Articles of Association.----------

6. Proposal on the Meeting Agenda may be submitted by Shareholders under the following provisions:----------

a. Shareholders may propose the meeting agenda in writing to the Board of Directors within no later than 7 (seven) days before summons for the GMS.-------

b. Shareholders eligible to propose the meeting agenda as referred to in a) hereof shall be:----------

1) the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share;----------

2) 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of total voting shares.---

c. Proposal on the meeting agenda as referred to in a) hereof must:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

1) be made in good faith;----------

2) consider the interest of the Company;----------

3) be the agenda that require the resolutions of the GMS;----------

4) be accompanied by any reasons thereof and proposed material in the meeting agenda; and----------

5) shall not conflict with any laws and regulations;

d. Proposal on the meeting agenda from shareholders as referred to in a) hereof shall constitute the agenda requiring the resolutions of the GMS, and according to the assessment of the Board of Directors having fulfilled any requirements in c) hereof;----------

e. The Company must state proposal on the meeting agenda from shareholders in the meeting agenda included in summons insofar as the proposal on the meeting agenda fulfills any requirements as referred to in a) until d) hereof.----------

7. Summons for the GMS shall be made under the following provisions:----------

a. The Company must make summons to shareholders within no later than 21 (twenty-one) calendar days before the date of holding of the GMS, excluding the date of the summons and the date of the GMS.------

b. Summons for the GMS as referred to in a) hereof shall at least contain information, as follows:-------

ENKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

1. date of holding of the GMS;----------

2. time of holding of the GMS;----------

3. place of holding of the GMS;----------

4. requirements of shareholders eligible to be present at the GMS;----------

5. meeting agenda including explanation on each of the meeting agenda;----------

6. information stating that material related to the meeting agenda is available for shareholders from the date of summons for the GMS until the GMS.----------

7. information stating that the shareholders may grant powers through e-GMS;----------

c. Provisions in a) and b) hereof shall, mutatis mutandis, apply to summons for the GMS held by shareholders under court judgment to hold the GMS as referred to in Article 21 paragraph 6 n) hereof.---

8. The second GMS shall be carried out under the following provisions:----------

a. The second GMS must be held within no earlier than 10 (ten) calendar days and within no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first GMS;----------

b. Summons for the second GMS must be made within no later than 7 (seven) calendar days before the second GMS;----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH

c. Summons for the second GMS must explain that the first GMS has been held but has failed to reach a quorum of attendance. This provision shall be applicable without prejudice to the regulation of Capital Market and any other laws and regulations, and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are recorded.----------

d. In the event the Company fails to carry out the second GMS within time frame as referred to in a) hereof, the Company must carry out the GMS by fulfilling the provisions of paragraph 3 hereof.---

9. In the event the second GMS has been held but fails to reach the quorum of attendance, then the Company may carry out the third GMS, under the following provisions:----------

a. Summons for and the holding of the third GMS at the request of the Company shall be decided by OJK;----------

b. Request as referred to in a) hereof must be submitted to OJK within no later than 14 (fourteen) calendar days after the second GMS has been carried out;----------

c. Request as referred to in b) hereof shall at least contain:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

i. provisions with respect to the GMS quorum as set forth in the Articles of Association of the Company;----------

ii. shareholder list of attendance in the first and second GMS;----------

iii. list of shareholders eligible to attend in the first and second GMS;----------

iv. efforts made to fulfill quorum in the second GMS; and----------

v. quorum required for the third GMS as proposed and any reasons thereof.----------

d. The third GMS is prohibited from being held by the Company before obtaining decision from OJK as referred to in a) hereof.----------

10. Material of the Meeting Agenda shall be stipulated under the following provisions:----------

a. The company must supply the material of the meeting agenda to shareholders, accessible and downloadable through the Company website and / or e-GMS;----------

b. Material of the meeting agenda as referred to in a) hereof must be available from the date of summons until the date of holding of the GMS.---------

c. In the event the provisions of any other laws and regulations stipulate the obligatory availability of the material of the meeting agenda earlier than

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH

provisions as referred to in b) hereof, such supply of the material of the meeting agenda shall follow the provisions of such other laws and regulations.----

d. At the time of holding of the GMS, shareholders shall be entitled to obtain information on the meeting agenda and material related to the meeting agenda insofar as it doesn't conflict with the interest of the Company;----------

e. Meeting agenda regarding the appointment of the members of the Board of Directors and / or the members of the Board of Commissioners, curriculum vitae of candidate for the member of the Board of Commissioners and / or the member of the Board of Commissioners to be appointed must be available at the latest when the GMS is held, insofar as they are set forth in the provisions of any laws and regulations.--------

11. In the event the GMS is a GMS attended only by independent shareholders, the Company must provide statement form duly stamped for signing by the independent shareholders before the execution of the GMS, at least stating that:----------

a. The persons concerned are truly the independent shareholders; and----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. If found in the future that the statement is not true, the persons concerned may be subject to sanction pursuant to the provisions of laws.----------

12. GMS summons correction may be made under the following provisions:----------

a. The Company must make the GMS summons correction if there is any change of information in summons for the GMS that has been made as referred to in paragraph (7) b) hereof.----------

b. In the event GMS summons correction as referred to in a) hereof contains information on the change of date of holding of the GMS and / or the addition of the GMS agenda, the Company must make re-summons for the GMS under summons procedures as set forth in paragraph 7 hereof.--------

c. Provisions on obligation to make re-summons for the GMS as referred to in b) hereof shall not be applicable if the GMS summons correction or the change of information on the date of holding of the GMS and / or the addition of the GMS agenda are made not due to the Company mistake and insofar as OJK doesn't order re-summons.----------

13. Shareholders' Rights in the GMS:----------

a. Shareholders shall, either personally or through representative by virtue of the power of attorney, be entitled to attend the GMS.----------

FIKRI SHARED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. Shareholders entitled to attend the GMS shall be any shareholders whose names are registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day before summons for the GMS.-------

c. In the event the second GMS and the third GMS are carried out, provisions on shareholders entitled to attend the meeting shall be as follows:---

i. In case of the second GMS, any shareholders entitled to attend the meeting shall be any shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day before summons for the second GMS; and--------

ii. In case of the third GMS, any shareholders entitled to attend the meeting shall be any shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day before summons for the third GMS.----------

d. In the event re-summons is made as referred to in Article 24 paragraph 12 b) hereof, shareholders entitled to attend the GMS shall be any shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before re-summons for the GMS.----------

e. In the event summons correction doesn't result in re-summons as referred to in paragraph 12 b), any shareholders entitled to attend the GMS

FIKRI SAID SAED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

shall follow provisions for the shareholders as referred to in b) hereof.----------

14. Granting the powers electronically:----------

a. The Company must provide the alternative of grant of powers electronically to shareholder to be present and cast a vote in the GMS.----------

b. Shareholder as referred to in paragraph 13 hereof may grant powers to any other party to represent him / her to be present and cast a vote in the GMS pursuant to the provisions of any laws and regulations.----------

c. Grant of powers as referred to in b) hereof may be made by shareholder electronically through e-GMS provided by e-GMS Provider or system provided by the Company, in the event the Company uses system provided by the Company.----------

d. Grant of powers as referred to in c) hereof must be made within no later than 1 (one) working day before the holding of the GMS.----------

e. Shareholder may include voting option in any agenda to grant powers electronically.----------

f. Shareholder may make the change of grant of powers including voting option as referred to in c) hereof if the shareholder includes voting option.----------

SIKRI SAID ALFED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

g. Change of grant of powers including voting option as referred to in f) hereof may be made within no later than 1 (one) working day before the holding of the GMS.----------

h. A party who may become Proxy granted electronically shall include:----------

1) Participant which administers securities sub-account / securities owned by shareholder;--------

2) party provided by the Company; or----------

3) party appointed by shareholder.----------

i. The Company must grant powers to Proxy electronically as referred to in h) number 2) hereof.----------

j. Proxy as referred to in h) hereof must:----------

1) be competent pursuant to law; and----------

2) shall neither constitute a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners nor the employee of the Company.----------

k. Proxy as referred to in j) hereof must have been registered in e-GMS system or any system provided by the Company in the event the Company uses a system provided by the Company.----------

l. In the event Principal attends the GMS directly, Proxy's rights to cast a vote on behalf of the Principal shall be null and void.----------

m. Appointment and cancellation of the Proxy, and vote cast, and change of vote cast through e-GMS

FAKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Inggris - B. Indonesia

or any system provided by the Company shall, in the event the Company uses system provided by the Company, be valid and enforceable to any parties, and shall not require wet signature unless specified otherwise in provisions stipulated by e-GMS Provider and / or ay laws and regulations.------

n. Mechanism of registration, appointment, and cancellation of powers and vote cast and change of vote cast shall be stipulated by e-GMS Provider.---

o. In the event the Company uses system provided by the Company, the mechanism of registration, appointment, and cancellation of powers, and vote cast and change of vote cast shall be stipulated in standard operating procedures for the holding of the GMS of the Company.----------

p. Proxy shall be responsible for any powers received from shareholder and must execute the powers in good faith and shall not violate the provisions of any laws and regulations.----------

15. e-GMS Provider:----------

a. Activity as e-GMS Provider may be conducted only by the Safekeeping and Settlement Agency appointed by OJK or any other party approved by OJK.----------

b. Other party approved by OJK as referred to in a) hereof must have contact with the Safekeeping and Settlement Agency and securities administration

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

bureau to ensure shareholders entitled to be present at the GMS.----------

c. Other Party approved by OJK as referred to in b) hereof must set up an Indonesian legal entity and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.----------

d. Obligations of other party approved by OJK as referred to in b) hereof also apply to the Company, in the event the Company uses system provided by the Company.----------

e. e-GMS Provider must, at least:----------

1) be registered as the electronic system administrator of appropriate agency pursuant to the provisions of any laws and regulations;--

2) provide access right to e-GMS User to possibly access e-GMS;----------

3) have the mechanism or operational administration of e-GMS;----------

4) ensure the implementation of activity and the sustainability of e-GMS activity;----------

5) ensure the security and reliability of e-GMS;---

6) inform e-GMS User in case of any system change or development including the addition of e-GMS services and features;----------

7) provide audit track record of all activities of data processing in e-GMS for the purpose

FIKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of supervision, law enforcement, dispute settlement, verification, and examination;------

8) have and place the substitute facility of data center and disaster recovery center related to the administration of e-GMS in Indonesian territory at safe place separate from main data center;-------------------------

9) fulfill minimum standard for information technology system, information technology security, system disturbance and failure, and information technology system management transfer;-------------------------------------

10) store any data of the implementation of e-GMS; and---

11) be responsible for any losses arising from mistake or negligence in the provision and management of e-GMS.-------------------------

f. In the event the Company carries out the GMS electronically by using system provided by the Company, then the obligations of e-GMS Provider as referred to in e) hereof shall be applicable also to the Company, except any obligations to place the substitute facility of data center and disaster recovery center in Indonesia territory as referred to in e) number 8) hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

g. e-GMS Provider shall specify provisions regarding the procedures and methods e-GMS use.----------

h. Provisions regarding the procedures and methods of e-GMS use as referred to in g) hereof shall take effect after obtaining approval from OJK.--------

i. Provisions regarding the procedures and methods of e-GMS use as referred to in g) hereof shall at least, cover:----------

1) the requirements and methods of registration and / or access right grant to e-GMS User, including the cancellation of registration of e-GMS User;----------

2) fees for registration and / or use of e-GMS;------

3) the methods of e-GMS User;----------

4) the rights and obligations of e-GMS User;---------

5) the limitation of e-GMS use access;----------

6) the confidentiality, integrity, and availability of information on the execution of the GMS existing in e-GMS;----------

7) the mechanism of data reporting and collection for the purpose of fulfillment of the Company reporting obligations;----------

8) personal data protection pursuant to the provisions of any laws and regulations; and-------

9) suspension of service provision to e-GMS User.----

16. Publication Media and Language:----------

FIKRI SAID SEED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. Obligations to make announcement, summons, summons correction, re-summons, and the announcement of summary of the Minutes of the GMS as referred to in the Articles of Association of the Company, through at least:----------

i. e-GMS provider website;----------

ii. stock exchange website; and----------

iii. the Company website;----------

in Indonesian language and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.----------

b. Announcement using foreign language as referred to in a) item iii) hereof must include same information as information in the announcement using Indonesian Language.----------

c. In the event there is any difference of interpretation on information announced in foreign language to that announced in Indonesian Language as referred to in b) hereof, then information in Indonesian Language shall be applied as reference.----------

d. In the event the Company uses system provided by the Company, provisions regarding announcement media, summons, call, re-summons, and the announcement of summary of the Minutes of the GMS as referred to in a) until c) hereof shall be realized at least through:----------

PENERJEMAH TERSUMPAH

i. stock exchange website; and----------

ii. the Company website;----------

in Indonesian Language and foreign language, on condition that the foreign language used shall be at least English.----------

-------**CHAIRMANSHIP, PROCEDURES AND MINUTES OF GENERAL**--------

----------**MEETING OF SHAREHOLDERS**----------

----------**ARTICLE 25**----------

1. Chairmanship of the GMS:----------

   a. GMS shall be presided over by the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners:----------

   b. In the event all members of the Board of Commissioners are unavailable or absent, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.----------

   c. In the event all members of the Board of Commissioners or those of the Board of Directors are unavailable or absent as referred to in a) and b) hereof, then the GMS shall be presided over by a shareholder being present at the GMS, appointed from and by the GMS participants.----------

   d. In the event a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with agenda to be decided in the GMS, then the GMS shall be

FERRI SAID DKK
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

chaired by any other member of the Board of Commissioners having no conflict of interest, as appointed by the Board of Commissioners.----------

e. In the event all members of the Board of Commissioners have the conflict of interest, then the GMS shall be presided over by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.-----

f. In the event a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors to chair the GMS has a conflict of interest with agenda to be decided in the GMS, then the GMS shall be chaired by any other member of the Board of Directors having no conflict of interest.----------

g. In the event all members of the Board of Directors have the conflict of interest, then the GMS shall be presided over by a non-controlling shareholder appointed by the majority of any other shareholders being present at the GMS.----------

h. GMS' Chairperson shall be entitled to ask those being present to prove their authority to be present at the GMS and / or to request that a power of attorney to represent a shareholder is shown to him / her.----------

2. The Company must hold the GMS under the following GMS Procedures:----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. At the execution of the GMS, the procedures of the GMS must be provided to shareholders being present.---

b. Principles of the procedures of the GMS as referred to in a) hereof must be read out before the GMS begins.----------

c. At the opening of the GMS, the GMS chairperson must make explanation to shareholders, at least regarding:----------

1) general condition of the Company in brief;--------

2) meeting agenda;----------

3) mechanism of decision making related to the meeting agenda; and----------

4) method of exercise of shareholder's rights to submit question and / or opinion.----------

3. The Company must prepare the Minutes of the GMS under the following provisions:----------

a. Minutes of the GMS shall be prepared in Indonesian Language. The Minutes of the GMS shall serve as valid proof to all shareholders and third party on any decisions and the proceedings of the Meeting.--

b. Minutes of the GMS must be prepared and signed by the meeting chairperson and by at least 1 (one) shareholder appointed from and by the GMS participants.----------

c. Signing as referred to in b) hereof shall not be required if the Minutes of the GMS are prepared

FIKRI SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH

in the form of deed of the minutes of the GMS prepared by the notary public registered with OJK.----

d. In the event the GMS is a GMS only attended by Independent Shareholders, the Minutes of the GMS must be prepared in the form of deed of the minutes of the GMS prepared by notary public registered with OJK.----------

e. Minutes of the electronic GMS must be prepared in the form of notarial deed by notary public registered with OJK without signatures from the GMS participants;----------

f. Minutes of the GMS as referred to in a) and b) hereof must be submitted to OJK within no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held;----------

g. In the event submission of the minutes of the GMS as referred to in f) hereof falls on holiday, then the Minutes of the GMS must be submitted within no later than on subsequent working day.-------

4. The Company must prepare the summary of the Minutes of the GMS under the following provisions:----------

a. Summary of the Minutes of the GMS must at least contain information on:----------

1. the date of the GMS, place of holding of the GMS, time of holding of the GMS, and GMS agenda;--

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

2. members of the Board Directors and those of the Board of Commissioners being present at the GMS;----------

3. number of valid voting shares being present at the GMS and their percentage of total valid voting shares;----------

4. whether or not there is any opportunity for shareholders to submit question and / or give opinion with respect to meeting agenda;----------

5. number of shareholders who submit question and / or give opinion with respect to the meeting agenda, if the shareholders are given the opportunity;----------

6. mechanism of decision making for GMS;----------

7. Results of voting covering the number of pro votes, contra votes, and abstaining (not cast a vote) for each of the meeting agenda, if the decision making is carried out by voting;-----

8. the resolutions of the GMS; and----------

9. payment of dividend in cash to eligible shareholders, if there is any resolution of the GMS related to cash dividend distribution.--------

b. Summary of the Minutes of the GMS as referred to in a) hereof must be announced to the public within no later than 2 (two) working days after the GMS is held.----------

FAUZI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

c. Provisions regarding the Minutes of the GMS and the Summary of the Minutes of the GMS as referred to in Article 25 paragraphs 3 and 4 hereof shall, mutatis mutandis, apply to the GMS held by shareholders under the judgment of the head of district court as referred to in Article 21 paragraph 6 m) hereof, and the GMS held by the Board of Commissioners as referred to in Article 21 paragraph 6) item i) hereof.----------

--------**QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS OF THE**----------

----------**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**----------

----------**ARTICLE 26**----------

1. Quorum of attendance and the resolutions of the GMS for any matters to be decided at the GMS shall be applied by conforming to the following provisions:-----

   a. shall be attended by shareholders representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the meeting except that these Articles of Association determine more quorum.----------

   b. in case of failure to achieve quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended by shareholders representing at least

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - Inggris ke B. Indonesia

1/3 (one third) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the meeting except that these Articles of Association determine more quorum.--------

c. in case of failure to achieve quorum in the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance and a quorum of resolutions determined by OJK at the request of the Company.------

d. Provisions on the quorum of attendance and the quorum of the resolutions of the GMS as referred to in a), b) and c) hereof shall also apply to the quorum of attendance and the quorum of the resolutions of the GMS for the agenda of material transaction and / or business activity change, except for the agenda of material transaction in the form of the transfer of the Company assets more than 50% (fifty percent) of total net assets.----

2. GMS for agenda to transfer the Company assets or pledge the Company assets as a security for debt, 50% (fifty percent) of the Company's total net assets within 1 (one) or more transactions either those

EIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

correlated or not, shall be held under the following provisions:----------

a. shall be attended by shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing at least 3/4 (three fourths) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the GMS;----------

b. in case of failure to achieve the quorum of attendance as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the meeting; and----------

c. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in b) hereof, then the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and

H. BAKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

entitled to adopt any resolutions if attended by the shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance and under the requirements of decision making determined by OJK at the request of the Company.----------

3. Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only attended by independent shareholders as set forth in Capital Market regulation shall be applied under the following provisions:----------

a. shall be attended by independent shareholders representing more than ½ (a half) of total valid voting shares owned by the independent shareholders and any resolutions shall be valid if approved by the independent shareholders representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares owned by the independent shareholders;----------

b. in case of failure to achieve the quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by independent shareholders representing more than ½ (a half) of total valid voting shares owned by the independent shareholders and approved by more than ½ (a half) of total voting shares owned by the independent shareholders being present at the meeting; and----------

c. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b) hereof, then the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by the independent shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance determined by OJK at the request of the Company;----------

d. resolutions of the third GMS shall be valid if approved by independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by the Independent Shareholders being present at the GMS.----------

4. GMS shall, to make change of the Board of Directors, change of the Board of Commissioners, issuance of Equity Securities, increase of the issued and paid-up capital, be held under the following provisions:----------

a. shall be attended by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the meeting;----------

FIKRI SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

b. in case of failure to achieve the quorum of attendance as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing 1/3 (one third) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the meeting;----------

c. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in b) hereof, then the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by the shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance and under the requirements of decision making determined by OJK at the request of the Company, provided that the meeting must attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share.----------

5. GMS shall, to make amendment to these Articles of Association, be held under the following provisions:------

ELYRI SAID ONED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

a. shall be attended by shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 2/3 (two thirds) of total voting shares being present at the meeting, except for amendment to the Articles of Association related to the company existence and capital structure change, attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share;----------

b. in case of failure to achieve the quorum of attendance as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by shareholders and / or their respective representatives representing at least 3/5 (three fifths) of total valid voting shares and any resolutions shall be approved by the shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 1/2 (a half) of total voting shares being present at the meeting, except for amendment to the Articles of Association related to the company existence and capital structure change, attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share;----------

EIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

c. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in b) hereof, then the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by the shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance and under the requirements of decision making determined by OJK at the request of the Company, provided that for amendment to the Articles of Association related to the company existence and capital structure change, attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share.----------

6. In due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, then any Merger, Amalgamation, Takeover, Separation, submission of application for declaration of the Company insolvency, and Dissolution may be made only on the basis of the resolutions of the GMS, under the following provisions:----------

a. shall be attended by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing at least 3/4 (three fourths) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

and / or their lawful respective representatives collectively representing at least 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the meeting;----------

b. in case of failure to achieve the quorum of attendance as referred to in a) hereof, then the second GMS shall be valid if attended by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their respective representatives representing at least 2/3 (two thirds) of total valid voting shares and any resolutions shall be valid if approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share and any other shareholders and / or their lawful respective representatives collectively representing more than 3/4 (three fourths) of total voting shares being present at the meeting;----------

c. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in b) hereof, the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by the shareholders of valid voting shares in a quorum of attendance and under the requirements of decision making determined by OJK at the request of the Company, provided that the meeting must be

PENERJEMAH TERSUMPAH Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share.----------

7. In the event the Company has more than 1 (one) share classification, then the GMS shall, for the agenda of change of rights over shares, be attended only by shareholders impacted by the change of rights over shares at certain share classification, under the following provisions:----------

   a. GMS may be held if at the GMS at least 3/4 (three fourths) of total shares at share classification impacted by the change of rights are present or represented, except that the Articles of Association of the Company determine bigger quorum;----------

   b. in case of failure to achieve quorum as referred to in a) hereof, then the second GMS may be held on condition that the second GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if at the GMS at least 2/3 (two thirds) of total shares at share classification impacted by the change of rights are present or represented, except that the Articles of Association of the Company determine bigger quorum;----------

   c. resolutions of the GMS as referred to in a) and b) hereof shall be valid if approved by more than 3/4 (three fourths) total voting shares being

FIKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

present at the GMS, except that the Articles of Association of the Company determine that a resolution shall be valid if approved by bigger affirmative votes; and----------

d. in case of failure to achieve the quorum of attendance in the second GMS as referred to in b) hereof, then the third GMS may be held on condition that the third GMS shall be valid and entitled to adopt any resolutions if attended by shareholders at share classification impacted by the change of rights in the quorum of attendance and the quorum of resolutions determined by OJK at the request of the Company;----------

e. In the event the share classification impacted by the change of rights over shares at certain share classification has no voting right, shareholders at such share classification under OJK Regulation shall be granted the rights to be present and adopt any resolutions in the relevant GMS with the change of rights over shares at that share classification.----------

8. a. Shareholders shall, either personally or representatively by virtue of the power of attorney, be entitled to attend a GMS, in due observance of the prevailing laws and regulations;----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

b. A shareholder may grant powers and cast a vote electronically in the GMS through e-GMS, as stipulated specially in Capital Market regulation.----------

9. At the GMS, each share shall grant rights to its owner to cast 1 (one) vote.----------

10. Shareholders with valid voting rights being present at the GMS but abstaining shall be deemed to have cast same vote as the majority votes of shareholders who cast votes.----------

11. In voting, any vote cast by a shareholder shall be applicable to any shares he / she owns and the shareholder shall not be entitled to empower more than one proxy for a portion of shares he / she owns under different vote. The different vote cast by the custodian bank or the securities company representing shareholders in mutual fund is not different vote as contemplated in this article.----------

12. A members of the Board of Directors, that of the Board of Commissioners, and the Company employee may act as proxy at the GMS, but in voting the member of the Board of Directors, that of the Board of Commissioners, and the employee concerned shall be prohibited from acting as the proxy of shareholder. In the event such powers are granted electronically, the member of the Board of Directors, that of the Board of

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Commissioners, and the employee concerned shall be prohibited from acting as proxy.----------

13. Voting shall be conducted orally, unless Meeting Chairperson determines otherwise.----------

14. Any resolutions shall be adopted on the basis of mutual consensus.----------

15. In the event resolutions on the basis of mutual consensus as referred to in paragraph 14 hereof are not achieved then the resolutions shall be adopted on the basis of voting as set forth in these Articles of Association.--

----------**USE OF PROFIT**----------

----------**ARTICLE 27**----------

1. Use of net profit including the amount of allowance for possible loss shall be decided by the Annual GMS.-----

2. Board of Directors must submit proposal to the Annual GMS with respect to the use of net profit not yet distributed, as stated in balance sheet and income statement submitted to obtain approval from Annual GMS in which proposal may state how much net profit not yet distributed may be kept for reserve fund, and proposal on the amount of dividend to shareholders, or any other distribution, such as *tantiem* for the members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners, bonus for employee, social fund reserve and any others that may be distributed,

FIKRI SAID SYED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

without prejudice to the rights of the GMS to decide otherwise.----------

3. All net profit after deduction by allowance for reserve fund as referred to in (1) hereof shall be distributed to Shareholders as dividend, unless determined otherwise by GMS, attended and approved by the Holder of Series-A *Dwiwarna* Share.----------

4 a. Dividend shall be paid only according to the financial capacity of the Company on the basis of resolutions adopted in the Annual GMS, in which resolutions must also determine time, method of payment and form of dividend in due observance of the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market, and the regulation of Stock Exchange where the Company shares are recorded.-

b. In the event there any resolutions of the GMS with respect to cash dividend distribution, the Company must make cash dividend payment to eligible shareholders within no later than 30 (thirty) calendar days after the announcement of the summary of the Minutes of GMS that decide the cash dividend distribution.----------

c. Dividend of shares shall be paid to a person on behalf of whom the shares are recorded in the Register of Shareholders, on date appointed by the Annual GMS that decides dividend distribution.--------

ENERJEMAH TERSUMPAH Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

d. Payday must be announced by the Board of Directors to shareholders.----------

5. In addition to the use of net profit as referred to in paragraphs 1) and 2) hereof, GMS may determine the use of net profit for any other distribution, such as *tantiem* to the Board of Directors, Board of Commissioners, and bonus to employees.----------

6. Dividend as referred to in paragraph 3 hereof may be distributed only if the Company has positive earnings.-

7. Use of net profit for *tantiem* and bonus shall be implemented insofar as they are neither budgeted nor computed as cost within current year.----------

8. Dividend not taken within 5 (five) years from the date of decision for last dividend payment shall be included in reserve fund specially allocated therefor.----

9. Dividend in such special reserve fund may be taken by eligible Shareholders by submitting the proof of their rights over the dividend satisfactory to the Board of Directors of the Company, provided that it shall not be taken in lump sum and by charging administration fee determined by the Board of Directors.--

10. Dividend which has been included in the special reserve fund referred to in paragraph 8 hereof and has not been taken for 10 (ten) years will belong to the Company.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

11. The Company may distribute interim dividend before the end of the Company's fiscal year based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and / or if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of total shares issued, in due observance of profit projection and financial capacity of the Company, executed pursuant to the prevailing laws and regulations.----------

12. Distribution of interim dividend shall be determined by virtue of the resolutions of the Board of Directors' Meeting after obtaining approval from the Board of Commissioners in due observance of paragraph 11 hereof, including the distribution of interim dividend not yet enter into RKAP.----------

13. In the event after the end of fiscal year, the Company is found to have suffered loss, then interim dividend which has been distributed must be returned by Shareholders to the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be responsible individually and collectively for the Company loss, in the event the Shareholders fail to return the interim dividend referred to in paragraph 11 hereof.------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

----------**USE OF RESERVE FUND**----------

----------**ARTICLE 28**----------

1. The Company shall maintain obligatory reserve fund and other reserve fund.----------
2. Allowance of net profit for reserve fund referred to in paragraph 1 hereof will be effective if the Company has positive earnings.----------
3. Portion of profit reserved for reserve fund shall be determined by the GMS in due observance of the prevailing laws and regulations. Allowance of net profit for obligatory reserve fund as referred to in paragraph 1 hereof shall be implemented until the fund has reached at least 20% (twenty percent) of total issued and paid-up capital.----------
4. Obligatory reserve fund as referred to in 1 hereof which has not yet reached percentage as referred to in paragraph (3) hereof may be used only to cover the Company loss that can not be fulfilled by any other reserve fund.----------
5. If the obligatory reserve fund referred to in paragraph (1) hereof has exceeded 20% (twenty percent), then the GMS may decide that the excessive amount of the reserve fund will be used for the Company needs.----------
6. Board of Directors must manage reserve fund to make the reserve fund profitable, in a manner deemed good by the Board of Directors upon approval of the Board

FAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

of Commissioners and in due observance of any laws and regulations.----------

7. Profit obtained from reserve fund shall be included in income statement.----------

----------**AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**----------

----------**ARTICLE 29**----------

1. Amendment to these Articles of Association must observe Limited Liability Law and / or any laws and regulations in the field of Capital Market.----------
2. Amendment to these Articles of Association shall be decided by the GMS under provisions as referred to in Article 26 paragraph 4 and paragraph 5 hereof.---------
3. Agenda for amendment to the Articles of Association must be stated clearly in summons for the GMS.----------
4. Alteration of the provisions of the Articles of Association relevant to the Company name change, domicile, purposes and objectives, business activities, term of Company incorporation, authorized capital value, decrease of issued and paid-up capital, and change of status from Non-Public Company into Public Company or vice-versa, must obtain approval from Minister in charge thereof as referred to in Limited Liability Company Law.----------
5. Amendment to these Articles of Association shall, in addition to that relevant to matters referred to in paragraph 4 hereof, be simply notified to Minister

NKRI SAID
PENERJEMAH TERSUMPAH

in charge thereof in due observance of the provisions of Limited Liability Company Law.----------

6. Resolutions on the decrease of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and shall be announced by the Board of Directors in daily newspaper using Indonesian language published and / or circulated widely in the Company domicile and in the State Gazette within no later than 7 (seven) days from the date of the resolutions of the GMS regarding the decrease of capital.----------

---------**MERGER, AMALGAMATION, TAKEOVER AND SEPARATION**---------

----------**ARTICLE 30**----------

1 Merger, Amalgamation, Takeover and Separation shall be decided by the GMS pursuant to provisions set forth in Article 26 paragraph 6 hereof.----------

2. Further provisions regarding Merger, Amalgamation, Takeover and Separation shall be those referred to in any laws and regulations, particularly laws and regulations in the field of Capital Market.----------

DISSOLUTION, LIQUIDATION AND EXPIRATION OF LEGAL ENTITY STATUS

----------**ARTICLE 31**----------

1. Dissolution of the Company may be implemented by virtue of the resolutions of the GMS with provisions set forth in Article 26 paragraph 6 hereof.----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

2. If the Company is dissolved by virtue of the resolutions of the GMS or declared dissolvent under Court judgment, then liquidation shall be conducted by liquidator.--------

3. Liquidator shall be responsible to GMS or court by which it is appointed for the purpose of Company liquidation.----------

4. Liquidator must notify Minister in charge thereof and announce the final results of liquidation process in newspaper after GMS has granted discharge and acquittal to Liquidator or after Court which appoints the liquidator have accepted accountability.----------

5. Provisions on dissolution, liquidation and expiration of legal entity status of the Company shall refer to laws and regulation, particularly provisions in the field of Capital Market.----------

----------**DOMICILE OF SHAREHOLDERS**----------

----------**ARTICLE 32**----------

For any matters regarding Shareholders related to the Company, the Shareholders shall be deemed to reside in address recorded in the Register of Shareholders referred to in Article 9 hereof.----------

----------**CLOSING PROVISIONS**----------

----------**ARTICLE 33**----------

-Anything not set forth or not sufficiently set forth in these Articles of Association shall follow the Limited Liability Company Law, Capital Market regulation and any

FAHRI SAID ALATAS
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

other laws and regulations and / or shall be decided in the GMS in due observance of laws and regulations.----------

-Finally, the appearing person by acting as mentioned above declares that:----------

He hereby empowers Mister BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law (whose identity will be described below) and either collectively or individually with substitution rights, to submit application for approval of, and notification on, amendment to the Articles of Association of the Company as included in this deed to the Minister of the Republic of Indonesia and register the same in the Register of Companies pursuant to any laws and regulations applicable therefor, submit petition, sign petition, deed and any other documents, choose domicile, announce the same in the State Gazette of the Republic of Indonesia, and subsequently do anything required without any exception, pursuant to the provisions of any laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia.------

-This Deed is completed at 09.45 WIB (forty-five minutes past nine, Western Indonesia Time).----------

-From any matters described above.----------

----------**IN WITNESS WHEREOF**----------

-This deed is made and executed in Jakarta on day, date, and hour first written above, by taking place at the Notary Public Office, Representative Office at Jalan Medan Merdeka Timur 15 Central Jakarta, in the presence of:----------

ZIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

- Mister BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law, born in Jakarta, on 2-8-1981 (the second day of August one thousand nine hundred and eighty one), an Indonesian Citizen, residing in Jakarta, Block Duku, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 007, Community Unit of (Rukun Warga) 010, Vilagge of Cibubur, Sub-district of Ciracas, East Jakarta, the holder of Residential Identity Card number 3173040208810012; and----------
- Madam DIAN INDIRA, Bachelor of Law, born in Makassar, on 18-12-1993 (the eighteenth day of December one thousand nine hundred and ninety three), an Indonesian Citizen, residing in Bogor, Amara Garden Block C4, Jalan Ciliwung, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community Unit of (Rukun Warga) 001, Vilagge of Pondok Rejeg, Sub-district of Cibinong, the holder of Residential Identity Card number 7371115812930003; temporarily being in Jakarta;----------

-both are the employees of Notary Public Office, as witnesses.----------

-After I, the Notary Public, have read out this deed to the appearing person and witnesses, then the appearing person, witnesses and I, the Notary Public immediately sign the same, whereas the specimen of the right thumbprint of the appearing person affixed to a separate sheet is attached to the minutes of this deed.----------

-Executed with one deletion, without replacement or addition.-

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

-Minutes of this deed have been properly signed.----------

-ISSUED AS A COPY OF THE SAME WORDING.----------

Notary Public in South Jakarta Administrative City

13th FEB 2026

[stamped, sealed and signed]

ASHOYA RATAM, SH, MKn.

I, **FIKRI SAID OBED, S.S.,** a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-16.AH.03.07 of 2024 and based on prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby declare and certify, in accordance with my oath of office, that the document is a true, faithful, and complete translation of the source document presented to me.

Jakarta, March 16, 2026

FIKRI SAID OBED, S.S.

Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARY PUBLIC & LAND DEED OFFICER

IN

SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY

Jalan Suryo Number 54 Kabayoran Baru South Jakarta 12180

Phone: (021) 2923 6060, Fax: (021) 2923 6070

Email: notaris@ashoyaratam.com

STATEMENT OF RESOLUTIONS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"PT TIMAH Tbk"

Date : 14th January 2026

Number : 17

Copy :

FIKRI SAID ABED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

STATEMENT OF RESOLUTIONS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"PT TIMAH Tbk"

Number: 17

-On this day, Wednesday, 14-1-2026 (the fourteenth day of January two thousand twenty-six).----------

-At 09.46 WIB (forty-six minutes past nine, Western Indonesia Time).----------

-Appeared before me, ASHOYA RATAM, Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary Public in South Jakarta Administrative City, in the presence of witnesses known to me, the Notary Public, and to be mentioned at the end of this deed:----------

- Mister **RESTU WIDIYANTORO**, born in Salatiga, on 20-5-1965 (the twentieth day of May one thousand nine hundred and sixty five), an Indonesian Citizen, the President Director of PT TIMAH Tbk, residing in Sleman, Karangmojo, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 006, Community Unit of (Rukun Warga) 003, Vilagge of Purwomartani, Sub-district of Kalasan, Sleman Regency, the holder of Residential Identity Card number 3471032005650005, the photocopy of which is attached to the minutes of this deed, temporarily being in Jakarta;----------

  -according to his statement, in this case, acting in his capacity as mentioned above and based on the powers of the General Meeting of Shareholders

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of PT TIMAH Tbk to be mentioned below, and thereby representing the Board of Directors of, and therefore acting for and on behalf of, and legally representing **"PT TIMAH Tbk"**, a limited liability company incorporated pursuant to and under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled and having its head office in Pangkalpinang Municipality, having its address at Jalan Jenderal Sudirman number 51, Opas Indah, Taman Sari, the Articles of Association of which have been amended entirely in order to adjust with the Law number 40 of 2007 (two thousand seven) regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as "**UUPT**"), as published in the State Gazette of Republic of Indonesia dated 13-3-2009 (the thirteenth day of March two thousand nine) under number 21, Supplement number 7468/2009; the aforesaid Articles of Association of the limited liability company have been re-amended as included / announced in:----------

- the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 27-9-2011 (the twenty seventh day of September two thousand eleven) under number 77 Supplement number 29351/2011;----------
- Deed dated 26-6-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under number 75,

ZAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-6-2014 (the twenty sixth day of June two thousand fourteen) under number AHU-03464.40.21.2014;----------

- Deed dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number 31, which notification on the merger of the Company has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number AHU-00006.40.43.2014 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 26-8-2014 (the twenty sixth day of August two thousand fourteen) under number AHU-00124.40.41.2014;----------

- Deed dated 27-5-2015 (the twenty seventh day of May two thousand fifteen) under number 47, which has obtained approval from the

M. FAKRI SAID ALSED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 28-5-2015 (the twenty eighth day of May two thousand fifteen) under number AHU-0936015.AH.01.02.Tahun 2015 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 28-5-2015 (the twenty eighth day of May two thousand fifteen) under number AHU-AH.01.03-0935421;----------

- Deed dated 26-10-2017 (the twenty sixth day of October two thousand seventeen) under number 47, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 7-11-2017 (the seventh day of November two thousand seventeen) under number AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republicof Indonesia as evidenced from the letter dated 7-11-2017 (the seventh day

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

of November two thousand seventeen) under number AHU-AH.01.03-0188415;----------

- Deed dated 29-11-2017 (the twenty ninth day of November two thousand seventeen) under number 76, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 12-12-2017 (the twelfth day of December two thousand seventeen) under number AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017;----------
- Deed dated 12-7-2018 (the twelfth day of July two thousand eighteen) under number 11, which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced fromthe letter dated 13-7-2018 (the thirteenth day of July two thousand eighteen) under number AHU-AH.01.03-0221752;-----

-the entire minutes of deed as mentioned above are made before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta;----------

- Deed dated 1-7-2020 (the first day of July two thousand twenty) under number 1, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of

FAKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

Indonesia by virtue of the Decree dated 3-7-2020 (the third day of July two thousand twenty) under number AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020;----------

- Deed dated 28-4-2021 (the twenty eighth day of April two thousand twenty-one) under number 40 which notification on amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 7-5-2021 (the seventh day of May two thousand twenty one) under number AHU-AH.01.03-0298657;----------
- Deed dated 3-6-2022 (the third day of June two thousand twenty two) under number 13, which has obtained approval from the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of the Decree dated 6-6-2022 (the sixth day of June two thousand twenty two) under number AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 and notification on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced from the letter dated 6-6-2022 (the sixth day of

FIRMANSAH SEO
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

June two thousand twenty two) under number AHU-AH.01.03-0245855;----------

-the three minutes of deed last mentioned are made before RINI YULIANTI, Bachelor of Law, Notary Public in East Jakarta City;----------

-the last composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the aforesaid Limited Liability Company is included in deed dated 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty-five) under number 64 which the minutes of deed are made before me, the Notary Public:----------

(hereinafter the aforesaid **PT TIMAH Tbk** shall be simply abbreviated to "**the Company**").----------

-The appearing person is known to me, the Notary Public.------

-The appearing person, by acting as mentioned above, first declares as follows:----------

-that on Wednesday, 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty-five), taking place at Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Lobby Floor, Jalan Lapangan Banteng Selatan number 1, Central Jakarta 10710 was held an Extraordinary General Meting of Shareholders of the Company (hereinafter abbreviated to **"the Meeting"**);----------

-that Notification, Announcement and Summons for the Meeting have been made pursuant to the provisions of

TJOKRI SAID OFFICIAL
PENERJEMAH TERSUMPAH
Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 13, Article 14 and Article 17 of POJK 15/2020, as follows:----------

- **Notification** on plan to hold a Meeting to the Financial Service Authority through the Company letter dated 3-11-2025 (the third day of November two thousand twenty-five) under number 0488/Tbk/PTH-0000/25-S9.3.1 in the matter of Notification on Plan to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT "TIMAH Tbk ("the Company") of 2025 (two thousand twenty-five).----------
- **Announcement** to shareholders with respect to the intention of making of Call for a Meeting, has been implemented by uploading to the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "**KSEI**"), the website of *Bursa Efek Indonesia* (BEI) / Indonesian Stock Exchange (hereinafter referred to as "**BEI**") and the Company website on 10-11-2025 (the tenth day of November two thousand twenty five).------
- **Summons** to shareholders to attend a Meeting has been published by uploading to the website of BEI, the Company website and the website of KSEI on 25-11-2025 (the twenty fifth day of November two thousand twenty-five).----------

-that at the General Meeting of Shareholders attended and / or represented by those being present physically or

FERRI SAID CAND
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

electronically through the Electronic General Meeting System of KSEI (hereinafter called "**eASY.KSEI**") entirely 5,933,525,962 (five billion nine hundred and thirty three million five hundred and twenty five thousand nine hundred and sixty two) shares including Series-A *Dwiwarna* share or at 79.67% (seventy nine point sixty seven percent) of total valid voting shares issued by the Company until the Meeting, namely 7,447,753,454 (seven billion four hundred and forty seven million seven hundred and fifty three thousand four hundred and fifty four) shares comprised of:----------

- 1 (one) Series-A *Dwiwarna* share; and----------
- 7,447,753,453 (seven billion four hundred and forty seven million seven hundred and fifty three thousand four hundred and fifty three) Series-B shares.----------

-in view of the Register of Company Shareholders as of 24-11-2025 (the twenty fourth day of November two thousand twenty-five), until 16.00 WIB (sixteen zero-zero, Western Indonesia Time), then quorum required in Article 41 paragraph (1) a), Article 42 a) and Article 45 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) a), Article 25 paragraph (4) a) and Article 25 paragraph (5) a) of the Articles of Association of the Company has been fulfilled.----------

-that the Meeting is held with Agenda, as follows:----------

- **Approval for Change of the Company Management.**----------

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

-that the Meeting has empowered with substitution rights the Board of Directors of the Company to state any decisions at the Meeting in the form of Notarial Deed and appear before Notary Public or appropriate official and make adjustment or improvement needed if required by the authority for the purpose of fulfillment of the contents of the Meeting resolutions.----------

-that the above matters are included in the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "PT TIMAH Tbk", dated 17-12-2025 (the seventeenth day of December two thousand twenty-five) under number 63, the minutes of which are prepared by me, the Notary Public (hereinafter simply abbreviated to **"the Minutes of Meeting"**);----------

-Now, therefore the appearing person Mister **RESTU WIDIYANTORO** by acting in his capacity as mentioned above hereby restates any decisions made in the Third Agenda of the Meeting, as follows:----------

In the Third Agenda of the Meeting:----------

"The Meting by the majority votes of 5,827,585,587 (five billion eight hundred and twenty seven million five hundred and eighty five thousand five hundred and eighty seven) shares or at 98.21% (ninety eight point twenty one percent) of total votes cast at the Meeting, decides:----------

1. To confirm the honorable discharge of:----------

FIKRI SAID OMEO
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

- Mister **ANDI SETO GADHISTA ASAPA**, born in Makassar, on 20-11-1983 (the twentieth day of November one thousand nine hundred and eighty three), an Indonesian Citizen, Entrepreneur, residing in Makassar, JaIan Nikel II number 13, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 001, Community Unit of (Rukun Warga) 001, Village of Balla Parang, Sub-district of Rappocini, Makassar City, the holder of Residential Identity Card number 3674012011830002;----------

as the Director of Human Resources of the Company appointed by virtue of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2025 (two thousand twenty-five) dated 2-5-2025 (the second day of May two thousand twenty-five), as of 17-11-2025 (the seventeenth day of November two thousand twenty five) with the expression of thanks for contribution of energy and thought he gives during his term of office as the Company Management member.----------

2. **To appoint Madam RATIH MAYASARI** (whose identity will be described below) **as the Director of Human Resources of the Company.----------**

3. **Term of office of the member of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 (two) above, shall be maximally until the closing**

IKRI SAID OSED
ENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders as of the approval of the Resolutions, in due observance of the laws and regulations in the field of Capital Market and without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to discharge her anytime.----------

4. For the member of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 (two) above still holding any other position prohibited by the laws and regulations for double position, in this case, as the Director of the Subsidiary of State-Owned Enterprise, then the person concerned shall be obliged to resign or discharged from the position.------

5. Upon the confirmation of discharge, and appointment of the members of the Board of Directors of the Company as referred to in point 1 (one) and point 2 (two) above, the composition of the Company Management Board shall be as follows:----------

BOARD OF DIRECTORS:----------

President Director : the aforesaid Mister **RESTU WIDIYANTORO**;----------

Vice President Director : Mister **HARRY BUDI SIDHARTA**, born in Denpasar, on 27-12-1977 (the twenty seventh day of December one thousand nine hundred and

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

seventy seven), an Indonesian Citizen, Employee of State-Owned Enterprise, residing in Tangerang, Althia Park V Block A.3 number 11 Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 005, Community Unit of (Rukun Warga) 007, Village of Perigi Baru, Sub-district of Pondok Aren, Tangerang Selatan City, the holder of Residential Identity Card number 3674032712770006;-------

Director of Finance and Risk Management : Madam **FINA ELIANI**, born in Mentok, on 10-9-1982 (the tenth day of September one thousand nine hundred and eighty two), an Indonesia Citizen, Employee of State-Owned Enterprise, residing in Pangkalpinang, Jalan Stania number F14 A Komplek Timah Bukit Baru, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community Unit of (Rukun Warga) 001, Village of Taman Bunga, Sub-district of Gerunggang, Pangkalpinang City, the holder of Residential Identity

AIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Card number 1971055009820002;-------

Director of Operation : Mister **HANDY GENIARDI**, born in Jakarta, on 12-6-1964 (the twelfth day of June one thousand nine hundred and sixty four), an Indonesian Citizen, Indonesian National Army (TNI), residing in Cimahi, Jalan Kalidam number G.41, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 001, Community Unit of (Rukun Warga) 011, Village of Karangmekar, Sub-district of Cimahi Tengah, Cimahi City, the holder of Residential Identity Card number 3175051206640013;------------

Director of Business Development : Mister **SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA**, born in Kotabumi, on 21-1-1973 (the twenty first day of January one thousand nine hundred and seventy three), an Indonesian Citizen, Entrepreneur, residing in Jakarta, Eramas - 2000 Block A.9/23, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 002, Community Unit of (Rukun Warga) 015, Village

IKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

of Pulo Gebang, Sub-district of Cakung, East Jakarta City, the holder of Residential Identity Card number 3175012101730008;-------

Director of Human Resources : Madam **RATIH MAYASARI**, born in Palembang, on 15-5-1982 (the fifteenth day of May one thousand nine hundred and eighty two), an Indonesian Citizen, private Employee, residing in Jakarta, Komplek DKI STR Jaya I Block C/15, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 016, Community Unit of (Rukun Warga) 003, Village of Sunter Jaya, Sub-district of Tanjung Priok, North Jakarta, the holder of Residential Identity Card number 3172025505820017;-------

Director of Production and Commerce : Mister **ILHAMSYAH MAHENDRA**, born in Jakarta, on 26-3-1988 (the twenty sixth day of March one thousand nine hundred and eighty eight), an Indonesian Citizen, Private Employee, residing in Tangerang, Bukit Cirendeu D-10/17,

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community Unit of (Rukun Warga) 008, Village of Pondok Cabe Ilir, Sub-district of Pamulang, Tangerang Selatan City, the holder of Residential Identity Card number 3674062603880010;----------

BOARD OF COMMISSIONERS:----------

President Commissioner also serving as Independent Commissioner : Mister **AGUS ROHMAN**, born in Bandung, on 15-8-1963 (the fifteenth day of August one thousand nine hundred and sixty three), an Indonesian Citizen, Retired Indonesian National Army (TNI), residing in Karawang, Perum Gading Elok I Block K.15 number I, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community Unit of (Rukun Warga) 030, Village of Karawang Timur, Sub-district of Karawang Timur, Karawang Regency, the holder of Residential Identity Card number 3215031508630003;----------

Independent : Mister **M HITA TUNGGAL**, born in

PENERJEMAH TERSUMPAH B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Commissioner Magelang, on 11-2-1962 (the eleventh day of February one thousand nine hundred and sixty two), an Indonesian Citizen, Retired Indonesian National Army (TNI), residing in Jakarta, Jalan Teluk Jakarta Block C I number 19, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 006, Community Unit of (Rukun Warga) 017, Village of Duren Sawit, Sub-district of Duren Sawit, East Jakarta, the holder of Residential Identity Card number 3175071102620009;----------

Commissioner : Madam Doctor of Engineering **ENIYA LISTIANI DEWI**, born in Magelang, on 14-6-1974 (the fourteenth day of June one thousand nine hundred seventy four), an Indonesian Citizen, Civil Servant (PNS), residing in Bogor, Jalan Palem Putri II Number 20 Taman Yasmin V, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 001, Community Unit of (Rukun Warga) 010, Village of

FIKRI SAID ALFED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

Curugmekar, Sub-district of Kota Bogor Barat, Bogor City, the holder of Residential Identity Card number 3271045406740011;-------

Independent Commissioner : Mister **YUSLIH IHZA**, born in Belitung Timur, on 29-1-1952 (the twenty ninth day of January one thousand nine hundred and fifty two), an Indonesian Citizen, Private Employee, residing in Depok Maharaja Block B2 Number 3, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 001, Community Unit of (Rukun Warga) 015, Kelurahan Rangkapan Jaya, Sub-district of Pancoran Mas, Depok City, the holder of Residential Identity Card number 3276012901520002;-------

Commissioner : Mister **RIZANI USMAN**, born in Bangka, on 28-7-1963 (the twenty eighth day of June one thousand nine hundred and sixty three), Retired Employee of State-Owned Enterprise, residing in Depok, Pesona Depok II Block AM number

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

3, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 001, Community Unit of (Rukun Warga) 026, Village of Mekarjaya, Sub-district of Sukmajaya, Depok City, the holder of Residential Identity Card number 3276052807630002;----------

-provided that their term of office shall be as follows:------

-Members of the Board of Directors:----------

- the aforesaid Madam FINA ELIANI shall be until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**GMS**") for the fiscal year 2026 (two thousand twenty six) to be held by 2027 (two thousand twenty seven).----------
- the aforesaid Mister RESTU WIDIYANTORO, Mister SUHENDRA RATUPRAWTEGARA, Mister HARRY BUDI SIDHARTA, Mister HANDY GENIARDI, Madam RATIH MAYASARI and Mister ILHAMSYAH MARENDRA shall be until the closing of the Annual GMS for the fiscal year 2029 (two thousand twenty nine) to be held by 2030 (two thousand thirty).-----

-Members of the Board of Commissioners:----------

- the aforesaid Mister AGUS ROHMAN, Mister YUSLIH IHZA, Mister M HITA TUNGGAL, Mister RIZANI USMAN and Madam Doctor of Engineering ENIYA LISTIANI DEWI shall be until the closing of the Annual GMS for the fiscal

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B. Inggris - B.Inggris ke B. Indonesia

year 2029 (two thousand twenty-nine) to be held by 2030.----------

-Finally, the appearing person, by acting as mentioned above, declares that he hereby grants powers to Mister BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law (whose identity will be described below) and

.

either collectively or individually and with the rights to transfer the powers to any other person, to submit application in order to provide information with respect to the change of the Company Management to the Minister of Laws of the Republic of Indonesia, and for such needs, submit petition, sign the petition, deed and any other documents, choose domicile and further do anything required without any exception pursuant to the provisions of laws.----------

-This deed is completed at 10.00 WIB (ten zero-zero Western Indonesia Time).----------

-Based on any matters described above.----------

----------**IN WITNESS WHEREOF**----------

This deed is made and executed in Jakarta, on day, date and hour first written above, taking place outside the Notary Public office, Representative Office Jalan Medan Merdeka Timur 15 Central Jakarta, in the presence of:---------

- Mister BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law, born di Jakarta, on 2-8-1981 (the second day of August

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B.Indonesia ke B.Inggris - B.Inggris ke B.Indonesia

one thousand nine hundred and eighty one), an Indonesian Citizen, residing in Jakarta, Block Duku, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 007, Community Unit of (Rukun Warga) 010, Village of Cibubur, Sub-district of Ciracas, East Jakarta, the holder of Residential Identity Card number 3173040208810012; and----------

- Madam DIAN ANDIRA, Bachelor of Law, born in Makassar, on I8-12-1993 (the eighteenth day of December one thousand nine hundred and ninety three), an Indonesian Citizen, residing in Bogor, Amara Garden Block C4, Jalan Ciliwung, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 003, Community Unit of (Rukun Warga) 001, Village of Pondok Rajeg, Sub-district of Cibinong, Bogor Regency, the holder of Residential Identity Card number 7371115812930003, temporarily being in Jakarta;-----

-both are the employees of Notary Public office, as witnesses.----------

-After I, the Notary Public, have read out this deed to the appearing person and witnesses, then the appearing person, witnesses and I, the Notary Public, immediately sign the same, whereas the specimen of the appearing person's right thumbprint affixed to a separate sheet is attached to the minute of this deed.----------

-Executed without any alteration.----------

-Minutes of this deed have been properly signed.----------

-ISSUED AS A COPY OF THE SAME WORDING.----------

FIKRI SAID OMED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

Notary Public in South Jakarta

Administrative City

28th JAN 2026

[stamped, sealed and signed]

ASHOYA RATAM, SH., MKn

I, **FIKRI SAID OBED, S.S.,** a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-16.AH.03.07 of 2024 and based on prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby declare and certify, in accordance with my oath of office, that the document is a true, faithful, and complete translation of the source document presented to me.

Jakarta, March 13, 2026

FIKRI SAID OBED
PENERJEMAH TERSUMPAH
B. Indonesia ke B. Inggris - B. Inggris ke B. Indonesia

FIKRI SAID OBED, S.S.